

“Buku ini penting dibaca oleh para pengambil keputusan dan khalayak umum untuk mengetahui bagaimana pelayanan telah berubah dan masih terus dituntut untuk berubah.”

—Prof. Rhenald Kasali
Rumah Perubahan

“Saya sangat mengapresiasi penerbitan buku Revolusi Pelayanan Publik. Sebuah inspirasi, motivasi, semangat, juga optimisme untuk menjadikan revolusi mental di Indonesia benar-benar dan niscaya akan terjadi.”

—Ary Ginanjar Agustian
Founder ESQ

“Negara Indonesia yang diidealisasikan adalah negara pelayan (pengurus). Semangat gotong royong sebagai nilai inti Pancasila diorientasikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi meraih tujuan nasional. Untuk itu, setiap warga dan penyelenggara negara harus memiliki mental, kecakapan, dan integritas pelayanan. Buku ini memberi tuntunan bagaimana hal itu bisa dikembangkan.”

—Yudi Latif
Ketua UKP PIP

“Di era yang terus berubah saat ini, pemimpin dituntut merevolusi pemikiran dalam melakukan pelayanan kepada seluruh stakeholders-nya. Buku ini akan menunjukkan paradigma baru dalam melakukan transformasi pelayanan.”

—Erick Thohir,
Chairman Mahaka Group
dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia

“Buku ini bagus sekali karena bercerita tentang success story di ranah pelayanan publik yang dilakukan oleh para pemimpin daerah yang inovatif, jujur, dan tulus sehingga melahirkan good governance, produktivitas, serta kese-

jahteraan. Revolusi Pelayanan adalah satu rujukan konkret dari lapangan yang diperlukan setiap pemimpin dan entrepreneur.”

—Muhammad Syafii Antonio
Tazkia Group dan KEIN

“Buku ini menguatkan keyakinan kita bahwa negeri ini tak pernah kekurangan stok pendorong dan pemimpin perubahan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, dari kepala daerah hingga BUMN. Mereka menggerakkan juga mewujudkan pelayanan untuk rakyat dan pelanggan mereka. Mereka antusias menjalaninya. Kita makin optimis atas masa kini dan masa depan anak bangsa.”

—Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta

“Semangat negara demokrasi adalah mengutamakan perlindungan dan pelayanan bagi semua rakyatnya. Meskipun Republik ini sudah merdeka 73 tahun, mayoritas rakyatnya belum merasakan kehadiran negara yang benar-benar melayani dan melindungi. Namun, cerita-cerita perubahan di sektor pelayanan publik yang diangkat Mukhlis Yusuf ini memompa asa optimisme kita semua. Menghadirkan negara yang melayani itu sangat bisa dilakukan jika para pemimpinnya bekerja sepenuh hati, menomorsatukan integritas, dan mampu membenahi birokrasi. Mereka tidak sebatas menyalakan lilin perubahan, tetapi juga mengobarkan api revolusi pelayanan publik di tengah kepungan mental priyayi yang menghinggapi sebagian besar birokrasi. Mewujudkan birokrasi yang melayani adalah bagian krusial dari upaya kita memerdekakan bangsa ini secara utuh. Buku ini perlu dibaca para elite politik dan pemangku kebijakan, tidak terkecuali kepala daerah dan birokrasi pemerintahan.”

—Ahmad Syafii Maarif
Mantan Ketua PP Muhammadiyah dan Dewan Pengarah Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

“Sebagai ‘jurkam’ Revolusi Mental, saya sering merasa terlalu banyak melontarkan kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa agar masyarakat mau berubah. Ternyata masyarakat juga perlu mengetahui bentuk kemajuan-kemajuan yang telah kita capai agar mereka percaya diri bahwa bangsa ini bisa berubah menjadi lebih baik. Buku ini sangat membantu saya menyediakan gambaran-gambaran positif itu. Terima kasih penulis, semoga buku ini bisa menjadi pemicu keberhasilan Revolusi Mental.”

—Prof. Dr. Paulus Wirutomo
Anggota Pokja Revolusi Mental Nasional

“Di zaman sekarang ini, warga tak bisa hanya dimaknai sebagai audience yang pasif atau para penerima pesan dan perintah. Warga telah dan sedang bertransformasi menjadi publik yang aktif, penagih janji, dan penuntut kelayakan layanan publik. Maka, ‘para pembentuk dan pengendali dunia’ bukanlah pemimpin besar selevel presiden atau perdana menteri, melainkan para pejabat publik yang mengelola langsung pelayanan publik dan berinteraksi langsung dengan warga. Revolusi Pelayanan ini menangkap fenomena tersebut dengan amat baik. Membacanya dapat menjadi bagian dari ikhtiar kita memahami zaman tempat kita hidup sekarang.”

—Eep Saefulloh Fatah
Founder & CEO PolMark Indonesia
dan Political Marketing Consulting

REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK

Praktik Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK

Praktik Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik

AHMAD MUKHLIS YUSUF



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK

Praktik Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik
oleh Ahmad Mukhlis Yusuf

GM 618203022

© Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Gedung Kompas Gramedia Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–37, Jakarta 10270

Perwajahan sampul: Suprianto
Perwajahan isi: Nur Wulan Dari

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
anggota IKAPI, Jakarta, 2018

www.gpu.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-602-03-8296-8

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

◆ DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	IX
KATA PENGANTAR	XIII
01 BELA BELI KULON PROGO: WUJUD SEMANGAT INDONESIA MANDIRI	3
02 “DUO EMAS” MAYJEN DONI MONARDO SUKSES MEWUJUDKAN MALUKU SEJAHTERA	10
03 FESTIVAL ANGGARAN BATANG: PRAKTIK INTEGRITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK	20
04 GERTAK: PROGRAM GOTONG ROYONG MENGURANGI KEMISKINAN TRENGGALEK	27
05 GOTONG ROYONG DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT: KUNCI SUKSES MEMBANGUN BOJONEGORO	31
06 “KERJA, KERJA, KERJA” MANTRA GERAKAN PERUBAHAN DAHLAN ISKAN	40

07	KOTA BANDUNG: PRAKTIK NYATA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	46
08	MEMBANGUN SDM INDONESIA YANG UNGGUL DENGAN LPDP	55
09	MEMBASMI TENGKULAK TAPANULI UTARA DENGAN PASAR LELANG	60
10	MENYULAP BANTAENG MENJADI KABUPATEN BENIH BERBASIS TEKNOLOGI	67
11	NTB DAN KESUKSESAN PEMBERDAYAAN BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN	77
12	PROGRAM PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU UNTUK PENDIDIKAN JAWA BARAT	88
13	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA RUANG PUBLIK KOTA BOGOR	95
14	SATRYA EMAS: PROGRAM KLINIK EKONOMI UNTUK UMKM PASURUAN	101
15	SPIRIT ETOS KERJA MEWUJUDKAN KEMAJUAN BANYUWANGI	109
16	SUKSES MEMBUKA DAERAH TERISOLASI DI PUNCAK, PAPUA	119
17	SULISTYO WIMBO: TOKOH PUNOKAWAN DALAM TRANSFORMASI PERUBAHAN PT KAI	128
18	TRANSFORMASI PERUBAHAN KOTA SURABAYA: POTRET INDONESIA MELAYANI	143
19	BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN): PELAYANAN BPN SEMAKIN MENDEKATI MASYARAKAT	155
20	BUSWAY: REVOLUSI PELAYANAN TRANSPORTASI IBU KOTA	159

21	COMMUTER LINE: BEST CHOICE FOR URBAN TRANSPORT	168
22	KA BANDARA SOEKARNO-HATTA: GOTONG ROYONG ANAK BANGSA	176
23	PT PELINDO II: KESUKSESAN MENGURAI BENANG KUSUT MASA LALU	181
24	REVOLUSI DISDUKCAPIL: PELAYANAN YANG LEBIH BAIK	184
25	REVOLUSI PELAYANAN PASPOR: KEBANGKITAN LAYANAN KANTOR IMIGRASI	191
26	SIM: TINGKATKAN PELAYANAN, MENJAMIN KEAMANAN	200
27	TRANSFORMASI PT KAI: BUAH KEPEMIMPINAN IGNASIUS JONAN	204
28	BUMN HADIR UNTUK NEGERI: SEMANGAT RINI SOEMARNO	212
29	QLUE: SOLUSI PENGADUAN MASYARAKAT DKI JAKARTA	222
30	40 INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK	229
31	BUMN REVOLUSI MENTAL AWARD 2018: APRESIASI TERHADAP PRAKTIK NILAI-NILAI STRATEGIS INSTRUMENTAL	232
	EPILOG	238
	REFERENSI	240
	TENTANG PENULIS	261

◆ KATA PENGANTAR

REVOLUSI MENTAL, PRAKTIK NYATA KEPEMIMPINAN TURUN TANGAN

Pada 5 Desember 2017 pagi, saya memilih transportasi *commuter line* dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Penggunaan moda transportasi ini telah saya jalani sejak lima tahun terakhir. Selain teruji dan terjamin dalam hal ketepatan waktu dibandingkan moda transportasi pribadi, khususnya pada jam-jam padat seperti pagi dan sore hari, *commuter line* juga turut mengurangi kepadatan kendaraan di jalanan Jakarta.

Setibanya di Stasiun Sudirman Jakarta, saya berjalan kaki menuju Stasiun BNI Sudirman—stasiun Rail Link, kereta api BNI Sudirman-Bandara Soekarno Hatta (Soetta)—dan kemudian bergabung dengan rombongan para pimpinan media dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk bersama-sama menuju Bandara Soetta.

Perjalanan kami lancar dan tepat waktu. Dengan waktu tempuh kurang dari satu jam, kami tiba di Terminal Rail Link di Bandara Soetta, kemudian dilanjutkan dengan berganti kereta bandara ke Terminal 3, tempat *gathering* pimpinan BUMN bersama Menteri BUMN, Rini Soemarno, Rhenald Kasali, sejumlah direksi BUMN, dan para undangan yang memadati lokasi acara di Terminal 3 Bandara Soetta. Mereka akan berbagi pengalaman mengenai transformasi BUMN dalam menjalankan layanan publik pada tiga tahun terakhir. Di depan terlihat Di-

rut PT Angkasa Pura 2, Muhammad Awaluddin, dan Dirut PT Waskita Karya, Muhammad Choliq.

Pelayanan publik adalah isu yang dipikirkan oleh para pimpinan kementerian dan lembaga (KL), BUMN, dan para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Isu pelayanan publik inilah yang kini mengisi kepala dan hati para pimpinan berbagai organisasi pelayanan publik, mereka diminta Presiden Joko Widodo beserta jajarannya untuk bergerak dan berubah agar negara lebih hadir bagi rakyatnya.

Indonesia tidak pernah kekurangan para pemimpin panutan, sejak sebelum Kemerdekaan hingga kini. Kepemimpinan bukan tentang bagaimana mereka piawai pidato atau merangkai kata untuk tampil gagah atau cantik di depan media, melainkan tentang hasil kerja nyata bagi para konstituen dan rakyat yang dilayaninya. Sebab, tindakan dan hasil karya kepemimpinan akan selalu terdengar lebih keras dari pada kata-kata, *actions and impact matter*.

Kepemimpinan yang baik adalah buah karya dari praktik integritas, amanah, kompetensi, dan tindakan, yang berpengaruh signifikan terhadap mereka yang dipimpinnya. Hal ini selaras dengan seruan Kepala Negara yang telah menetapkan agenda Revolusi Karakter Bangsa dalam Nawa Cita (2014). Kehendak kuat Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) juga dilengkapi dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016. Payung hukum telah kuat, negara menghendaki perubahan cara hidup dan cara kerja, baik pada aparatur sipil negara maupun masyarakat.

Revolusi Mental adalah gerakan membangun karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan gerakan hidup baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku manusia Indonesia dari berbagai kalangan, yang berorientasi pada kemajuan yang bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Di dalam buku *Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental* (GNRM) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan pada 2015, gerakan membangun karakter bangsa itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, modern, dan bermartabat, yang berlandaskan pada tiga nilai-nilai strategis instrumental. Nilai-nilai strategis instrumental itu adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Sebagai sebuah gerakan, Revolusi Mental melibatkan negara dan rakyat karena proses dan hasilnya akan memperkuat kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan mempererat persatuan bangsa. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (2015) yang menyatakan, “Untuk lebih memperkukuh kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan mempererat persatuan bangsa, kita perlu melakukan Revolusi Mental.”

Semangat perubahan melalui gerakan yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini juga pernah digelorakan oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, pada 1957. Presiden Soekarno mengatakan, “*Revolusi Mental adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.*”

REVOLUSI MENTAL: GERAKAN PERUBAHAN KARAKTER BANGSA

Sebagai sebuah gerakan perubahan, ranah Revolusi Mental adalah praktik keteladanan dari seluruh level kepemimpinan; mulai dari pemimpin keluarga, masyarakat, sekolah, organisasi kemasyarakatan, kepala daerah, para menteri, hingga Kepala Negara. Cara pandang, sikap dan perilaku Kepala Negara dan para pemimpin di bawahnya menjadi inspirasi perubahan karakter bagi bangsa ini.

Dalam konteks itu, penulis memahami mengapa pada tiga tahun pertama usia pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sangat jarang menyebut kata-kata Revolusi Mental, sebab gerakan ini adalah gerakan cara hidup, sikap, dan perilaku. Praktik nyata, ketimbang kata-kata.

Semua praktik integritas, etos kerja, dan gotong royong dilakukan pada ranah atau lingkaran pengaruh masing-masing penggiat perubahan, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat. Semua penggiatnya dapat disebut sebagai pemimpin perubahan berbasis nilai-nilai Revolusi Mental.

Sebagaimana praktik-praktik perubahan yang sering terjadi, tiga karakter perubahan yang dapat dilihat pada buku ini adalah komitmen peningkatan, keberlanjutan, dan pembaruan atau inovasi pelayanan publik.

Sebagai contoh, transformasi PT KAI dirintis oleh Ignasius Jonan sebagai Direktur Utama, sebelum pimpinan PT KAI yang sekarang, peningkatan layanan dan inovasi terus dilakukan selama 10 tahun terakhir. Banyak inovasi-inovasi layanan publik yang baru pada lima tahun terakhir yang amat signifikan. Tak heran PT KAI terpilih sebagai BUMN dengan layanan terbaik pada ajang BUMN Revolusi Mental Award 2018.

Demikian juga dengan pelayanan publik lainnya. Percepatan pembangunan jalan tol yang dilakukan yang melibatkan konsorsium BUMN Karya adalah keberlanjutan dari pembangunan sejumlah jalan tol yang pembangunannya mandek akibat Krisis Moneter pada 1997. Penyelesaian jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) adalah salah satu kelanjutan dari pembangunan jalan tol yang telah dimulai pada tahun 1990-an. Praktik ini adalah salah satu contoh peningkatan dan keberlanjutan.

Keberlanjutan pembangunan sejumlah sarana publik seperti jalan tol, pelabuhan, jalan Trans Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan infrastruktur lainnya kini menemukan momentum yang tepat atas dukungan kuat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, melanjutkan rintisan para presiden sebelumnya yang peduli pada pemerataan infrastruktur di berbagai daerah. Revolusi Mental dalam pelayanan publik dan politik anggaran adalah praktis nyata kehendak negara, bukan kata-kata dan pidato belaka.

Revolusi pelayanan moda Transjakarta juga demikian. Kegigihan Gubernur DKI kala pembangunan koridor Transjakarta pada era Gubernur Sutiyoso dilanjutkan oleh komitmen dan disiplin para penggantinya, yaitu Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan kini tongkat estafet diteruskan oleh Anies Baswedan.

Keberlanjutan, peningkatan, dan inovasi layanan publik—tiga kata penting dalam transformasi pelayanan publik ini tak ada pelaku tunggal, melainkan bersama-sama dilaksanakan secara berkelanjutan dengan komitmen atas nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong, tiga nilai-nilai strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Buku ini berisi tentang rangkuman praktik perubahan yang dilakukan oleh para pemimpin perubahan pada berbagai ranah kepemimpinan publik. Juga merangkum tentang apa dan bagaimana pelayanan publik dilakukan secara sungguh-sungguh. Selain itu, diharapkan muncul berbagai tulisan atau karya yang lebih kaya sehingga pelayanan publik dapat menjadi gerakan perubahan yang mengubah bangsa ini sesuai dengan cita-cita Proklamasi.

Penulisan buku ini diharapkan pula dapat dilanjutkan dengan serial praktik berbagai revolusi pelayanan lainnya, baik pada pelayanan publik lainnya maupun pada sektor pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Dengan membaca buku ini, kita akan semakin optimis dengan berbagai praktik pelayanan publik yang dimotori oleh para pemimpin perubahan.

Para pemimpin perubahan itu antara lain Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Doni Monardo (Pangdam XVI/Pattimura, sekarang Pangdam III/Siliwangi), Suyoto (Bupati Bojonegoro), Dahlan Iskan (Menteri BUMN era Presiden SBY), Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang periode 2012–2017), Willem Wandik (Bupati Puncak, Papua), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Emil Dardak (Bupati Trenggalek), Muhammad Zainul Majdi (Gubernur NTB), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nikson Nababan (Bupati Tapanuli Utara), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Irsyad Yusuf (Bupati Pasuruan), Hasto Wardoyo (Bupati Kulon Progo),

Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Rini Soemarno (Menteri BUMN), dan Bima Arya (Wali Kota Bogor).

Berbagai pelayanan publik yang membaik juga semakin terasa pada pelayanan moda transportasi kereta api, pelayanan imigrasi, pelayanan pertanahan, manajemen *dwelling time* di pelabuhan laut, media pengaduan masyarakat Jakarta berbasis aplikasi Qlue, pelayanan SIM dan KTP, pelayanan kependudukan di berbagai daerah, serta diiringi juga dengan BUMN yang hadir berkontribusi membangun Indonesia.

Harus diakui, etos pelayanan itu belum sepenuhnya terjadi pada semua sektor publik dan daerah seluruh Indonesia, namun api pelayanan semakin menyala-nyala pada berbagai institusi Negara dan sentra-sentra pelayanan publik pada K/L, BUMN, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan BUMD.

Kepemimpinan yang efektif, nyata, dan melayani inilah yang saya sebut sebagai “kepemimpinan turun tangan” atau *hands-on leadership*.

KEPEMIMPINAN TURUN TANGAN PADA ERA INDONESIA 4.0

Dalam catatan penulis terhadap semua pemimpin perubahan pada buku ini, setidaknya Kepemimpinan Turun Tangan ini memiliki tujuh unsur, yakni:

Pertama: Praktik visi, misi dan nilai-nilai yang kuat. *On mission.*

Kedua: Menurunkannya ke dalam strategi pemerintahan atau organisasi yang dipimpinnya, dan bahkan sebagian di antaranya mampu menurunkannya pada hal yang operasional. *On Strategy.*

Ketiga: Menyelaraskan strategi tersebut secara vertikal dan horizontal, semua jajaran dan timnya terlibat dalam gerakan yang selaras yang dipimpin oleh pemimpin perubahan pada pucuk tertinggi organisasi. *On Alignment.*

Keempat: Menerjemahkannya ke dalam perencanaan yang terukur, dari perencanaan strategis hingga operasional. *On Operational Planned.*

Kelima: Memiliki prioritas dan fokus. Unsur kelima ini menjadi agenda utama kepemimpinan dan manajerial yang dijalankannya. Tak terkecuali, sang pemimpin bisa memimpin sendiri prioritas itu. Betapa pentingnya prioritas itu, sang pemimpin tak segan-segan berada di lapangan untuk memastikan keputusan strategis dapat dijalankan secara operasional. *On Priority.*

Keenam: Menjalankan praktik kepemimpinan turun tangan (*hands-on leadership*), secara reguler dan spontan melakukan peran manajerial yang memastikan proses manajemen dijalankan secara terukur. Ke depan, dengan dukungan teknologi informasi pada era Indonesia 4.0, pemimpin model ini bersemangat melakukan komunikasi dan akan tetap tersambung dengan tim yang dipimpinnya. *On Hands-on Mangement.*

Ketujuh: Menjalankan pemantauan strategis dan selalu aktif menyempurnakan strategi yang terbaik bagi organisasi dan konstituen yang dilayaninya untuk memastikan kepemimpinan yang berdampak bagi pelanggan atau konstituen yang dilayaninya. *On Strategic Improvement.*

Penulis sedang melanjutkan penerbitan buku ini dengan buku selanjutnya yang berisi bagaimana **Kepemimpinan Turun Tangan** ini diharapkan dapat menjadi model kepemimpinan untuk membawa Indonesia lebih unggul pada era ekonomi 4.0. Pemimpin perubahan yang dengan teknologi tetap bisa hadir, tak terkecuali dengan dukungan tim yang kuat dan teknologi informasi, sehingga sang pemimpin tetap tersambung dengan tim dan konstituennya.

Kepemimpinan Turun Tangan adalah kepemimpinan yang menggerakkan dan berdampak nyata berdasarkan visi, misi, nilai-nilai, strategi, dan prioritas yang jelas dan mampu mempratikkan kepemimpinan yang menghasilkan perubahan yang signifikan pada pelanggan atau konstituen yang dilayaninya, bukan sebatas indah dalam kata-kata dan program perencanaan semata.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para anggota Kelompok Kerja Revolusi Mental Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, tim asistensi

penulisan buku ini, yakni Andi Irawan, Abdul Rohim, Muhammad Rijal, Rafi Rahmad, dan Sabiqun, beserta keluarga besar Strategic Action, *Consulting and Coaching Institute*.

Semoga gelombang pelayanan kepada pelanggan atau konstituen semakin besar di negeri ini, seperti janji Proklamasi para pendiri bangsa ini kepada rakyatnya. Dengan melakukan kerja nyata itu, kita akan melunasi janji Kemerdekaan tersebut bersama-sama. Amin.

Dirgahayu Republik Indonesia.

Bogor, 17 Agustus 2018

Ahmad Mukhlis Yusuf

Twitter & Instagram: @mukhlisyusuf

#TemanPerubahan

.....

PARA PEMIMPIN PERUBAHAN

.....

◆ 01

BELA BELI KULON PROGO: WUJUD SEMANGAT INDONESIA MANDIRI

"Dengan semangat 'Bela Beli Kulon Progo', masyarakat Kulon Progo sekarang sudah memiliki air kemasan sendiri yang bermerek 'AirKu'. Selain itu, Kulon Progo juga berhasil mengangkat batik khas daerah yang mampu mendorong perekonomian pelaku UKM di sana. Bupati Hasto juga berhasil membangun jaringan ritel modern 'Tomira' (Toko Milik Rakyat) untuk memasarkan produk-produk masyarakat di sana. Tidak hanya itu, Hasto berhasil membangun rumah sakit daerah tanpa kelas yang memungkinkan warga miskin bisa leluasa mengakses layanan kesehatan."

—marketeers.com

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota yang terletak paling barat di Provinsi D.I. Yogyakarta. Kulon Progo bukanlah daerah yang istimewa, juga bukan daerah yang menjadi sorotan media. Kulon Progo juga bukan kota besar seperti Bandung dan Surabaya, apalagi Jakarta yang tergolong kota maju dengan pendapatan daerah yang sangat besar. Bahkan, Kulon Progo kerap sekali dilabeli sebagai kabupaten miskin. Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo dua periode (2011–2022) mengakui hal itu seperti ungkapannya dalam situs

Marketers. “Kami sebagai kabupaten miskin jelas tidak bisa membuat produk teknologi. Kami tidak bisa membuat *handphone*, sepeda motor, bahkan jarum suntik pun tidak bisa. Sebab itu, kami berinovasi dengan apa yang ada dan dengan bekal ideologi untuk kemandirian ekonomi,” kata Hasto kepada Marketeers.

Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai gebrakan dan inovasi program pengentasan kemiskinan Pemkab Kulon Progo, akhirnya angka kemiskinan di Kulon Progo berhasil ditekan dan berkurang. Hasto Wardoyo menggulirkan berbagai program sebagai solusi. Hasilnya sangat mencengangkan. Angka kemiskinan turun drastis dan masyarakat semakin sejahtera dan mandiri.

Data menurut Kepala Bappeda Kulon Progo, Ir. Agus Langgeng Baski, jumlah persentase KK miskin tahun 2014 adalah 16,74% (angka sementara BPS 19,02%), yang terdiri dari KK berstatus sangat miskin 4,12% dan miskin 12,62%. Sedangkan tahun 2011 dan 2013 sebesar 24,8% dan 22,54%. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2013, terjadi penurunan yang signifikan.

TEROBOSAN PELAYANAN PUBLIK

Pemkab Kulon Progo ternyata menyimpan sejumlah terobosan inovatif untuk membangun daerahnya. Sejak dilantik, Bupati Hasto yang juga berprofesi sebagai dokter ini terus meluncurkan aksinya mengentaskan kemiskinan di Kulon Progo. Inisiatif “Bela dan Beli Kulon Progo” merupakan semboyan untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri ketimbang produk dari luar Kulon Progo.

Semangat ikrar gerakan Bela Beli Kulon Progo pada awalnya adalah merebut pasar di negeri sendiri. Program ini merupakan gerakan untuk membeli produk-produk lokal hasil produksi masyarakat dan BUMD Kulon Progo. Hasto menyadari bahwa masih banyak warga Ku-

lon Progo yang kesejahteraannya kurang dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga menggalakkan semangat membeli produk lokal masyarakat Kulon Progo adalah cara tepat meningkatkan geliat ekonomi masyarakat Kulon Progo, yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan masyarakat terhadap produk lokal diharapkan mampu menghadapi persaingan Asean Free Trade Area (AFTA) pada 2015. Bupati menerangkan bahwa ideologinya adalah beli dan bela produk sendiri. “Kalau kita bisa beli produk sendiri, baru kita bisa menang melawan AFTA,” katanya.

Sementara itu, untuk menyukseskan Bela dan Beli Kulon Progo, Pemkab Kulon Progo membuat inovasi berupa *One Village One Sister Company*, yaitu kerja sama antara desa dengan perusahaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program *One Village One Sister Company* ini menggandeng 17 perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD menjadi orangtua asuh dari desa-desa di Kulon Progo.

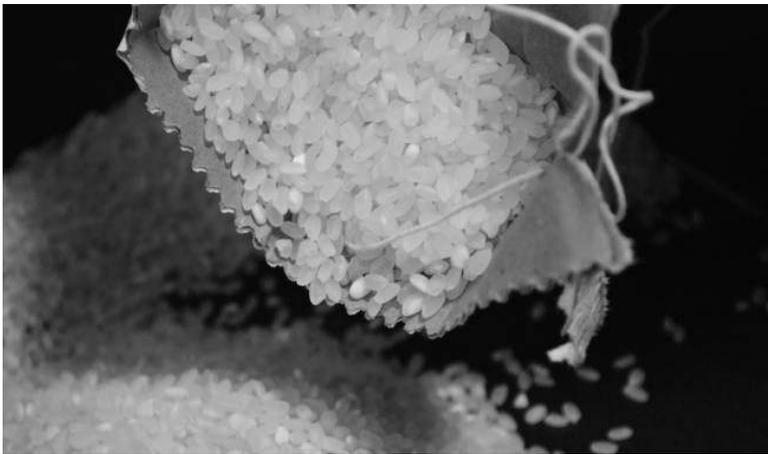
Perusahaan yang menjadi orangtua asuh diharapkan dapat membina desa-desa yang menjadi asuhannya sehingga kesejahteraan di desa itu meningkat dan keluar dari angka kemiskinan. Program ini pertama kali diresmikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pada November 2012 di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap.

Di samping itu, sumber daya alam di Kulon Progo melimpah. Demikian pula dengan sektor pertanian dan perkebunan, baik yang ada di wilayah selatan (pesisir) maupun bagian utara di Pegunungan Menoreh. Namun dari sisi tenaga kerja, masih banyak warga Kulon Progo yang mencari penghidupan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.



Program *One Village One Sister Company* merupakan program kerja sama antara desa dengan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada pertengahan 2013, Pemkab Kulon Progo akhirnya menjalankan program Bela Beli Kulon Progo di bidang pertanian. Pemkab memfasilitasi pembentukan gapoktan (gabungan kelompok tani). Mereka juga mengikuti berbagai pelatihan. Petani diajak untuk tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk gabah, tetapi juga memproses dan mengemasnya menjadi beras. Mereka juga difasilitasi dengan mesin giling, bantuan permodalan, serta pelatihan manajemen atau pengelolaan.



- *Ilustrasi beras. Hasto Wardoyo selaku bupati Kulon Progo mewajibkan PNS di lingkungannya untuk membeli beras dari petani. (Sumber: www.viva.co.id)*

Setelah itu, saat beras berada di pasaran dan bisa terserap, Hasto sebagai bupati mewajibkan PNS di lingkungan Pemkab Kulon Progo membeli beras dari petani. Sebanyak 8 ribu PNS di Kulon Progo minimal membeli 10 kg setiap bulan. Bersamaan dengan program tersebut, Pemkab Kulon Progo juga berhasil menjalin kerja sama dengan Bulog. Pemkab meminta Bulog agar membeli beras untuk raskin dari petani setempat atau gapoktan. Sebanyak 7 dari 12 gapoktan telah menjalin kerja sama dengan Bulog untuk memasok raskin. Pada 2014 Kulon Progo memasok beras sebanyak 1.900 ton dan 2015 sudah lebih dari jumlah tersebut.

Program Beras Daerah atau RASDA ini menurut Hasto sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan mendapat respons positif. Sementara-

ra dari sisi petani, pendapatan juga meningkat. Beras produksi gapoktan dengan kemasan yang bagus juga sudah dijual di *minimarket-minimarket* di Kulon Progo. Dia menambahkan bahwa Kulon Progo juga memiliki beras varietas lokal unggul. Beras itu bernama Melati Menoreh (Menor), yang diluncurkan penanaman perdananya pada September 2013. Menor merupakan jenis padi premium yang diluncurkan Pemkab Kulon Progo sebagai beras unggulan, sebagai produk khas Kulon Progo. Saat ini beras jenis ini masih dalam proses pemurnian bibit di Dinas Pertanian.

Produk lokal Kulon Progo lainnya yang saat ini terus didukung dan didorong adalah air minum kemasan lokal. Di Kulon Progo ada sumber mata air yang melimpah di daerah Clereng, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih. Sebelumnya, air dari Clereng hanya digunakan untuk pelanggan PDAM, belum untuk masyarakat keseluruhan.



► Kemasan produk air mineral "AirKU". (Sumber: jogja.tribunnews.com)

Pemkab Kulon Progo juga mendorong PDAM membuat inovasi dengan memproduksi air minum dalam kemasan (AMK) bermerek Air-KU. Nama AirKU itu berarti air Kulon Progo, yang diambil dari mata air Clereng.

Hampir setiap hari ada puluhan ribu warga masyarakat Kulon Progo yang mengonsumsi air minum kemasan produk luar. Ada sekitar 4,8

juta air minum kemasan gelas yang dikonsumsi warga setiap bulan, mulai dari hajatan di desa sampai acara di lingkungan Pemkab dan acara lainnya. Berdasarkan hal itu, memiliki produk air dalam kemasan sendiri sangatlah prospek.

Selama ini keuntungan dari air minum kemasan itu banyak lari keluar Kulon Progo, padahal Kulon Progo memiliki sumber daya air yang bagus dan masih murni. Dari situlah muncul program membuat air kemasan sendiri.

AirKu kini menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulon Progo. Anto, staf setempat, menuturkan bahwa kini jumlah permintaan lebih besar dari produksi. Karena itu, volume produksi AirKu akan segera ditingkatkan. Berbagai kebijakan lewat program Bela dan Beli ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo, dari 22,54% pada 2013 menjadi 16,74% pada 2014 (data Bappeda). Hasto mengakui selama lebih kurang 3 tahun program Bela Beli Kulon Progo ini dijalankan, berbagai keberhasilan telah diraih. Salah satunya adalah tingkat inflasi menjadi rendah. Roda perekonomian rakyat terus bergerak dan berjalan sehingga kesejahteraan rakyat juga mulai terasa hasilnya.

Selain itu, Hasto Wardoyo juga berkomitmen menyejahterakan rakyatnya dengan kekuatan sendiri. Dia menolak iklan rokok. Sebaliknya, 8.000 PNS dan 80.000 pelajar di Kulon Progo diwajibkan memakai seragam batik Geblek Renteng, batik khas Kulon Progo, pada hari tertentu. Dengan kebijakan tersebut, sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dari yang awalnya hanya 2 sentra, kini menjadi sekitar 50 sentra.

Bayangkan jika 1 baju batik harganya Rp50.000 dengan pembeli sebanyak 88.000 orang, total dari transaksi membeli baju batik adalah Rp 4,4 miliar. Angka itu cukup menghidupi 1.000 orang. Setiap tahun tentu ada pembelian ulang atau *repeat order*, baik untuk siswa baru maupun sebagai pengganti baju yang sudah usang atau kekecilan. Jika ditambah dengan sepatu seragam atau dinas seharga Rp100.000, total

transaksi menjadi senilai Rp 8,8 miliar, dan angka itu bisa menghidupi 2.000 orang.

Adapun di sektor kesehatan, Pemkab Kulon Progo juga memberlakukan *Universal Coverage* dalam pelayanan kesehatan, yang mana Pemkab Kulon Progo menanggung biaya kesehatan warganya senilai Rp 5 juta/orang. RSUD Wates Kulon Progo memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika Kelas 3 penuh, pasien miskin bisa dirawat di Kelas 2, Kelas 1, bahkan VIP. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat Kulon Progo akan lebih terjamin dalam pelayanan kesehatan. Sungguh luar biasa. Semoga semua semangat transformasi perubahan ini juga dimiliki oleh para pemimpin daerah lainnya.



◆ 02

“DUO EMAS” MAYJEN DONI MONARDO SUKSES MEWUJUDKAN MALUKU SEJAHTERA

Maluku merupakan daerah yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang begitu besar. Sejak dahulu Maluku dikenal di mata dunia sebagai daerah kaya potensi perikanan dan biota laut. Provinsi ini juga dijuluki sebagai “Seribu Pulau” karena geografisnya yang terdiri dari 1.340 pulau. Selain itu, Maluku juga dikenal sebagai pulau rempah-rempah, terutama untuk produksi cengkih dan pala yang telah dianggap prestisius dalam perdagangan internasional.

Namun, potensi besar kekayaan alam tersebut menjadi terkesan buruk karena masalah konflik. Iya, Maluku pada saat itu memang dikenal sebagai daerah konflik. Konflik demi konflik terus terjadi. Konflik kemanusiaan yang menelan banyak korban mulai terjadi sejak 1999. Hasil survei LSI pada 2012 menyebutkan bahwa konflik kemanusiaan pada 1999–2002 menelan korban jiwa antara 8.000–9.000 orang. Sebanyak 700.000 warga mengungsi. Kerugian materi berupa 29.000 rumah terbakar, 7.046 rumah rusak, puluhan masjid, gereja, gedung pemerintah, bank, serta ratusan toko hancur. Tentu konflik ini terjadi bukan tanpa

sebab atau terjadi begitu saja, tapi karena adanya ruang kosong yang kurang mendapat perhatian dari pemerintahlah sebagai penyebab utama. Konflik kemanusiaan mengakibatkan tercerai-berainya nilai kekeluargaan, timbulnya sikap saling curiga, dan akhirnya sampai ribuan orang ditahan.

Dampaknya adalah semua potensi sumber kekayaan alam yang melimpah ruah belum diperhatikan dan tidak dimaksimalkan oleh masyarakat Maluku sehingga potensi tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat masih bergelut dalam konflik yang tidak berkesudahan. Konflik tersebut sudah banyak menghilangkan harapan untuk bisa hidup sejahtera dan saling bergandengan tangan membangun Maluku.

Waktu demi waktu dan perjuangan demi perjuangan sudah banyak dicurahkan untuk mengurai benang kusut masalah konflik ini, berharap Maluku bisa kondusif dan hidup rukun sejahtera. Akhirnya, hidup rukun dan sejahtera mulai terwujud. Tak hanya sampai di situ, masyarakat juga merasakan kenikmatan hidup sejahtera dengan memanfaatkan berbagai potensi alam. Hidup sejahtera dengan pendapatan yang “wah” dan rukun menjadi suasana yang melekat saat ini. Wajah Maluku berubah total menjadi daerah yang indah dan bahagia. Bahkan BPS mencatatkan Maluku Utara dan Maluku menjadi provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan paling tinggi di Indonesia. Sungguh luar biasa Maluku saat ini!

Transformasi perubahan Maluku Utara dan Maluku saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dan jerih payah Mayjen TNI Doni Monardo yang menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVI/Pattimura pada saat itu. Kesuksesan Mayjen Doni dalam menyelesaikan konflik yang mengakar di Maluku dilakukan dengan cara yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Kendati berlatar belakang tentara, Mayjen Doni tak lantas menggunakan cara-cara ala tentara dan senjata. Ia lebih memilih menyelesaikan konflik melalui pendekatan damai dengan pemberdayaan masyarakat (*empowerment approach*).

Pola pendekatan damai yang terbukti sukses meredam setiap konflik di Indonesia ini memang merupakan gaya baru yang mesti terus dilakukan. Hal ini disadari betul oleh Doni Monardo, Jenderal berbintang dua yang menjabat Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVI/Pattimura pada saat itu.

Secara kapasitas struktural, hal ini merupakan lompatan kewenangan dari sebuah tugas yang mestinya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin militer. Ini merupakan ranah dari aparat sipil birokrasi. Namun, secara fungsional, Jenderal Doni seakan ingin menunjukkan wajah reformasi TNI yang sebenarnya. Wajah reformasi yang *friendly* dan familier dengan masyarakat, tidak terlihat kaku dan mekanis, namun tetap tegas dan berwibawa.

Sudut pandang Mayjen Doni dalam melihat konflik yang selama ini terjadi di Maluku sangat berbeda dengan yang lain. Menurutnya, konflik tidak pernah terjadi tanpa alasan atau muncul begitu saja. Konflik terjadi karena memang ada sebab dan pemicu yang melatarinya. Mungkin yang terlihat pada setiap konflik horizontal di Maluku pada saat itu lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya sepele. Namun jika dilihat ke dalam, benturan di masyarakat sering terjadi karena ada faktor kesejahteraan di baliknya.

MAMALA DAN MORELA AKHIRNYA BERSAUDARA

Salah satu wilayah yang menjadi bukti keberhasilan Mayjen Doni dalam menciptakan kondisi Maluku yang kondusif dan aman adalah Negeri Mamala dan Morela. Kedua negeri (sebutan orang Maluku yang berarti desa) yang berada di pesisir Leihitu ini pada 2014–2015 kembali mendapat sorotan media lantaran konflik dan perseteruan yang mentradisi dan kian memanas. Perkelahian warga ini konon telah berlangsung lama dan memakan korban jiwa serta kerugian material. Perdamaian demi perdamaian terus diupayakan lewat berbagai cara dan mediasi.

Bertepatan dengan suasana itu, pada hari ke-7 setelah menjabat sebagai Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen Doni melakukan kunjungan kerja ke berbagai kesatuan dan daerah. Dalam sejumlah pertemuan dengan para elemen masyarakat, muncul sejumlah permintaan kepada Mayjen Doni untuk bisa menjadi mediator dan fasilitator dalam rangka mempertemukan pihak-pihak yang selama beberapa tahun terlibat konflik berkepanjangan, guna menciptakan perdamaian dan kerukunan antarnegeri.

Inisiasi yang muncul dari Mayjen Doni adalah melaksanakan program pemberdayaan yang melibatkan kedua negeri yang bertikai tersebut (Mamala dan Morela). Pemberdayaan itu dilakukan dalam bentuk pelatihan dan bantuan langsung ke masyarakat. Hal pertama yang dilakukan adalah pelatihan di Yonif 733 Masariku Waiheru, dengan materi budi daya kelautan dan perkebunan. Dalam program ini, sejumlah perwakilan dari desa-desa yang terlibat konflik dilibatkan guna memupuk rasa kebersamaan dan saling memiliki. Para perwakilan dari desa-desa tersebut diatur supaya bisa tidur berdampingan di dalam barak-barak pelatihan.

Selain dengan program pemberdayaan, Mayjen Doni juga mendaamkan daerah konflik dengan meningkatkan kegiatan silaturahmi. Pendekatan ini lebih bersifat kekeluargaan dan mengedepankan kearifan lokal serta nilai-nilai kemanusiaan dan tali persaudaraan antarsesama. Masing-masing negeri diajak bersilaturahmi dengan masyarakat negeri lain yang terlibat konflik. Harapannya, ada komunikasi dan interaksi antarsesama masyarakat negeri agar tidak saling curiga dan memusuhi.

Akhirnya, dengan suksesnya program pemberdayaan dan peningkatan silaturahmi, kondisi Negeri Mamala dan Morela menjadi kondusif dan damai. Perseteruan berakhir dengan disepakatinya perjanjian damai antardua negeri yang berkonflik tersebut, yang ditandatangani pada 23 April 2016 di Dermaga Kayu Tapal Kuda. Proses perdamaian yang

diprakarsai oleh Mayjen Doni Monardo, Pangdam XVI/Pattimura, itu tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Sebuah pendekatan teritorial yang cukup berhasil dan mengundang kepercayaan masyarakat kepada TNI.



► *Proses penyerahan senjata oleh masyarakat Desa Mamala dan Morela. (Sumber: newsdetik.com)*

Capaian gemilang Mayjen Doni dalam menjalin kerukunan dan kedamaian alami di Maluku dan Maluku Utara pada dasarnya ditopang oleh tiga hal yang mendasar. Pertama adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap tentara. Berbagai program sudah diterapkan untuk kalangan sendiri (militer), yaitu program 4S (senyum, sapa, salam, silaturahmi). Kedua, membangun kemitraan yang setara sesama aparat pemerintah dan lembaga sosial, pemuda, dan keagamaan sekaligus merangkul semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM, dan akademisi dalam berbagai kegiatan kemanusiaan sehingga memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam keberagaman. Ketiga adalah membantu pemerintah dalam upaya mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya dengan program emas hijau, emas biru, dan emas putih.

“DUO EMAS” PERDAMAIAN DARI MAYJEN DONI MONARDO UNTUK MALUKU

Mayjen TNI Doni Monardo begitu terkesima dengan keindahan dan potensi wilayah Maluku yang menyimpan kekayaan alam di darat dan di laut yang begitu besar. Sejak dahulu, Maluku sudah terkenal dengan cengkih dan pala yang menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa. Selain itu, kekayaan di laut pun tidak kalah potensial. Laut Banda pernah dieksploitasi oleh nelayan tuna Jepang (Banda Sea Agreement) dan sampai saat ini menjadi daerah *breeding, nursery, feeding, dan fishing ground*-nya *yellowfin Tuna*.

Untuk sektor kelautan dan perikanan, secara nasional Provinsi Maluku memiliki peran penting dan strategis. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan potensi perikanan tangkap Indonesia sebesar 27% (3,5 juta ton) berada pada wilayah perairan Provinsi Maluku. Potensi perikanan tangkap nasional sesuai data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 mencapai 12,5 juta ton. Di perairan laut Maluku juga terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sangat potensial, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Arafura.



- ▶ *Cengkih dan pala merupakan contoh rempah unggulan dari Maluku. (Sumber: onehundreddollarsamonth.com)*

Di sisi lain, pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan masih memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru di Maluku. Ada 2 pulau besar, yakni Pulau Seram dan Buru yang memiliki lahan pertanian yang potensial, selain pulau-pulau lainnya. Kekayaan alam yang begitu besar harus diimbangi pengelolaannya dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat Maluku yang variatif.

Tanpa menunggu lama, setelah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan dengan melihat potensi sumber daya alam yang begitu besar, Mayjen Doni kemudian membuat program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Dua program pemberdayaan kemudian diluncurkan, yaitu Emas Biru dan Emas Hijau. Program Emas Biru meliputi kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, dan program Emas Hijau meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

Pada 10–21 September 2015 diselenggarakan pelatihan budi daya kelautan pertanian dan kehutanan yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, yang diikuti oleh 100 orang peserta dari masyarakat, pemuda, TNI, dan Polri. Kemudian pada 20 Oktober–4 November 2015 diselenggarakan pelatihan tahap kedua yang bekerja sama dengan Jamkrindo yang diikuti 150 orang peserta perwakilan masyarakat dari Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan program Emas Biru dan Emas Hijau terus digalakkan sebagai awal dan juga salah satu bentuk kontribusi TNI via Kodam XVI Pattimura untuk membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat, guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja yang nantinya akan berefek pada meningkatnya tingkat kesejahteraan.

Dengan terwujudnya kesejahteraan, nantinya ini juga akan berbanding lurus dengan keamanan wilayah. Seperti pepatah, “Jika lapar, seseorang akan menjadi marah (*Hungry Man Become Angry Man*)”. Jika ini bisa diminimalisasi, kesenjangan sosial antarwilayah juga dapat

diatasi serta akan berdampak positif bagi kerukunan, keamanan, dan kedamaian Maluku ke depan. Sejak program ini digulirkan, sudah banyak pejabat negara yang berkunjung ke Ambon dan melihat areal pengembangan program Emas Biru dan Emas Hijau, di antaranya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Rini Soemarno (Menteri BUMN), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dan beberapa menteri lainnya.



► *Dirut BRI Asmawi Syam dan Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo saat meninjau lokasi pelatihan budi daya ikan laut di Ambon, Maluku. republika.co.id*

Selain itu, juga digalakkan akselerasi antara kegiatan serbuan teritorial TNI yang bersinergi dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengaplikasikan kegiatan program pemberdayaan nyata di lapangan. Serbuan teritorial merupakan upaya pembinaan teritorial dengan mengadakan kegiatan yang benar-benar dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara massif, dan melibatkan banyak prajurit TNI di seluruh pelosok NKRI yang kemudian dikolaborasi dengan program-program internal TNI dan pemerintah di berbagai bidang, seperti ketahanan pangan, penghijauan, kesehatan, dan lain-lain.

Jika hal ini dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, pastinya Maluku akan keluar dari zona kemiskinan yang mendera, yang sampai saat ini masih berada pada urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia. Banyak pihak yang terus memberikan apresiasi positif terhadap implementasi program tersebut. Selain dengan BRI dan Jamkrindo, BNI, Pertamina, Telkomsel, dan perseroan terbatas lainnya yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN juga mendukung dan turut membantu program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kodam XVI Pattimura.

Program “duo emas” ini sudah banyak wujud dan hasilnya hingga saat ini. Untuk program Emas Biru di antaranya adalah pemasangan keramba jaring apung yang sudah berjalan di berbagai tempat. Di sekitar Pulau Ambon dan Seram terdapat sekitar 160 petak keramba serta ada juga keramba tancap dan juga keramba teluk di Pulau Lifmatola, Kepulauan Sanana. Benih yang sudah disalurkan sebanyak 58.980 ekor dari berbagai jenis ikan kerapu, ikan kakap, dan ikan bubara.

Untuk program Emas Hijau, dilaksanakan pembibitan berbagai jenis pohon, di antaranya Pohon Keras sebanyak 13.404, buah-buahan 19.491, dan rempah-rempah 14.669. Selain itu, untuk peternakan ada 750 ekor kambing.

Melalui implementasi program “duo emas” Pattimura ini, masyarakat semakin diberdayakan. Dampak yang dihasilkan adalah perdamaian atau biasa disebut dengan Emas Putih. Jika masyarakat telah terjamin kualitas hidupnya—yang terlihat dari meningkatnya pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, terpenuhinya tingkat pendidikan, dan penghidupan yang layak—pastinya akan meminimalisasi terjadinya konflik di masyarakat, yang terjadi akibat kesenjangan dan kecemburuan sosial antarnegeri dan wilayah, serta merupakan upaya menciptakan kerukunan, keamanan, dan perdamaian.

Selain itu semua, Mayjen Doni mempunyai agenda-agenda perdamaian dan persaudaraan selama menjabat sebagai Pangdam XVI Pattimura. Di antaranya adalah mengirimkan kelompok-kelompok masya-

rakat Mamala-Morela yang beragama Islam beribadah di Mekkah dan masyarakat Tobelo yang beragama Kristen beribadah ke Yerusalem. Pendeta John Ruhlessin (Mantan Ketua Gereja Protestan Maluku) saat memberikan sambutan ketika pelepasan peserta umrah masyarakat Mamala-Morela dan masyarakat Tobelo, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Mayjen Doni Monardo ini adalah “emas putih”.



“
PROFIL TOKOH

Nama:

Doni Monardo

TTL:

Cimahi,

10 Mei 1963

Jabatan:

*Pangdam XVI/Pattimura
(Sekarang Pangdam III/
Siliwangi, 2017–sekarang)*

“

◆ 03

FESTIVAL ANGGARAN BATANG: PRAKTIK INTEGRITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK

Kalau mendengar kata “Festival Anggaran”, pasti Anda akan langsung tebersit pada kepala daerah yang satu ini, yaitu Mayor Arh. (Purn.) H. Yoyok Riyo Sudibyo atau yang akrab disapa Yoyok. Kalau tidak, ketika kita mencari dengan kata kunci festival anggaran di Google, pasti akan banyak bermunculan satu daerah yang menerapkannya pertama kali, yaitu Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Kabupaten Batang bisa dikatakan telah bertransformasi. Dari salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah, kini Batang jadi pusat belajar tata kelola anggaran di Indonesia. Pada 2012 silam, Batang masuk daftar 15 kabupaten termiskin di Jawa Tengah.

Namun kini, kebalikannya, Batang malah menjadi pusat belajar pengelolaan anggaran. Bupati Batang (periode 2012–2017), Yoyok Riyo Sudibyo, mengatakan hampir setiap hari Batang kedatangan tamu dari pemerintah daerah lain, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Mereka semua datang dengan tujuan yang sama, yakni belajar tata kelola dan transparansi anggaran dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan, kini Batang menjadi sekolah transparansi anggaran.

Prestasi Kabupaten Batang di bidang transparansi dan pemerintahan masih terus melekat dan dikenang di benak masyarakat Batang, walau saat ini Bupati Yoyok sudah tidak menjabat sebagai Bupati Batang. Kabupaten Batang berhasil menerapkan transparansi dan pemerintahan yang bersih, sekaligus mengantarkan Bupati Yoyok memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015.

Di samping itu, Kabupaten Batang juga sukses meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada 2012, PAD Batang hanya Rp 67 miliar, tapi dua tahun kemudian, PAD Batang naik menjadi Rp 186 miliar. Hal ini juga menjadi bukti keberhasilan inovasi di bidang *good governance* yang digalakkan di Kabupaten Batang.

Kabupaten Batang memang dikenal dengan terobosan di bidang transparansi dan pemerintahan. Bahkan, dalam pemilihan kepala desa di Batang diterapkan pemilihan kepala desa tanpa *money politic*.

Lantas apa saja terobosan dan gebrakan yang sudah banyak dilakukan di Batang? Berikut adalah uraiannya:

FESTIVAL ANGGARAN

Berawal dari semangat mewujudkan transparansi anggaran Pemkab Batang saat itu, lahirlah salah satu terobosan yang kemudian mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan menghasilkan berbagai macam penghargaan. Terobosan itu adalah “Festival Anggaran”, terobosan pertama yang ada di Indonesia. Program yang diinisiasi oleh Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo itu bertujuan membuka ak-



Transparansi harus menjadi tradisi di birokrasi dan masyarakat. Hanya dengan transparansi masyarakat bisa memahami apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya.

Inovasi tanpa transparansi sama seperti mendirikan gedung di atas pasir.”

Yoyok Riyo Sudibyo
(Bupati Batang
2012–2017)

ses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar mereka dapat melihat, mengetahui pembangunan, dan bertanya tentang pengelolaan keuangan sekaligus penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Batang.

Festival Anggaran ini merupakan upaya Pemkab Batang untuk melaporkan penggunaan APBD atau uang rakyat secara langsung. Inti dari festival ini adalah laporan tata kelola pemerintahan, terutama penggunaan anggaran. Festival ini tercatat sebagai pionir atau yang pertama kali digelar di Indonesia.

Sejatinya, program tersebut memberikan gambaran tentang keterbukaan program dan alokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dijalankan pemerintah untuk rakyat, mulai dari keterbukaan tentang pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga realisasi program dana desa.



- ▶ *Foto Bupati Batang Yoyok Sudibyo beserta Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Mirawati Sudjono, membuka Festival Anggaran 2016 (Sumber: www.republika.co.id)*

Eksekusi program ditampilkan dengan format pameran di dalam sebuah tenda besar. Pengunjung yang memasuki pameran akan langsung diperlihatkan sejumlah stan tematik yang disertai dengan foto. Mulai dari anggaran APBD, hingga alokasi anggaran seperti infrastruktur, pekerjaan umum, kesehatan pendidikan, tata ruang, perindag, pertanian

dan peternakan, aparaturn pemerintahan, pariwisata, kelautan, dan perikanan. Bahkan, untuk memudahkan pengunjung yang datang, keterangan anggaran juga disertai dengan gambar grafis.

Contoh data yang disampaikan misalnya: Pada 2014, APBD Kabupaten Batang mencapai Rp 1,32 triliun dan dialokasikan untuk infrastruktur sebesar Rp 194,19 miliar. Pada 2015, APBD Rp 1,5 triliun dan alokasi ke infrastruktur sebesar Rp 245,92 miliar. Sedangkan pada 2016, APBD mencapai Rp 1,67 triliun dan dialokasikan ke infrastruktur sebesar Rp 243,72 miliar. Semua data itu masih dirinci ke semua bidang-bidangnya.

Selain itu, di Festival Anggaran juga dipamerkan gaji bupati, biaya perjalanan dinas bupati, hingga biaya perjalanan dinas DPRD dalam bentuk poster-poster.

Pada Festival Anggaran 2016 misalnya, pemerintah Kabupaten Batang menggelar acara *talkshow* dengan sejumlah pembicara ahli seperti Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI Jakarta), dan Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung). Tokoh-tokoh tersebut menjadi pembicara dalam tema “Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Didukung oleh ICW, Ombudsman, dan KPK, Festival Anggaran juga menggelar edukasi antikorupsi, pemutaran film, dan seminar antikorupsi.

Hasilnya, Festival Anggaran disambut antusias oleh ribuan warga Batang. Warga dari berbagai latar belakang profesi langsung menyerbu dan melihat sejauh mana pemerintah membangun daerahnya selama ini. Selama masa pemerintahan Bupati Yoyok, Festival Anggaran sangat efektif membuat seluruh jajaran berinovasi membangun sistem tata kelola pemerintah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan tingkat penyerapan anggaran per tahun yang mencapai 90%.

BATANG: RUJUKAN TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Beberapa tahun terakhir, Kabupaten Batang dikenal sebagai guru bidang transparansi anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai terobosan di bidang tersebut dilahirkan dengan semangat menjaga dan mengamankan uang rakyat. Tujuh sistem aplikasi pemerintahan Kabupaten Batang terwujud untuk mendukung niat tersebut, yaitu *e-planing*, *e-budgeting*, Simpelbang, LPSE (Lembaga Pelelangan secara Elektronik), e-Sakip, e-Bansos, dan e-Hibah. Selain itu, sistem aplikasi yang digunakan tersebut sangat mudah diterapkan dan tidak ribet sehingga mudah diklonasi oleh pemerintah daerah lain yang hendak menggunakan sistem yang sama.

Hasilnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merekomendasikan Kabupaten Batang sebagai pusat rujukan transparansi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi kabupaten/kota di Indonesia. Kepercayaan tersebut merupakan hasil dari pemaparan tentang *e-government* di hadapan KPK pada 2016. Rekomendasi KPK ini menjadi prestasi luar biasa bagi Batang karena dinilai baik dalam penyelenggaraan daerah dengan sistem *e-budgeting* sampai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP).

Kesuksesan tersebut mengantarkan Batang sebagai rujukan daerah lain untuk belajar konsep transparansi anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan. Hingga saat ini, ada enam daerah yang sudah bekerja sama dengan Pemkab Batang, yaitu Kabupaten Grobogan, Sukoharjo, Demak, Wonosobo, Banjarnegara, dan Tegal. Ada tambahan empat daerah yang juga bekerja sama dengan Kabupaten Batang terkait sistem ini, antara lain Karanganyar (Jawa Tengah), Cianjur (Jawa Barat), Sikka (Nusa Tenggara Timur), dan Halmahera Selatan (Maluku Utara). Kemudian ada juga dua daerah yang sudah berkunjung ke Batang, yaitu

Kabupaten Manggarai dan Cilacap, namun belum dilakukan penandatanganan MoU. Konkretnya, Pemkab Batang akan melakukan pendampingan saat menentukan kebijakan penggunaan aplikasi tersebut secara teknis.

Dengan demikian, kewajiban utama pemerintah melayani masyarakat secara baik sangat ditekankan oleh Pemkab Batang karena masyarakat sekarang menginginkan pengelolaan daerah yang transparan dan akuntabel, serta efektif dan efisien.

EKONOMI MODERN BERBASIS KERAKYATAN

Pada 2012 silam, Batang masuk daftar 15 kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Hal itu menyebabkan Kabupaten Batang harus bekerja keras dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat. Salah satu terobosan Pemkab Batang dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Batang adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan dana pendamping dalam permodalan kepada masyarakat Batang melalui CSR yang belum tergalai oleh daerah dan perbankan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, antara lain konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di samping itu, pemerintah terus memberikan pelatihan bagi pelaku usaha dan masyarakat Batang, serta mencarikan pasar untuk menjual produknya. Jadi, setelah pemberian modal melalui CSR perusahaan dan pelatihan, Pemkab juga terus menemani masyarakat dengan membukakan akses ke pasar untuk memasarkan produk-produk karya masyarakat Batang.

Tak sampai di situ, Pemkab Batang juga memberikan pendampingan serta pelatihan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kabu-

paten Batang. Semangat membangun ekonomi kerakyatan selalu digelorakan, salah satunya melalui instansi perizinan (BPMPT) yang tidak memberikan izin usaha pendirian mal serta tidak mengizinkan penambahan *minimarket* modern selama pasar-pasar tradisional belum dibangun dan dikembangkan karena Bupati menginginkan pengembangan ekonomi modern berbasis kerakyatan.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Bupati Yoyok Riyo Sudibyo berupa pin emas karena berhasil memajukan koperasi dan UMKM di wilayah Batang. Penghargaan itu diberikan sejalan dengan upaya Bupati Batang mewujudkan visi ekonomi bangkit melalui program dalam pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).



“

PROFIL TOKOH

Nama:

Yoyok Riyo Sudibyo

TTL:

Batang, 23 April 1972

Jabatan:

*Bupati Batang
(2012–2017)*

“

◆ 04

GERTAK: PROGRAM GOTONG ROYONG MENGURANGI KEMISKINAN TRENGGALEK

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dialami oleh setiap daerah, termasuk Kabupaten Trenggalek. Kesenjangan antara miskin dan kaya, kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok, dan faktor lainnya merupakan permasalahan yang terjadi dalam kemiskinan. Menurut Bupati Trenggalek, Emil Dardak, kemiskinan di Trenggalek memang ada. Sekitar 3.000 warga miskin tergolong katir lansia, yaitu lansia miskin yang mempunyai tempat tinggal tapi tidak memiliki sanak keluarga, penghasilan, dan faktor lainnya.

Pemkab Trenggalek yang dipimpin Bupati Emil Dardak benar-benar memperhatikan warganya yang masih hidup di bawah kemiskinan. Untuk mengatasi kesenjangan sosial itu, Pemkab membuat program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK). Gagasan suami dari artis Arumi Bachsin ini pun memperoleh penghargaan WOW Service Excellence dari MarkPlus.

Istilah GERTAK muncul saat rembuk dengan wakil bupati karena pemerintah daerah membutuhkan gebrakan dan ide yang kreatif juga berani dalam mengatasi kemiskinan di Trenggalek. Ini adalah masalah jiwa, bukan hanya materi. Dengan istilah yang tegas, harapannya ada-

lah ada semangat dalam memberantas kemiskinan. Dengan mengedepankan istilah tengok bawah diharapkan semangat gotong royong bisa terwujud, karena warga miskin tidak hanya melihat ke atas kepada warga yang lebih mampu, tapi juga bisa bersyukur karena ada warga lain yang mungkin lebih kurang mampu.



► *Bupati Trenggalek, Emil Dardak, saat berbincang dengan warganya. (Sumber: www.republika.co.id)*

Banyak program dari pusat, provinsi, dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun lagi-lagi, implementasi dan ketepatan sasaran program terkendala oleh permasalahan data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Faktor ketepatan data ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor, seperti kesalahan data, kurang keakuratan pencatatan, ataupun memang ada mutasi data kemiskinan yang dipakai serta *update* datanya terlalu lama. Padahal mutasi status kemiskinan seseorang ini sangatlah cepat dan sewaktu-waktu bisa berubah.

Seseorang yang terkena PHK atau kecelakaan atau faktor lainnya bisa saja jatuh miskin dalam waktu sekejap. Dengan GERTAK, seharusnya permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Dalam GERTAK, definisi dari kemiskinan dan program kemiskinan ini akan disepakati

lewat musyawarah desa. Tahapan selanjutnya, *stakeholder* yang sudah familier diminta mengintensifkan komunikasi. Program ini merupakan program lintas sektoral yang merupakan wujud nyata dari misi ketujuh RP.JMD 2016–2021 yang menjelaskan tentang keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Program ini bertujuan mempercepat penanganan dan menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memperoleh data kemiskinan dari bawah dengan melibatkan *stakeholder* di tingkat desa seperti RT/RW dan kepala desa agar diperoleh data yang lebih valid, tepat, dan terbaru. Program GERTAK sejalan dengan program Kementerian Sosial di bidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial. Di bidang perlindungan dan jaminan sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) dan di bidang penanganan fakir miskin ada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang juga dapat disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan di daerah.

Harapannya adalah jika warga miskin sudah tidak kesulitan berobat dan bersekolah, mereka bisa lebih fokus dalam ikhtiar memperbaiki kondisi ekonomi mereka, termasuk melalui program pemberdayaan dari pemerintah. Melalui program GERTAK, Pemkab Trenggalek mengajak seluruh *stakeholder* “melihat ke bawah”, mengetahui dan merasakan kondisi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan kemudian bersama-sama mencari solusi masalah sosial masyarakat tersebut, khususnya kemiskinan.

Badan Amil Zakat Pemda Trenggalek, misalnya, setiap bulan mengumpulkan Rp 400 juta dari pegawai pemkab ditambah dana CSR dari berbagai lembaga dan perusahaan swasta sehingga proses penanganan PMKS pun akan cepat tertangani.

Dengan GERTAK, warga tidak hanya memiliki wadah resmi untuk bersedekah barang ataupun uang, tapi bisa juga dalam bentuk informasi—infak informasi. Ilustrasi dari Gerakan Tengok Bawah masalah

kemiskinan ini adalah jangan ambil hak orang lain, dahulukan mereka yang lebih membutuhkan di antara kita. Dari ilustrasi tersebut diharapkan semakin banyak jiwa-jiwa penolong meski tidak harus dengan materi, melainkan dengan memberikan informasi tentang masalah kemiskinan, khususnya di kota tempe keripik ini.

Jadi, ketika warga tidak punya uang untuk membantu orang miskin, setidaknya mereka berkesempatan membantu menyampaikan informasi apabila di suatu tempat atau lingkungannya ada orang telantar, kekurangan gizi, atau sakit dan memerlukan layanan kesehatan ataupun hal-hal lainnya.

“

PROFIL TOKOH

Nama:

Emil Elestianto Dardak

TTL:

Jakarta, 20 Mei 1984

Jabatan:

*Bupati Trenggalek
(2017–sekarang)*

“



◆ 05

GOTONG ROYONG DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT: KUNCI SUKSES MEMBANGUN BOJONEGORO

Bojonegoro pada era kolonial Belanda menjadi daerah *endemic poverty* seperti yang ditulis Pander, sejarawan Australia, dalam sebuah buku tentang Bojonegoro. Bojonegoro memang masih menjadi daerah termiskin di Pulau Jawa pada 1990-an. Dalam lingkup Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro tergolong 10 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Selain itu, korupsi pegawai negeri sipil (PNS) di Bojonegoro tak kalah parahnyanya. Pengakuan para PNS di Bojonegoro mengenai aliran “uang siluman” disebutkan bahwa DPRD, wartawan, lembaga swadaya masyarakat, bahkan bupati periode sebelumnya turut menerima uang haram tersebut.

Akibatnya, pada 2008, 80% jalan di Bojonegoro rusak, pelayanan publik buruk, dan memiliki utang proyek sebesar Rp 350 miliar kepada pihak ketiga, sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saat itu hanya Rp 840 miliar. Sebanyak Rp 600 miliar APBD dialokasikan hanya untuk membiayai 12 ribu PNS dan pegawai honorer. Alhasil, pembangunan Kabupaten Bojonegoro terhambat, akibatnya kondisi APBD menjadi tidak sehat dan sangat tidak memadai.

Dalam keadaan Kabupaten Bojonegoro yang seperti itu, Drs. Suyoto terpilih menjadi bupati pada 2008, dan ia tahu keadaan Bojonegoro sedang sakit parah. Namun, melalui gebrakan dan kerja kerasnya sebagai Bupati Bojonegoro selama dua periode, wajah Bojonegoro berhasil berubah dengan seabrek permasalahan Bojonegoro yang berhasil diurai dan diselesaikan.



- ▶ *Bojonegoro mewakili Indonesia dalam ajang Open Government Partnership 2016. (Sumber: citiscope.org)*

Yang sangat menggembirakan, Kabupaten Bojonegoro saat ini berhasil mengukir prestasi di kancah internasional. Kabupaten Bojonegoro yang dipimpin Bupati Suyoto terpilih sebagai satu-satunya wakil Indonesia dalam Pilot Project Open Government. Program dari gerakan Open Government ini bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat pengelolaan birokrasi tingkat kota/kabupaten yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan responsif.

MEMBANGUN BOJONEGORO DENGAN KONSEP PEMBERDAYAAN

Kondisi 80 persen jalan di Bojonegoro yang rusak menuntut segera adanya perbaikan. Kerusakan jalan yang parah akan sangat berpenga-

ruh pada pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Menyadari hal itu, Bupati Suyoto membuat terobosan. Ia membuat program “pavingisasi”, yaitu membangun jalan desa dan kecamatan dengan paving, yang bahan bakunya menggunakan material lokal. Jalan desa dan kecamatan dibangun sepanjang 1.150 kilometer, yang berada di 430 desa di 28 kecamatan. Pada tahap awal, jalan desa yang dibangun dengan paving ini adalah sepanjang 460 kilometer.

Kelebihan dari jalan paving ini adalah mudah dibuat, ramah lingkungan, dan lebih murah dibandingkan dengan jalan aspal. Setiap satu kilometer jalan paving ini menelan anggaran Rp 300 juta, sedangkan jalan aspal memerlukan dana Rp 500 juta lebih. Tentu hal ini lebih efisien. Selain itu, dengan sistem paving ini, pemerintah daerah juga berusaha melakukan pemberdayaan masyarakat. Sistemnya, Pemkab Bojonegoro menyediakan material paving dan pihak desa menyediakan tenaga kerja. Dengan demikian, proyek jalan paving ini melibatkan banyak masyarakat setempat dan bisa menjadi sarana pemberdayaan agar masyarakat bisa memproduksi paving dan nantinya dapat meningkatkan taraf ekonomi. Gotong royong membangun dan mendapatkan ilmu serta pendapatan, begitulah mungkin sederhananya manfaat dari program ini.

Khusus untuk mengurai masalah kekurangan air ketika musim kemarau, Bupati Suyoto membuat program membangun 1.000 embung di wilayah Bojonegoro. Embung atau tampungan air ini berfungsi menyimpan air pada saat musim hujan dan dapat digunakan untuk pengairan persawahan pada musim kemarau. Kini, musim kemarau sudah bukan momok yang menyeramkan bagi masyarakat Bojonegoro. Masyarakat masih bisa menanam padi dan lainnya walaupun musim kemarau tiba.

Selain menyimpan air, embung itu juga dapat dijadikan tambak beternak ikan dan sekaligus objek wisata. Hingga saat ini, menurut Bupati Suyoto, sudah ada 300 embung yang dibangun di wilayah Bojonegoro. Selebihnya embung akan dibangun 1.000 unit hingga tahun 2018. Pembangunan embung itu menelan dana sekitar Rp 50–300 juta per unit.

Kemudian lahan yang dipakai adalah lahan desa seluas setengah hektare hingga satu hektare. Pembangunan embung ini menjawab kebutuhan pengairan pertanian saat musim kemarau. Selain embung, pengairan pertanian juga disuplai dari Waduk Pacal dan Sungai Bengawan Solo.

DIALOG SETIAP USAI SHALAT JUMAT BERBUAH KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Terobosan sukses lainnya yang dilakukan Bupati Suyoto adalah dialog interaktif antara Pemkab Bojonegoro dengan masyarakat, yang diadakan setiap selesai shalat Jumat. Dialog interaktif itu diadakan di Pendopo Pemkab Bojonegoro. Setiap warga Bojonegoro dipersilakan menyampaikan masukan, pendapat, dan unek-uneknya mengenai Bojonegoro pada kesempatan ini.



- ▶ *Dialog Bupati Bojonegoro, Drs. Suyoto, M, Si., bersama masyarakat selepas shalat Jumat. (Sumber: mediaindonesia.com)*

Tema yang diangkat dalam dialog interaktif juga berbeda-beda setiap pekan. Dengan cara seperti itu, warga yang tinggal di perdesaan dan perkotaan bisa dengan leluasa menyampaikan aspirasinya. Cara dialog

seperti itu juga bisa mencegah dan mengurangi praktik korupsi. Jika masyarakat mengetahui ada indikasi penyimpangan pembangunan, misalnya, masyarakat bisa langsung menyampaikannya kepada bupati di forum itu. Dan tentunya, laporan akan langsung dan segera diproses.

Dengan konsep pengaduan seperti itu, akhirnya masyarakat menjadi sangat percaya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat transparan dan akuntabel. Rasa kepercayaan tersebut berbuah manis bagi Pemerintah Daerah Bojonegoro.

Suatu ketika, masyarakat di kawasan Kecamatan Kanor yang terkenal sebagai daerah banjir tiba-tiba mendengar prediksi soal banjir besar. Rakyat berkumpul dan membuat kerja bakti massal yang dihadiri oleh Bupati Suyoto. Masyarakat mengatakan kepada Bupati Suyoto, “Pak ini kalau dibangun tanggul bagus banget.” Lantas Bupati menjawab, “Tapi ngga ada uangnya, bagaimana?”

Setelah mendengar jawaban bupati, akhirnya masyarakat setempat menawarkan pembebasan tanah mereka secara gratis untuk keperluan pembuatan tanggul. Alhasil, akhirnya dibangun tanggul sepanjang 17 kilometer dengan semangat gotong royong antara pemerintah daerah dan masyarakat. Mungkin kita semua bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal tanah itu milik rakyat dan bersertifikat. Ternyata masyarakat sudah sangat percaya dengan Pemerintah Bojonegoro. Pada awalnya, tanah yang digunakan sebagai pembangunan tanggul akan diberikan secara gratis, namun akhirnya dibayar seharga Rp 5–10 ribu per meter oleh pemerintah.

Di samping itu, berbagai terobosan dan upaya akuntabilitas publik yang dilakukan Bupati Suyoto terus digalakkan dan *alhamdulillah* terus menuai hasil. Sebelumnya, saat baru menjabat sebagai bupati, Suyoto mengaku mempunyai beban utang senilai Rp 350 miliar. Akan tetapi, selama dua periode kepemimpinannya, kini APBD Bojonegoro boleh dibilang plus. Bahkan, kemampuan APBD Bojonegoro tahun 2014 senilai Rp 2,5 triliun. Sudah tidak ada lagi aliran dana siluman, bahkan tidak ada yang berani melakukan praktik korupsi.

GERAKAN DESA SEHAT DAN CERDAS (GDSC)

Berbicara mengenai kesehatan berarti bukan hanya masalah berobat dengan fasilitas kartu BPJS dan sebagainya. Untuk melindungi kesehatan rakyatnya, Bupati Suyoto mencanangkan sejumlah program gerakan sehat yang dimulai dari kesadaran dan perilaku sehatarganya sendiri. Rakyat diajak membiasakan diri buang air besar pada tempatnya melalui program Open Defecation Free (ODF), didukung dengan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC). Di dalamnya terdapat indikator terukur di bidang kesehatan dan aspek kecerdasan masyarakat, termasuk terkait ODF, kesehatan lingkungan, kematian ibu (*maternal mortality rate*), kematian bayi (*infant mortality rate*), tingkat pendidikan masyarakat, pengelolaan manajemen pemerintah desa, dan lain-lain.

Dalam praktiknya, Pemerintah Bojonegoro melaksanakan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) yang berisi sasaran pembangunan desa berdasar problem utama yang dihadapi warga setempat. Jadi, program pembangunan desa dimotori pemdes dan seluruh penganggarannya berorientasi penuh pada solusi atas problem yang dihadapi warga setempat. Pemkab akan memfasilitasi, mendorong, dan memperkuat solusi tersebut. Jika solusi yang diperlukan butuh program provinsi dan pusat, misalnya kasus bencana akibat kerusakan hutan dan sungai, dua level pemerintahan tersebut bersama pemkab mengerahkan segala sumber daya untuk melahirkan solusi bagi warga di kawasan tersebut. Jadi, pembagian kewenangan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk menjauhkan kekuasaan dengan masalah warga. Seluruh pembangunan dan kewenangan, sekali lagi, harus berorientasi pada sinergi dalam rangka melahirkan solusi masalah warga. Itulah esensi pemerintah yang hadir melayani rakyatnya.

DESA WISATA MIGAS

Sumur minyak tradisional yang terletak di wilayah Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro, sudah lebih dari 100 tahun beroperasi secara tra-

disional dan dikelola oleh masyarakat setempat. Mayoritas warga Desa Wonocolo bergantung hidup pada kelangsungan sumur tradisional tersebut. Secara alami produksi minyak pasti akan mengalami penurunan sehingga suatu saat tidak dapat diproduksi kembali.

Untuk mengantisipasi hal itu, Bupati Suyoto membuat gebrakan baru di dunia pariwisata untuk masyarakat Desa Wonocolo dengan membuat Desa Wisata Migas. Desa wisata migas ini mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Tempat itu menyajikan banyak hal seputar migas termasuk energi terbarukan, yakni panas bumi yang diolah menjadi geotermal karena kayanya potensi energi. Siswa SD di Bojonegoro pun diberi mata pelajaran dasar tentang *geoheritage*.



► *Desa Wisata Migas Wonocolo, Kab. Bojonegoro. Sumber: infopublik.id*

Melalui wisata migas ini, pengunjung akan diajak melihat langsung penambangan tradisional yang eksotis dengan keberadaan tiang-tiang penyangga kayu. Penambangan tradisional ini dioperasikan secara tradisional. Selain itu, ada trek mobil *jeep*, motor *trail*, dan sepeda. Dengan melintasinya menggunakan sepeda atau *jeep*, selain membuat badan dan

pikiran segar, pengunjung juga bisa melihat dan membayangkan bagaimana sejarah operasi migas di Indonesia pada masa lampau.

Untuk mengelola desa wisata sebagai pusat wisata migas pertama di Indonesia, pemerintah setempat berkolaborasi dengan Paguyuban Warga Desa Wonocolo. Dengan keberadaan wisata migas ini, masyarakat setempat akan mendapat tambahan pendapatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tidak hanya mengandalkan sumur minyak, tetapi juga potensi lain seperti kuliner dan industri kreatif yang juga ikut serta bergerak.

DANA ABADI UNTUK PEMBANGUNAN BOJONEGORO YANG BERKELANJUTAN

Tidak ingin kekayaan minyak dan gasnya habis sia-sia, Pemkab Bojonegoro melalui ide Bupati Suyoto menggalang dana abadi. Sebanyak Rp 100 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah dialokasikan dalam dana abadi saat awal pembentukan. Nantinya, dana abadi hanya boleh digunakan untuk dua hal, yaitu menyokong pendidikan generasi muda Kabupaten Bojonegoro dan menutup defisit anggaran daerah saat harga minyak sedang anjlok. Ide dana abadi ini digagas oleh Bupati Suyoto karena dilatarbelakangi oleh pengalaman yang pernah terjadi di daerah yang kaya akan produksi minyak dan gas.

Dulu, Bojonegoro pernah menjadi daerah kaya migas, namun uangnya dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak berkelanjutan. Akhirnya Bojonegoro menjadi daerah miskin ketika harga migas anjlok dan habis. Tetapi di kemudian hari, ternyata ditemukan cadangan migas baru yaitu Blok Cepu, blok penghasil minyak terbesar di Indonesia. Agar tidak kembali menjadi daerah miskin dibuatlah tabungan dana abadi. Kini Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki investasi untuk pembangunan berkelanjutan di Bojonegoro melalui program Dana Abadi.

“

PROFIL TOKOH**Nama:***Suyoto***TTL:***Bojonegoro, 17 Februari**1965***Jabatan:***Bupati**(2008–sekarang)*

“



◆ 06

“KERJA, KERJA, KERJA” MANTRA GERAKAN PERUBAHAN DAHLAN ISKAN

“**K**erja, Kerja, Kerja” bukan sebatas slogan di mata Dahlan Iskan. Mantan Dirut PLN dan Menteri BUMN era SBY ini memang dikenal sebagai sosok pekerja keras, efektif, dan tidak begitu peduli pada penampilan atau protokoler birokrasi. Semangat “kerja, kerja, kerja” selalu ditularkan kepada semua jajaran yang pernah dipimpinya. Tak sebatas memberikan slogan, Dahlan berhasil membuktikan bahwa semua persoalan hanya bisa diselesaikan dengan kerja, kerja, kerja. Dalam sebuah kesempatan, Dahlan mengatakan, “8 dari 10 persoalan serius Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan ini hanya bisa diatasi dengan bekerja, bekerja, dan bekerja. Kemiskinan tidak selesai dengan pidato. Kemiskinan juga tidak bisa dihibur hanya dengan menciptakan lagu.”

Pada 1998, slogan penuh semangat “Kerja, Kerja, Kerja” mulai digalakkan di koran-koran Jawa Pos Group yang saat itu dipimpinya. Selama dua tahun, jargon itu dipasang di halaman pertama semua koran Jawa Pos Group. Tujuannya adalah spirit “kerja, kerja, kerja” menyebar

luas di seluruh Indonesia. Dengan begitu, semakin banyak orang yang sadar untuk memomorsatukan kerja, semakin cepat situasi diperbaiki.

Selanjutnya, jargon “Kerja, Kerja, Kerja” itu kemudian dibawa oleh Dahlan Iskan ketika menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Jargon “Kerja, Kerja, Kerja” digalakkan dan dikampanyekan kepada semua karyawan PLN. Spirit “kerja, kerja, kerja” menurut Dahlan sangat sesuai diterapkan di mana saja, termasuk PLN. Hanya kerja, kerja, dan kerja yang bisa mempercepat bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalannya, termasuk persoalan yang saat itu menjangkiti PLN. Slogan “Kerja, Kerja, Kerja” di PLN ini menggantikan slogan PLN sebelumnya, yaitu *Electricity For A Better Life* (listrik untuk kehidupan yang lebih baik).



▶ *Petugas PLN sedang memeriksa kondisi aliran listrik. Sumber: tirto.id*

Saat awal menjadi Dirut PLN, Dahlan Iskan menyadari PLN sering diejek bahkan dimaki masyarakat karena ketika listrik mati, pasti kembali nyalanya akan lama. Dengan spirit slogan baru PLN itu, Dahlan bersama para karyawan PLN berhasil melakukan banyak terobosan untuk mengubah stigma negatif perusahaan listrik negara ini. Di antaranya adalah program 3459 yang merupakan aktualisasi dari slogan PLN yang baru, yaitu “Kerja, Kerja, dan Kerja”.

Program 3459 berarti listrik hanya boleh padam selama 3 jam dalam setahun, waktu respons 45 menit, dan 9 kali padam per pelanggan per tahun. Program ini ditetapkan untuk memastikan PLN bahwa tidak boleh ada listrik mati dalam waktu yang lama seperti masa sebelumnya. Waktu respons yang cepat tentu menuntut para karyawan PLN harus sigap dan tanggap kepada konsumen. Sekali lagi, inilah wujud dari slogan “Kerja, Kerja, Kerja” di PLN.

Selain potret tersebut, masih banyak gebrakan yang mengharuskan para karyawan PLN terus bekerja keras agar bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Inilah esensi dari slogan yang selalu ditanamkan Dahlan kepada seluruh karyawan PLN. Sebut saja, PLN mengeluarkan kebijakan bebas bayar pet se-Indonesia. Gebrakan ini membuahkan hasil: dalam waktu 6 bulan karyawan PLN berhasil melakukan gerakan Sehari Sejuta Sambungan. Inilah buah dari kerja keras para karyawan.

Tak hanya sampai di situ, PLN di bawah komando Dahlan Iskan dengan slogan “Kerja, Kerja, Kerja” berhasil membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada 2010 di lima pulau di Indonesia Timur. Lima pulau yang menjadi lokasi pembangunan PLTS tersebut antara lain Pulau Banda, Bunaken (Manado), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Citrawangan, dan Derawan (Kalimantan Timur). Kemudian, pada 2011, Dahlan Iskan mengeluarkan pengumuman akan merencanakan pembangunan yang sama di seratus pulau pada 2011, namun kebijakan ini tak sepenuhnya berhasil dilakukan karena ketika itu Dahlan diamanahi menjadi Menteri BUMN oleh Presiden SBY.

Saat memimpin Kementerian BUMN, Dahlan masih setia dengan jargon “Kerja, Kerja, Kerja” dan meminta semua bawahannya termasuk semua jajaran di perusahaan pelat merah untuk terus kerja dan kerja. Hanya dengan bekerja dan bekerja sebagian BUMN yang rugi bahkan hampir mati bisa diselamatkan. Dahlan memang betah bekerja berjam-jam. Di mana saja dan kapan saja ia selalu bekerja.

Bisa dilihat bagaimana sibuknya Dahlan Iskan menjadi menteri BUMN. Bahkan dikisahkan saat selesai melakukan serah terima jabatan (SERTIJAB) dengan Mustafa Abubakar, ia langsung mengunjungi semua ruang staf dan pejabat di Kementerian BUMN. Pada sore hari itu juga, ia langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) pertama. Dalam rapat itu, ia menyatakan bahwa sebagai Menteri, ia tidak akan mengangkat Staf Khusus Menteri, meski secara ketentuan hal itu diperbolehkan. Hebatnya, pada malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, Dahlan sudah langsung bergerak ke Bali, untuk kemudian menyeberang ke Lombok. Di Lombok, Dahlan mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan *groundbreaking* pembangunan kawasan pariwisata terpadu Mandalika.



- ▶ *Dahlan Iskan (saat menjabat Menteri BUMN) mengunjungi PT DKB Galangan II. (Sumber: bumn.go.id)*

Di sela-sela mendampingi Presiden, Dahlan juga menyempatkan diri berkoordinasi dengan Dirut PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, termasuk Direksi PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Selepas dari Lombok, Dahlan langsung melakukan rapat dengan para deputinya. Selanjutnya, pada Sabtu ia bertolak ke Sumatra Utara, melakukan kunjungan kerja ke Nias. Dahlan menyertakan sejumlah direksi

seperti Dirut PT Kereta Api Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Jasa Marga. Sambil menginap di Pulau Nias, pada malam harinya ia melakukan diskusi santai tapi sangat produktif dengan para direksi terkait pembangunan yang melibatkan BUMN di kawasan itu.

Tak cukup sampai di situ, pada Minggu pagi ia terbang menuju Medan. Di ibu kota Provinsi Sumatra Utara itu, Dahlan memanggil direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, II, III, dan IV serta PT Kawasan Industri Medan, dan PT Pupuk Iskandar Muda untuk menyelenggarakan rapat. Minggu sore ia sudah berada di Jakarta. Selepas mendarat di Jakarta, Dahlan juga “diadang” permintaan pertemuan oleh Dirut PT Pelindo II saat itu, RJ Lino, yang melaporkan berbagai program pengembangan Pelindo II. Begitulah etos kerja seorang Dahlan Iskan.

Tentu hal itu hanya sekelumit potret dari kerja keras Dahlan Iskan sewaktu menjabat Menteri BUMN. Kita bisa membaca dan mengetahui lebih banyak lagi dalam *manufacturing hope* Jawa Pos yang pernah ditulis selama Dahlan Iskan menjabat Menteri BUMN. Namun setidaknya, dari sekelumit kisah itu, kita bisa mengambil *ibrah* dan pelajaran dari praktik kerja keras tersebut dan berharap mantra “Kerja, Kerja, Kerja” ala Dahlan Iskan bisa menular kepada semua masyarakat, baik sektor rumah tangga, pemerintahan, pendidikan, pengusaha UMKM, perusahaan, dan semua lapisan masyarakat lainnya.

Dengan mantra “Kerja, Kerja, Kerja”, yakinlah Indonesia akan menjadi lebih baik. Tambahannya, bagi semua pemimpin, apa pun level dan jenis pimpinannya, menularkan semangat kerja keras dengan memberikan contoh adalah sebuah kontribusi besar dalam menggerakkan gerakan perubahan. Mari kerja, kerja, kerja!

“
PROFIL TOKOH

Nama:

Dahlan Iskan

TTL:

Magetan,

17 Agustus 1951

Jabatan:

Menteri BUMN RI

(2011–2014, era Presiden SBY)

“



◆ 07

KOTA BANDUNG: PRAKTIK NYATA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Jalan-jalan ke Kota Bandung sudah menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Siapa yang tidak ingin berkunjung ke Bandung? Kota yang dikenal dengan sebutan *Paris van Java* ini menjadi primadona bagi para pelancong dan wisatawan dalam negeri ataupun mancanegara. Apalagi saat ini, kota dengan ratusan taman indah dan hitnya ini menjadi tempat yang paling favorit bagi kawula muda. Di samping itu, di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil, yang terkenal sebagai ahli arsitek ini, Bandung menjadi lebih indah, nyaman, dan aman.

Lantas, seperti apa transformasi Bandung sehingga bisa menjadi kota yang indah, nyaman, dan mengesankan seperti sekarang ini? Apa saja kira-kira langkah dan inovasi yang dilakukan Pemkot Bandung dalam memberikan pelayanan publik? Berikut uraiannya:

MENAIKKAN INDEKS KEBAHAGIAAN WARGA KOTA BANDUNG

Masalah pertama yang teridentifikasi dari Kota Bandung kala itu adalah warganya mengarah kepada ciri-ciri kota yang sakit. Salah satu ciri kota

sakit adalah warganya enggan berinteraksi di luar rumah atau bisa dibilang sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing. Masalah tersebut lalu menggerakkan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung untuk mulai merealisasikan program kerja dengan target menaikkan indeks kebahagiaan warga Bandung.

Bandung sebagai salah satu kota di Jawa Barat realitasnya tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk pembangunan ruang publik baru berupa taman. Oleh sebab itu, hal yang dilakukan oleh Ridwan Kamil adalah merevitalisasi ruang publik yang sudah ada, khususnya mengubah taman menjadi taman kota tematik. Metode pendekatan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung adalah berdiskusi langsung dengan warga terkait dengan taman tematik apa yang warga Bandung butuhkan, sehingga keberadaannya dapat menarik warga untuk menghabiskan waktunya di sana.

Beberapa bentuk revitalisasi taman yang dilakukan Pemkot Bandung adalah Taman Alun-Alun Kota Bandung, Taman Vanda, Taman Balaikota, Taman Sungai Cikapayang, Taman Teras Cikapundung, Taman Pasupati, Taman Film, Taman Lalu Lintas, dan masih banyak lagi.

Revitalisasi taman tidak hanya berupa penghijauan kembali tanaman, namun juga penambahan fasilitas *jogging track*, tempat menyalurkan hobi seperti area bermain *skateboard*, wahana anak, dan masih banyak lagi. Beberapa taman di Bandung telah mengalami revitalisasi yang tidak hanya fisik, melainkan juga tema. Di antaranya adalah Taman Pasupati atau yang biasa dikenal sebagai Taman Jomblo, Taman Pustaka Bunga, Taman Musik, dan Taman Fotografi.

Di Taman Pasupati terdapat bangku-bangku yang terbuat dari semen dan hanya bisa diduduki oleh satu orang. Di Taman Fotografi yang memiliki luas 500 meter persegi dipasang bingkai-bingkai foto dari besi dan kaca sebagai medium pameran yang dapat dimanfaatkan oleh fotografer profesional dan pemula.

Hasil revitalisasi taman ini sangatlah menarik perhatian warga Bandung, bahkan yang dari luar Bandung. Dengan hal itu, indeks kebahagiaan masyarakat Bandung juga terus mengalami kenaikan. Pada 2016 indeks kebahagiaan masyarakat Bandung tercatat 73,27% dengan segmentasi keluarga pasangan sangat berbahagia mencapai 73,43%. Sementara pada 2017, indeks kebahagiaan warga Bandung mencapai 73,42% (sangat bahagia) dengan segmentasi remaja sangat bahagia mencapai 75,11% (sangat bahagia).



- ▶ *Taman Cikapundung dimanfaatkan sebagian pengunjung untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga (Sumber: www.merdeka.com)*

REFORMASI BIROKRASI BANDUNG

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pernah menempatkan birokrasi ibu kota Jawa Barat ini berada di peringkat dua ratusan. Hal itu menjadikan birokrasi Kota Bandung kerap menjadi sorotan negatif. Bisa dibayangkan seperti apa carut-marut kondisi birokrasi Kota Bandung saat itu. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Wali Kota Bandung

dalam menjalankan roda pemerintahan. Permasalahan bobroknya birokrasi ini kemudian menjadi perhatian serius Pemkot Bandung untuk segera diselesaikan.

Setelah berselang beberapa tahun dengan semangat perjuangan melakukan reformasi pelayanan dan birokrasi, kini Bandung menjadi jawara dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Bagaimana Bandung sukses menggapai prestasi reformasi birokrasi? Ridwan Kamil menyebutkan tiga kunci yang mengubah birokrasi Kota Bandung. Pertama, birokrasi yang bersih. Untuk itu, ia merancang sistem daring bagi segala urusan birokrasi sehingga tak ada korupsi atau pungutan liar.

Kedua, ia mendorong birokrat kota bekerja cepat. Semua pelayanan publik harus dilakukan berdasarkan target waktu yang sudah ditentukan. Jika kinerja lambat, warga pun diberi akses cepat dan mudah untuk mengeluh dan menyampaikan laporan. Setiap elite pemerintahan kota tak bisa lagi mengelak karena Ridwan menerima langsung keluhan dan laporan warga setiap pekannya.

Terakhir, bawahannya harus profesional. Dengan prinsip tersebut, semua PNS di lingkungan Pemkot Bandung adalah pelayan warga yang harus cerdas dan mumpuni. Oleh karenanya, tidak heran untuk mencapai hal tersebut Pemkot sering mengadakan pelatihan kepada pegawai negeri sipil, bahkan sampai mengirim mereka ke Singapura.

BANDUNG COMMAND CENTER: IKON SMART CITY BANDUNG

Sebagai kelanjutan dari proses reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat Bandung, Pemkot Bandung kemudian mendirikan Bandung Command Center (BBC). BBC merupakan salah satu ikon *smart city* di Kota Bandung. Dilengkapi dengan teknologi yang canggih, operasional BBC ditujukan untuk menyempurnakan pelayanan publik dari Pemkot Bandung kepada masyarakat. Dibangun sejak 2014 dan resmi beroperasi pada 19 Januari 2015, BBC menjadi salah satu inovasi Pemkot Bandung

dalam hal pelayanan publik. Selain itu, BBC juga merupakan salah satu kunci penting dalam upaya Pemkot Bandung mewujudkan *Bandung Smart City*.



- ▶ *Kang Emil (sapaan akrab Wali Kota Bandung) sedang memantau wilayahnya melalui Bandung Command Center. (Sumber: www.bandungbisnis.com)*

Bandung Command Center memiliki dua fungsi utama, yaitu menyempurnakan pelayanan publik ke luar dan mempermudah pelayanan ke dalam, yakni dalam hal manajemen pengambilan keputusan (*decision support system*).

Untuk pelayanan publik, ada tiga fasilitas unggulan yang dimiliki oleh Bandung Command Center, yaitu LAPOR! (Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat), NTPD 112, dan aplikasi berbasis *Android Panic Button*. Adapun sebagai *Decision Support System*, BBC menyediakan berbagai macam informasi yang dihimpun dari beragam aplikasi yang dimiliki Kota Bandung.

Untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pendapatan kota misalnya, tersedia informasi dalam bentuk *dashboard* Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung. Untuk pengambilan

keputusan terkait infrastruktur, aplikasi Manpro (Manajemen Proyek) yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung menyediakan informasi yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan terkait pelayanan publik diambil data dari infografis LAPOR!, hasil pemantauan melalui CCTV, dan analisis keluhan masyarakat melalui media sosial dapat menjadi sumber data yang akurat.

Terkait dengan fungsi sebagai *decision support system*, BBC menyediakan laporan terkait permasalahan kota sebagai bahan instruksi pimpinan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Laporan tersebut dibuat secara rutin setiap minggu, berdasarkan data pelanggaran, penyimpangan, dan pengaduan masyarakat yang dihimpun dari CCTV, LAPOR!, media sosial, serta data aplikasi OPD.

Ridwan Kamil menjelaskan ada 300 aplikasi yang dimiliki Pemkot Bandung untuk menunjang konsep Bandung *Smart City*. Dengan 300 aplikasi itu, Pemkot Bandung mengklaim bahwa 70% masalah yang dulu tak bisa diakses dan dikontrol kini bisa terselesaikan. Aplikasi layanan aduan masyarakat (LAPOR!) dan aplikasi pelayanan masyarakat berbasis *online* serta *e-budgeting* lainnya menjadi satu dari sekitar 300 perangkat lunak yang telah dibuat Pemkot Bandung untuk mendukung menyelesaikan permasalahan, baik di lingkungan masyarakat maupun di internal birokrasi.

KEKASIH JUARA: PROGRAM KONSELING GRATIS

Program yang baru-baru ini diluncurkan oleh Pemkot Bandung adalah “Kekasih Juara”. Kekasih merupakan akronim dari Kendaraan Konseling Silih Asih. Adapun Kekasih Juara merupakan program konseling gratis dengan menggunakan kendaraan yang nantinya akan berkeliling Kota Bandung. Program ini sempat di-*posting* oleh Kang Emil lewat akun Instagram pribadinya @ridwankamil pada Jumat (25/8/2017) sore. Dalam unggahannya, Ridwan memasang gambar dua unit mobil ber-

warna merah muda bergambar hati dan seorang dokter. Di bagian samping mobil tertulis “Kekasih Juara”.

Program unik dan visioner ini dibuat untuk menangani masalah yang menimpa warga Bandung seperti stres, putus cinta, ditikung teman, banyak utang, bahkan masalah rumah tangga seperti suami jarang pulang, mantan mengajak *balikan*, apa pun masalah duniawi yang sifatnya bisa dikonsultasikan dengan psikolog, psikiater, dan konselor di mobil tersebut. Kekasih Juara merupakan program inovasi jemput bola yang digagas Dinas Kesehatan Kota Bandung. Program itu dibuat dengan tujuan memberi solusi terhadap permasalahan psikologis warga Bandung.

Dengan layanan tersebut, warga bisa curhat tentang apa saja kepada para petugas. Untuk sementara ini, Pemkot Bandung telah menyediakan tiga Kekasih. Satu kendaraan akan berisikan tiga konselor yang nantinya dalam kegiatannya akan didirikan tenda-tenda tempat berkonsultasi. Jumlah kendaraan ini pun rencananya akan terus ditambah.

KREDIT MESRA: PINJAMAN BERBASIS MASJID TANPA BUNGA

Kemiskinan memang menjadi permasalahan di semua daerah termasuk Kota Bandung. Tingkat kemiskinan yang semakin hari semakin meningkat harus segera ditangani dan diselesaikan. Memang tidak bisa sekaligus, tapi setidaknya bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di masyarakat.

Untuk menangani masalah kemiskinan ini, Pemkot Bandung melalui Wali Kota Bandung, Ridwan kamil, sudah berupaya mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program, di antaranya memberi beras gratis kepada masyarakat, mengadakan bus gratis bagi pelajar dan buruh, ojek *delivery* makanan balita untuk warga miskin, dan lainnya. Prinsip yang selalu dipegang oleh Pemkot Bandung untuk menyejahterakan masyarakat itu tak hanya menaikkan pendapatan, tapi juga memangkas

pengeluaran karena 25% gaji pekerja di Indonesia itu habis oleh biaya transportasi.

Namun, dari sekian program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, ada satu program yang sangat menarik untuk dipaparkan, yaitu MESRA (kredit masjid sejahtera). Ternyata Pemkot Bandung melalui PD BPR Kota Bandung meluncurkan sebuah program Kredit Masjid Sejahtera (Mesra) yang diberikan pada jemaah masjid tanpa bunga dan denda. Program ini tentu sangat diapresiasi oleh masyarakat yang kurang mampu di Kota Bandung.



► *Pemkot Bandung bersama PD BPR Kota Bandung resmi meluncurkan Kredit Masjid Sejahtera (Mesra). (Sumber: www.pikiran-rakyat.com)*

Dalam hal ini, Pemkot Bandung mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Untuk itu, program MESRA hadir menjadi salah satu solusi program yang memadukan antara imtaq dan iptek.

Praktik kredit MESRA di lapangan adalah setiap jemaah bisa mengajukan secara berkelompok minimal lima orang dan maksimal 25 orang dengan pinjaman mulai Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta per orang. Kredit MESRA ini berbentuk kredit usaha, bukan hibah bansos (bantuan

sosial). Harapan dari program ini, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung, juga para DKM di 4.000 masjid yang ada di Kota Bandung bisa turut aktif agar para jemaah berpartisipasi dalam program yang bertujuan untuk kesejahteraan ini dan sekaligus bisa memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan para kelompok masyarakat Kota Bandung yang mengambil kredit.

Program kredit MESRA memang berbasis masjid, namun dipastikan transaksinya tidak akan dilakukan di rumah ibadah umat muslim tersebut. Sebagai gantinya, akan ada sejumlah orang yang ditugaskan untuk mendatangi warga sesuai rekomendasi para DKM. Dengan demikian, kesannya pemerintah mendatangi warga bukan warga mendatangi pemerintah.



“

PROFIL TOKOH

Nama:

Muhammad Ridwan Kamil

TTL:

Bandung, 04 Oktober 1971

Jabatan:

*Wali Kota Bandung
(2013–2018)*

“

◆ 08

MEMBANGUN SDM INDONESIA YANG UNGGUL DENGAN LPDP

Realitas rendahnya kualitas dan kuantitas manusia terdidik di Indonesia ditunjukkan dengan rasio S-3 yang masih sangat rendah, yaitu hanya 98 orang per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Malaysia (509 orang), Iran (1.410 orang), dan Jepang (6.438) yang sudah jauh di atas Indonesia. Komposisi lulusan perguruan tinggi terbilang tidak ideal untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Jumlah sarjana teknik di Indonesia hanya 11,56%. Angka tersebut jauh jika dibandingkan persentase lulusan teknik pada beberapa negara, seperti Jerman (16%), Jepang (18%), Vietnam (20%), dan Malaysia (24%).

Di samping itu, rendahnya dana riset yang bergulir di Indonesia juga menjadi salah satu alasan kuat penyebab permasalahan tersebut. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah dana riset Indonesia hanya 0,07%, sementara Malaysia, Singapura, dan Jepang sudah jauh lebih besar, yaitu berturut-turut 0,63%, 2,2%, dan 3,3% dari PDB. Dengan pendanaan riset yang seperti ini, bagaimana bisa mendorong riset perguruan tinggi supaya bisa dinikmati secara nasional? Sela-

ma ini riset berhenti di laboratorium. Mereka tidak bisa *scale up* supaya hasilnya bisa layak bisnis untuk industri.

Dengan latar belakang masalah tersebut, akhirnya dirumuskan sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas manusia terdidik, yaitu dengan kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP menjadi langkah konkret untuk membiayai beasiswa mahasiswa yang terpilih, baik kuliah ke luar negeri maupun di dalam negeri.



► *Ilustrasi lulusan perguruan tinggi. (Sumber: www.tribunnews.com)*

Keputusan untuk menetapkan LPDP sebagai solusi permasalahan pendidikan bangsa ditetapkan oleh Menteri Keuangan era Presiden SBY, Sri Mulyani, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga non-eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama). Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum.

KONSISTEN MELAKSANAKAN PROGRAM LPDP

LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Beasiswa LPDP ditujukan khusus untuk pendidikan tinggi strata 2 (program magister) dan strata 3 (program doktoral) dan merupakan sebuah instansi resmi yang dikelola pemerintah.

UUD 1945 mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya 20% Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) ditujukan untuk fungsi pendidikan. Pemerintah dan DPR RI pada 2010 melalui UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU).

Pada 2011, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyepakati bahwa pengelolaan DPPN dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, namun pejabat dan pegawainya merupakan gabungan antara pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LPDP dikelola berkat kerja sama empat kementerian di Indonesia, yaitu:

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),
3. Kementerian Agama (Kemenag), dan
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek).

Belakangan ini eksistensi beasiswa LPDP semakin menonjol dibanding beasiswa lain. Hal ini tak lepas dari canggihnya sistem informasi

masa kini dalam menyebarkan artikel-artikel tentang beasiswa LPDP. Melalui jaringan media sosial yang kebanyakan dimainkan oleh para pemuda Indonesia, beasiswa ini pun menjadi tren.

Salah satu penggagas beasiswa ini adalah Ibu Sri Mulyani ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden SBY, dengan harapan adanya peningkatan kualitas pendidikan manusia Indonesia tanpa terlalu membebani APBN. Beliau mencetuskan beasiswa ini sebagai bentuk keprihatinannya kepada putra-putri bangsa agar bisa melanjutkan pendidikannya di kampus incaran mereka tanpa khawatir besaran biaya yang harus dikeluarkan. Jika memilih kuliah di luar negeri, diharapkan setelah lulus kelak mereka kembali ke Indonesia untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan di Indonesia. Sri Mulyani prihatin dengan banyaknya putra-putri terbaik bangsa ini yang setelah kuliah di luar negeri, malah memilih untuk tetap tinggal di sana.



- ▶ *Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat memberikan sambutan dalam acara LPDP Edufair 2017. (Sumber foto: www.kemenkeu.o.id)*

Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyediakan dana sebesar Rp 22,5 triliun untuk memberikan beasiswa pendidikan tinggi pada 2017 ini. Angka ini terus meningkat dari anggaran di tahun pertama didirikannya LPDP lima tahun lalu, yakni sebesar Rp 1 triliun. Angka tersebut tidak dihabiskan sepenuhnya untuk beasiswa. Sebagian anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa LPDP juga disimpan di instrumen investasi yang produktif sehingga

anggaran beasiswa LPDP kian bertambah setiap tahunnya. Sampai saat ini (31 Januari 2017), LPDP telah menyalurkan beasiswa magister dan doktoral sebanyak 16.295 penerima alias *awardee* LPDP. Dari jumlah tersebut, 10.523 adalah penerima beasiswa magister atau S-2 dan 3.864 penerima beasiswa doktoral atau S-3.



“
PROFIL TOKOH

Nama:

Sri Mulyani

TTL:

*Bandar Lampung,
26 Agustus 1962*

Jabatan:

*Menteri Keuangan RI
(Era Presiden SBY
Era Presiden Jokowi)*

“

◆ 09

MEMBASMI TENKULAK TAPANULI UTARA DENGAN PASAR LELANG

Siapa yang tak terpesona dengan keindahan objek wisata yang satu ini, Danau Toba. Wisata yang indah dan mempesona ini terbentang pada tujuh kabupaten yang ada di Sumatra Utara, termasuk di antaranya adalah Tapanuli Utara. Akan tetapi, akses yang sulit ke objek wisata tersebut menjadikan kendala tersendiri sehingga volume pengunjungnya tidak sebanyak Bali. Dampaknya, potensi tersebut belum bisa memberikan pengaruh dalam proses kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara. Sebelumnya masyarakat atau wisatawan yang ingin ke Sumatra Utara dan menikmati Danau Toba harus mendarat di Bandara Kualana-mu dan menempuh perjalanan darat cukup lama.

Sejak Maret 2005, sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meresmikan langsung pengoperasian Bandara Silangit. Sejak saat itu pembangunan bandara pun mulai gencar dilakukan untuk meningkatkan kunjungan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Meskipun demikian, Bandara Silangit hanya diterbangi penerbangan perintis dengan pesawat berkapasitas di bawah 20 kursi dari Sibolga, Gunung Sitoli, dan Medan. Dan hal ini tentunya belum maksimal untuk meningkatkan kunjungan ke Danau Toba.

Kemudian pada 2016, maskapai Garuda sudah membuka rute dari Jakarta langsung menuju Silangit tanpa harus ke Kualanamu terlebih dahulu. Selanjutnya, melalui pemimpin revolusioner Bupati Tapanuli Utara, Drs. Nikson Nababan, Bandara Silangit berhasil menjadi Bandara Internasional pada 28 Oktober 2017. Saat ini para wisatawan dan pelancong, khususnya dari mancanegara yang ingin melancong ke Danau Toba tidak perlu bingung dan lelah di perjalanan lagi. Bahkan, Bandara Silangit juga memiliki terminal baru yang artistik dan luas nan megah. Jadi, wisatawan mancanegara yang ingin menikmati keindahan alam Danau Toba bisa langsung menuju Bandara Silangit tanpa harus transit di bandara lain.



► *Bandara Internasional Silangit. (Sumber: www.tribunnews.com)*

Hasilnya sangat mengagumkan. Jumlah pergerakan penumpang di Bandara Silangit pada semester I tahun 2014 hanya 11.946 penumpang. Namun, sejak diterbangi maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta tahun 2016, jumlah pertumbuhan penumpang di Bandara Silangit melonjak tajam, tercatat pada semester I tahun 2017 berjumlah 120.749 penumpang, naik sebesar 304,40% dibandingkan semester I tahun 2016 yang hanya berjumlah 29.859 penumpang.

Bandara ini adalah terobosan pertama dalam menyajikan Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tentunya, hal ini diharapkan akan berdampak langsung pada iklim investasi pariwisata Danau Toba yang semakin menjanjikan.

Cerita tersebut merupakan salah satu terobosan dan langkah perubahan yang berhasil dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada dasarnya, ada banyak perubahan dalam meningkatkan kemajuan daerah, khususnya di sektor pertanian yang menjadi mata pencarian utama masyarakat Tapanuli Utara. Berikut adalah beberapa gerakan perubahan Tapanuli Utara:

PEMBUKAAN JALAN INTERKONEKSI



- ▶ *Bupati Nikson Nababan sedang meninjau jalan bersama aparat pemerintah setempat. (Sumber: bonapasogittapanuliutara.blogspot.co.id)*

Kondisi daerah yang terdiri dari pegunungan dan lembah yang sukar dilewati merupakan penyebab utama Tapanuli Utara tidak memiliki akses jalan yang menghubungkan antardesa. Satu-satunya cara men-

jangkaunya adalah berjalan kaki melewati pegunungan dan lembah. Sebagai langkah awal pembenahan infrastruktur dan pembukaan jalan interkoneksi, langkah yang diambil oleh Bupati Nikson Nababan adalah pengadaan alat berat yang bisa membuka jalan dengan membelah pegunungan dan melalui lembah yang masih perawan.

Pada 2015, Pemkab Tapanuli membuat pengadaan 11 alat berat untuk mendukung target pembenahan infrastruktur dan pembukaan jalan interkoneksi. Alat ini langsung turun ke desa-desa terisolasi dan membuka jalan interkoneksi. Jalan-jalan berlubang yang terbuat dari aspal lapen dibenahi kembali menjadi jalan *hotmix*. Hasilnya, Muara Tolang, Torhonas, Siantar Naipospos, dan Hutatua sudah terbebas dari keterisolasian.

Keberanian membuka akses jalan yang terkoneksi tersebut dilakukan karena Pemkab Tapanuli Utara berprinsip bahwa infrastruktur yang mendukung akan berdampak langsung pada percepatan perekonomian sehingga provinsi bisa bertumbuh dengan pesat. Hasil pertanian rakyat akan mudah mencapai pasar sehingga biaya produksi pertanian tidak terlalu besar, harga juga bisa terjamin sehingga rakyat tidak merugi.

PUPUK BERSUBSIDI BAYAR PASCAPANEN

Setelah berhasil melakukan pembukaan jalan interkoneksi, langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Tapanuli Utara adalah menjadikan Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan. Ini karena satu-satunya potensi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan demi kemajuan daerah adalah pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Untuk menyukseskan target tersebut diperlukan kebijakan dan program yang bisa langsung dirasakan oleh petani untuk menggenjot semangat bertani dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Salah satu kebijakan tersebut adalah pupuk bersubsidi bayar pascapanen. Pemkab Tapanuli Utara menciptakan inovasi baru dan pertama di Indonesia. Masyarakat langsung merasakan pelayanan ini dengan

mendapat pupuk terlebih dulu tanpa perlu memikirkan pembayaran. Pupuk bersubsidi bisa dirasakan langsung oleh petani melalui kelompok tani yang disalurkan secara langsung oleh Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.

Bukan itu saja, pemerintah juga memberikan pendampingan yang baik kepada petani agar hasil pertanian mencapai target. Saat ini para petani merasa puas dengan program pengembangan sektor pertanian. Petani memperoleh hasil yang berlimpah dengan penerapan pengawasan, pengendalian, dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya petani menghasilkan gabah rata-rata 6,5 ton per hektare. Namun saat ini mengalami peningkatan rata-rata 8,2 ton per hektare.

PASAR LELANG BERHASIL MEMOTONG MATA RANTAI TENGGULAK

Tak hanya sampai di situ, pemerintah Tapanuli Utara juga terus menguras otak untuk melahirkan



Pasar lelang Taput bisa menjadi ikon Pasar Lelang Indonesia. Kami benar-benar memberikan apresiasi karena Bupati Taput benar-benar memberikan perhatian terhadap jalannya pasar lelang ini. Kami salut karena pasar lelang yang telah kami bina saja belum bisa seperti ini, yang pelelangannya sangat konsisten. Sungguh luar biasa. Kami akan laporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden melalui pimpinan kami dan akan kami kirimkan juga ke Pemkab Taput nantinya.

(Kabag Penguatan dan Pengawasan Pasar Lelang Komoditas, Sentot Kamaruddin, dari Bappebti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)

sebuah kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan petani dan memotivasi petani untuk lebih giat lagi menggarap lahan-lahan tidur yang selama ini diabaikan.

Pemerintah terus mencari akar masalah sektor pertanian Tapanuli Utara. Di antaranya ditemukan bahwa mata rantai tengkulak membuat petani putus asa karena hasil pertanian mereka sering dihargai sangat rendah. Harga di pasaran sering berada di bawah harga produksi sehingga petani malas menggarap lahan dan hampir mencapai titik putus asa.

Dari permasalahan itu, Pemerintah Tapanuli Utara berusaha membuat kebijakan dengan memikirkan bagaimana petani bisa menjual hasil pertaniannya dengan memotong mata rantai tengkulak. Akhirnya tercetuslah ide “pasar lelang”. Walaupun dengan tantangan yang berat dan dianggap mustahil, program ini harus berhasil. Kemudian Bupati Nikson membentuk tim pasar pelelangan hasil pertanian dengan komoditas pertama “cabai merah”. Ternyata program ini mendapat respons luar biasa. Masyarakat petani mendapat harga yang terbaik dengan kinerja tim yang tanpa pamrih, di mana tim langsung menyurvei harga terbaik di luar kota dan menetapkan harga dasar.

Petani mulai menggeliat, petani cabai mulai merasakan manfaatnya bertani. Hingga kini pasar lelang Tapanuli Utara menjadi “idola” bagi petani untuk mendapatkan harga terbaik. Tengkulak tidak berani lagi karena ada Perusahaan Daerah Pertanian yang mengadakan mereka untuk menjatuhkan harga. Salah satu pasar lelang yang terkenal di Tapanuli Utara adalah Pasar Lelang Siborongborong.

Prestasi kesuksesan mengadakan pasar lelang ini ternyata mendapat banyak apresiasi, baik lokal maupun nasional karena dianggap sukses menyelamatkan petani dari sistem ijon dan para tengkulak, dan tentunya lebih memberikan keuntungan dan kesejahteraan kepada para petani. Selain itu, sistem pasar lelang Tapanuli Utara ini akan diadopsi Bappebti Kementerian Perdagangan RI untuk diterapkan dalam pengembangan pasar lelang binaan Kemendag karena dinilai sangat komprehensif.



“
PROFIL TOKOH

Nama:

Nikson Nababan

TTL:

*Siborongborong,
05 Oktober 1972*

Jabatan:

*Bupati Tapanuli Utara
(2014–sekarang)*

“

◆ 10

MENYULAP BANTAENG MENJADI KABUPATEN BENIH BERBASIS TEKNOLOGI

Sebelum Nurdin Abdullah menjabat sebagai Bupati Bantaeng, wilayah Bantaeng dahulu masuk 169 daerah tertinggal di Indonesia. Persoalan paling mendasar adalah infrastruktur. Kalau ke pelosok, jalanannya buruk sekali. Semangat masyarakat untuk memacu pertanian selalu dihantui akses jalan. Lalu, masalah lainnya adalah air dan serangan hama. Ada 700 hektare lahan sawah di Bantaeng terkena tungro, belum saatnya berbuah sudah merah. Itu pemandangan yang hampir sama di berbagai desa. Yang lebih merepotkan adalah masalah banjir.

Pukul delapan malam suasananya sudah sangat sepi, bahkan mau makan saja harus jalan lumayan jauh. Namun, hanya berselang tiga tahun setelah dipimpin Nurdin (periode pertama, 2008–2013), Bantaeng berhasil mengentaskan diri dari posisi yang mengenaskan itu. Kini, Bantaeng siap bersinar sebagai pusat ekonomi di Sulawesi.

REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK BANTAENG: ASSESSMENT KEPALA DINAS

Bantaeng dengan permasalahan pertanian dan infrastruktur yang sangat minim mengharuskan keberadaan sumber daya manusia, khususnya pegawai negeri sipil, yang mumpuni dan kompeten dalam mengemban roda pemerintahan. Oleh sebab itu, langkah pertama yang dilakukan oleh Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, dalam melakukan pembangunan adalah mengadakan *assessment* kepala dinas. Pada saat itu, Nurdin sudah mengetahui betul berbagai masalah di Kabupaten Bantaeng sehingga dibutuhkan tim yang kuat dan mumpuni di bidangnya. Tentu Nurdin Abdullah harus tahu kekuatan SDM-nya seperti apa. Nurdin Abdullah tidak mengganti orang, tapi mewawancarai mereka untuk tahu kapasitas masing-masing, apakah orang ini sudah tepat atau belum. Bupati juga menjelaskan bahwa inilah tantangan kita ke depan, kita tidak bisa lagi hanya duduk mengerjakan hal rutin di rumah dan kantor.

Hal yang ditanamkan kepada kepala dinas pada saat awal-awal Bupati Nurdin menjabat adalah menjelaskan gambaran Bantaeng ke depan. Bupati menjelaskan bahwa kuncinya satu tahun, dua tahun kita masih bisa bergantung pada aktor, pada bupati, tetapi tahun ketiga kita harus bergantung pada sistem. Bantaeng harus membangun sistem dan manajemen yang kuat karena Bantaeng bukan daerah tambang, tapi daerah pertanian yang tidak bisa meningkatkan PAD secara cepat.

BANTAENG: KABUPATEN BENIH BERBASIS TEKNOLOGI

Tujuh puluh empat persen penduduk Bantaeng hidup dari sektor pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan, sedangkan kontributor pendapatan sektor pertanian Bantaeng sekitar 80%. Kondisi lahan pertanian yang sebenarnya produktif dengan berbagai karakternya tampaknya belum bisa mengubah Bantaeng menjadi daerah maju.

Terbukti hingga tahun 2008 Bantaeng masuk dalam daftar 199 kabupaten tertinggal di Indonesia di bawah binaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Akan tetapi, melalui tangan dingin Nurdin Abdullah, sejumlah program pertanian yang arahnya untuk peningkatan teknologi dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani senantiasa dihadirkan. Ia berhasil mengubah Bantaeng menjadi daerah maju dan menyabet berbagai penghargaan.



- ▶ *Bupati Nurdin Abdullah memperlihatkan hasil perkebunan di wilayahnya (Sumber: www.dream.co.id)*

Salah satu terobosan brilian yang sangat diapresiasi banyak kalangan adalah pengembangan benih berbasis teknologi. Pada 2012 lalu, Pemkab Bantaeng membuat satu terobosan baru dan besar untuk pertanian di Bantaeng. Anggaran sebesar Rp 2 miliar disiapkan untuk membeli bibit dari petani yang kemudian akan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Masing-masing SKPD punya fungsi dan peran dalam mengurai bibit tersebut. Pencetakan benih dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) melalui laboratorium kultur jaringan yang bekerja sama dengan Southeast Asian Regional Center For Tropical Biology (Seameo Biotrop). Bibit yang dihasilkan dari laboratorium itu tidak terputus, bahkan hampir semua daerah di Sulawesi Selatan berharap bibit unggul dari penguraian di Bantaeng.

Benih yang dikembangkan tersebut ada sekitar 23 varietas melalui hasil penangkaran, yakni jagung hibrid (URI21), jagung NA1 atau jagung jepang, cokelat, kentang, benih padi, serta talas. Hasil inovasi benih ini telah disebarluaskan ke daerah lain seperti seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Barat, Gunungsitoli di Sumatera Utara, Gunungkidul, Kabupaten Gorontalo, dan Gorontalo Utara. Dengan demikian, Bantaeng memang merupakan wilayah yang terkecil sehingga diharuskan ada nilai tambah. Sekarang, hal itu sudah terwujud.

Oleh karena itu, sejak 2009 Bantaeng mulai dicanangkan sebagai Kabupaten Benih. Kini, Bantaeng sudah melakukan pembibitan benih sendiri. Bawang, kentang, jagung, dan pupuk sudah tersedia. Air untuk instalasi ke kebun-kebun jauh lebih mudah. Dulu hanya menunggu hujan, kini kebutuhan air bisa diatur sepanjang tahun. Dulu di dataran rendah mereka menanam jagung dan juga menjualnya, kini mereka menjual benih. Dulu jagung dijual hanya Rp 2 ribu per kilogram, kini mereka menjual benih bisa mencapai Rp 50 ribu per kilogram. Begitu juga dengan padi, kini mereka sudah menjual benihnya. Produksi benih di Bantaeng kini mencapai lima ton dan semuanya merupakan benih unggulan.

Aspek pemasarannya melibatkan Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Produksi benih dari petani penangkar di Kabupaten Bantaeng saat ini telah banyak dimanfaatkan, baik oleh pe-



Bantaeng mengambil strategi bagaimana membangun kemandirian pangan dengan menjadikan Bantaeng sebagai daerah penyedia benih. Jadi, kami menyediakan segala macam benih karena Indonesia masih mengimpor sebagian besar benih. Artinya, kemandirian daerah ini harus betul-betul diperhatikan.

(Nurdin Abdullah)

tani di dalam maupun di luar Kabupaten Bantaeng. Pemanfaatan lokal telah mampu meningkatkan produksi pertanian rata-rata di atas 20%. Pesanan benih dari berbagai daerah terus mengalir ke Kabupaten Bantaeng, bahkan saat ini industri benih yang ada kewalahan memenuhi kebutuhan benih dari luar daerah. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng ini juga menarik banyak tenaga kerja. Para petani yang selama ini meninggalkan Kabupaten Bantaeng juga mulai kembali karena usaha-usaha di sektor pertanian sangat menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan.

Kemajuan pertanian Bantaeng di bawah komando Nurdin Abdullah kini berhasil memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan menopang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Data terakhir menunjukkan hasil pertanian di dataran rendah seperti benih jagung mencapai 11 ton per hektare dan benih cokelat mencapai 3,3 ton per hektare melalui regenerasi tanaman, sedangkan daerah dataran tinggi memanfaatkan pembenihan biji talas serta bawang merah untuk perencanaan komoditas ekspor.

BANTAENG INDUSTRIAL PARK

Siapa sangka daerah yang pada akhir 2008 masuk dalam daftar 199 kabupaten tertinggal di Indonesia di bawah binaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) kini sudah sangat jauh berbeda, sangat maju. Bahkan, saat ini Bantaeng memiliki Bantaeng Industrial Park (BIP). Kesuksesan membangun kawasan industri tersebut tentu karena pemanfaatan lahan yang sebenarnya tidak produktif di wilayah Bantaeng. Disebutkan bahwa Bantaeng terdiri dari delapan kecamatan, tujuh kecamatan memang sangat *visible* untuk pengembangan sektor pertanian, dan satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pajukukang merupakan daerah kering. Jadi, wilayah Bantaeng memang kecil tapi paripurna. Artinya, tidak hanya menjual bahan mentah tetapi juga bisa memetik, mengolah, dan menjualnya.

Kemudian, lahirlah konsep Pajukukang sebagai salah satu pengembangan kawasan industri Bantaeng. Namanya adalah Bantaeng Industrial Park. Sekarang di dalamnya sudah dibangun *smelter*.

Bantaeng Industrial Park (BIP) merupakan salah satu lokasi yang paling menarik untuk memulai bisnis baru di kawasan timur Indonesia. Ini adalah salah satu daerah industri yang paling berkembang pesat di Sulawesi dengan banyak industri yang sudah beroperasi penuh di bidang ini, termasuk bahan kimia, multimineral, dan lainnya. Di samping pasokan listriknya yang mandiri, BIP adalah kawasan industri terpadu yang sepenuhnya mendukung bisnis dengan akses jalan, pelabuhan, dan kereta api.

Selain itu, salah satu faktor utama kesuksesan Bantaeng menjadi kawasan industri dan tempat investasi adalah dukungan Pemda kepada investor dan perizinan dalam berbisnis. Bantaeng adalah kabupaten yang sangat ramah investasi. Izin satu jam selesai dan gratis, baik investor asing maupun dalam negeri. Bantaeng punya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pengusaha-pengusaha yang SIUP-nya akan berakhir akan dikirimkan perpanjangannya terlebih dulu satu bulan sebelumnya. Jadi, hal ini sangat ramah investasi. Mengapa Bantaeng ramah investasi? Karena pemerintahnya sangat terbuka. Kedua, adanya kepastian. Seperti kepastian berusaha, kepastian mendapatkan izin, dan kepastian mendapatkan keamanan. Jika ada yang ingin berinvestasi, pemerintah Bantaeng akan sangat peduli, artinya akan mem-*backup* sepenuhnya.

Nurdin juga seorang pemimpin yang revolusioner, yang selalu dapat mengubah sumber daya fisik dan nonfisik Bantaeng secara besar-besaran. Di bawah komandonya, Bantaeng berhasil membangun Bantaeng Industrial Park seluas 3.000 Ha tanpa pungutan sepeser pun untuk pernerbitan perizinan yang tak lebih dari satu jam atau *Free Licenses within one day one Stop Service*. Dengan demikian, megaproyek dari PMA Jepang yang berhasil menarik dana puluhan triliun rupiah tersebut berha-

sil menjadi roda raksasa dalam memutar perekonomian Bantaeng dan tentu saja membuka ribuan lapangan kerja baru.



► *Bantaeng Industrial Park (Sumber: bantaeng-industrialpark.com)*

KERJA SAMA DALAM MEWUJUDKAN FASILITAS UMUM BANTAENG

Pada 2008, dana APBD Bantaeng adalah yang terkecil se-Sulawesi Selatan. Awalnya Rp 281 miliar pada 2008, kemudian meningkat sekitar Rp 650 miliar pada 2015—tapi ini tetap terhitung paling kecil. Oleh sebab itu, untuk pengadaan fasilitas umum, Nurdin Abdullah harus memutar otak untuk mencari solusinya. Kunci kesuksesan dalam pengadaan fasilitas umum adalah kolaborasi dengan pihak dalam dan luar negeri.

Salah satu inovasinya di bidang kesehatan adalah “*mobile ambulance*” layanan kesehatan 24 jam. Kolaborasi berhasil mendatangkan ambulans dari pemerintah Jepang. Fasilitas ambulansnya cukup canggih dan

lengkap dengan alat pacu jantung, infus, oksigen, dan obat-obatan, termasuk fasilitas persalinan bagi ibu yang akan melahirkan. Dengan layanan ini, masyarakat Bantaeng yang sakit cukup menelepon nomor 113, dokter ataupun perawat akan hadir di rumah. Layanan kesehatan gratis ini melibatkan 20 dokter dan 24 perawat.

Saat ini sudah ada mobil ambulans yang berjumlah 12 unit (2016) dan akan bertambah lagi sembilan unit. Itu semua merupakan hibah dari Jepang, hasil kerja sama Pemkab Bantaeng dengan Toyota Jepang. Bupati menceritakan, “Ketika saya dilantik, mereka dari Toyota Jepang datang ke pelantikan saya. Mereka mengatakan, ‘Kami siap mem-*backup* Pak Nurdin.’”

Toyota merasa iba melihat Bantaeng yang dulu gelap, mobil pemadam kebakarannya tua, manual, dan sirenenya juga tidak bagus. Toyota lah yang membantu Bantaeng di tengah keterbatasan APBD, selain ambulans, juga mobil damkar, sekolah, mobil sampah, dan tempat tidur rumah sakit. Ini bisa dengan mudah kami terima pasti karena ada kepercayaan, integritas, dan paling penting juga bagaimana silaturahmi itu tetap terjaga dan terjalin. Itulah kuncinya.

“Selama delapan tahun memimpin, tabungan Nurdin saat bekerja di perusahaan Jepang terkikis cukup banyak. Tidak semua masalah solusinya bisa dari APBD yang minim. Nurdin tak segan merogoh kocek sendiri. Pada 2016, APBD Bantaeng adalah Rp 950 miliar, naik Rp 100 miliar dibandingkan tahun lalu.”

PARIWISATA BANTAENG PRIMADONA SULAWESI SELATAN

Gebrakan dan terobosan Pemkab Bantaeng ternyata tidak hanya di sektor pertanian dan kawasan industri, tapi juga sektor pariwisata tidak luput dari target inovasi dan gebrakan demi mewujudkan Bantaeng menjadi daerah pilihan wisata. Dulu pada 2008 penghasilan Bantaeng dari

sektor wisata hanya Rp 34 juta per tahun. Pada 2016 sudah mencapai Rp 3 miliar per tahun dari sektor pariwisata saja. Sangat luar biasa, kan?

Sebuah kawasan pantai yang kumuh tempat membuang sampah disulap menjadi kawasan pantai yang ada hotelnya, kawasan wisata, ekowisata, *jogging track*, dan kawasan memancing. Padahal awalnya tidak ada apa-apanya. Dulu, kawasan itu penuh tumpukan sampah, lalu dibersihkan, digali pasirnya, dan ternyata ada pasir putih. Sungaiinya dulu gersang, kemudian ditanami bakau, dan hasilnya bagus. Selain itu, Bantaeng terus menggali potensi yang ada, yaitu dua air terjun, pemandian alam, juga Marina Beach Korong Batu (Pantai Marina) yang dulu namanya Pantai Korong Batu dan sekarang jadi kawasan wisata yang terus dorong untuk berkembang.



- ▶ *Pesona Keindahan Marina Beach Korong Batu (Sumber: www.tribunnews.com)*

Destinasi wisata yang juga lagi *booming* sekarang adalah Pantai Marina, yang dulu hanya alang-alang kini dibangun dengan sistem yang terintegrasi. Semua SKPD bertanggung jawab. PU bertanggung jawab membangun jalan, Dinas Pariwisata bertanggung jawab untuk gazebo, Dinas Perikanan bertanggung jawab pada tempat mancingnya, dan un-

tuk sosial menjadi tanggung jawab BLK (Balai Latihan Kerja). Pantai Marina ini menjadi salah satu ikon dan destinasi unggulan di Sulawesi Selatan.



11

NTB DAN KESUKSESAN PEMBERDAYAAN BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN

"Makanya dulu NTB banyak pelesetan seperti Nasib Tidak Baik, Nasib Tergantung Bali. Tapi alhamdulillah, sekarang sudah berubah, ternyata (NTB) adalah Nasib Telah Baik, Nasib Telah Berkah, dan sebagainya."

—M. Zainul Majdi, Gubernur NTB
(nasional.sindonews.com)

Tidak heran bila masyarakat NTB dulu sering mengatakan bahwa NTB bernasib tidak baik atau tergantung Bali. Maksudnya, kondisi pariwisata di NTB bukan menjadi pilihan utama bagi para wisatawan. Kebanyakan para wisatawan lebih memilih Bali, lalu kemudian melipir ke NTB sebentar atau bahkan tidak sama sekali. Jadi, pendapatan masyarakat dari kunjungan wisatawan sering disebut bernasib tidak baik. Sebenarnya, itu terjadi karena banyak faktor. Di antaranya adalah akses menuju NTB dan sarana dan prasarana NTB yang belum mendukung saat itu sehingga kekayaan alam yang indah di NTB menjadi sulit diakses para pelancong.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa, dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km², terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km² (59,13%). Mata pencaharian penduduk NTB sebagian besar ada pada sektor pertanian dalam arti luas, kemudian sektor perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga.

Dengan kondisi sosial masyarakat seperti itu, NTB dahulu sebenarnya memiliki permasalahan yang begitu kompleks selain masalah dalam pengembangan sektor pariwisata, yaitu sektor pertanian dan peternakan, yang pada dasarnya berujung kepada tingkat kesejahteraan masyarakat NTB. Tak hanya itu, masalah pelayanan publik dengan kondisi wilayah yang belum terkoneksi satu sama lain juga menjadi tambahan pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi.



► *Kunjungan Kerja Gubernur NTB (Tuan Guru Bajang) ke Wilayah Batu Layar, Lombok Barat. (Sumber: www.suararevolusi.com)*

Kini, NTB berada di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Zainul Majdi berhasil melakukan berbagai revolusi pelayanan publik

dalam mengatur roda pemerintahan. Demi mengubah pelayanan publik yang jauh dari kata maksimal tersebut, Pemprov NTB mempunyai program PIN, singkatan dari Percepatan Inovasi dan Nilai Tambah. Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengatakan bahwa semua program SKPD harus mengandung PIN. Pemprov mewajibkan SKPD harus memiliki inovasi yang mengandung PIN dan dijalankan serta dievaluasi setiap ada kesempatan.

Alhasil, berbagai masalah NTB berhasil diselesaikan, bahkan sukses melakukan percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat NTB. PIN ala Dinas Pertanian, misalnya, sejak 2008 menetapkan jagung sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Kebijakan strategis tersebut diikuti dengan merumuskan cetak biru (*blueprint*) pengembangan agro-bisnis jagung. Selain itu, NTB juga sukses melakukan pembangunan pariwisata menuju *eco-green*, *sport*, dan *halal tourism*.

REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK NTB NTB INOV

Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan dan menumbuhkembangkan inovasi pelayanan publik, Gubernur Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi mewajibkan semua SKPD lingkup Pemprov NTB membuat inovasi di unit kerjanya. Langkah itu awalnya dipicu keprihatinan atas kurangnya kreativitas yang dilakukan para PNS di wilayahnya. Menurut Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Tribudi Prayitno M.Si., “Gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor: 060568 tanggal 22 Juni 2016 yang mengatur pedoman inovasi pelayanan publik SKPD lingkup Pemprov NTB.” Setiap SKPD harus membuat minimal satu inovasi guna menindaklanjuti keputusan gubernur itu.

Program itu dirasa cukup berhasil dalam mengangkat prestasi NTB di kancah nasional. Dengan adanya kebijakan itu, seluruh SKPD Pemprov NTB diharuskan menyiapkan anggaran mereka untuk inovasi.

Berbagai inovasi NTB telah dilaksanakan, baik sebelum program NTB Inov maupun sesudahnya, khususnya dalam bidang pariwisata, perencanaan pembangunan daerah, informasi teknologi berbasis komunitas, pengelolaan arsip dan penemuan kembali dalam waktu 3 menit, dan peningkatan kualitas anak sekolah. Semuanya telah berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional.

Program yang lahir dari SKPD antara lain Kewirausahaan Pemuda dari Dinas Pemuda dan Olahraga NTB. Kelompok-kelompok wirausaha muda ini berjumlah 15 kelompok yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB. Sasarannya adalah pemuda berusia 16–30 tahun sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Adapun inovasi dari Dinas Perindustrian adalah Peningkatan Daya Saing dan Pelayanan Kemasan Produk Unggulan Daerah. Inovasi ini menargetkan 10 komoditas produk unggulan daerah seperti gula aren/gula semut, kopi bubuk, permen susu, madu, susu kuda liar, emping jagung, sandang, bandeng presto, garam, dan terasi dan dengan target 100 IKM (Industri Kecil Menengah).

KAMPUNG MEDIA

Program Kampung Media merupakan program terobosan Pemerintah Provinsi NTB yang mendorong penyebarluasan informasi berbasis komunitas, yang berlandaskan pada kekuatan jurnalisme warga yang tersebar di enam kabupaten/kota di wilayah NTB. Komunitas ini mengusung semangat: “Sampaikan Informasi Bermanfaat meski Satu Kalimat”. Pengaruh atau dampak kampung media terhadap kehidupan sebuah komunitas adalah menimbulkan geliat untuk terus berkreasi sehingga mendekati warga dengan informasi dan teknologi yang bermanfaat dan bermartabat.

Kampung media mendapat respons positif dari pemerintah pusat dan kalangan media nasional. Pemerintah pusat dengan program 100 Ribu Internet Masuk Desa melalui program Pusat Layanan Internet Keca-

matan (PLIK) dari Kementerian Kominfo RI memercayakan pengelolannya kepada komunitas Kampung Media, karena dinilai sebagai model yang menarik di daerah. Kampung Media mendapatkan penghargaan sebagai 9TOP (*Nine Top*) Inovasi Tingkat Nasional Tahun 2014 dari KemenPANRB dalam bidang Pelayanan Publik, sebelumnya 5 Desember 2011 program Kampung Media mendapatkan anugerah *Universal Service Obligation* atau *USO Award* dari Kementerian Kominfo RI.

LUMBUNG BERSAING

Di antara banyak terobosan dan gebrakan untuk menurunkan angka kemiskinan di NTB, ada program bernama Lumbung Bersaing. Ini adalah sebuah model pemberdayaan yang menysasar kelompok masyarakat berbasis ibu-ibu majelis taklim atau pengajian. Praktik yang digunakan mengadopsi model Grameen Bank di Bangladesh.

Di NTB lembaga yang bertanggung jawab akan program tersebut adalah Baitut Tamkin atau Rumah Pemberdayaan. Bentuknya adalah praktik keuangan mikro berbasis syariah disertai pembangunan karakter keluarga melalui penguatan kelompok. Bisa dipastikan tidak akan ada rentenir di dalam praktiknya. Pada dasarnya program Lumbung Bersaing dengan metode Baitut Tamkin merupakan hasil penyempurnaan dari program yang dicetuskan pakar ekonomi syariah terkemuka di Indonesia, Syafii Antonio.

Dengan diterapkannya Baitut Tamkin Lumbung Bersaing, selain untuk pengentasan kemiskinan masyarakat, ternyata program ini juga sukses mengubah perilaku masyarakat secara signifikan. Masyarakat NTB bisa melatih tanggung jawab atas pinjaman, menumbuhkan budaya menabung, dan berdonasi kepada anggotanya.

Dana bergulir yang digerakkan dalam program besutan Gubernur NTB ini kemudian digunakan untuk mendirikan koperasi syariah Baitut Tamkin Lumbung Bersaing pada 2014. Kemajuannya sangat pesat, yang semula hanya sebesar Rp 6 miliar, kini sudah bernilai Rp 38 miliar dan menjangkau pemberdayaan sebanyak 5.992 anggotanya.

NTB BUMI SEJUTA SAPI (BSS)

Bermula dari besarnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, Pemprov Nusa Tenggara Barat mencanangkan program terobosan “NTB Bumi Sejuta Sapi” (BSS). Program terobosan ini dirumuskan sebagai upaya mengikhtiarkan visi pemerintah NTB pada masa amanah 2009–2013 untuk mewujudkan masyarakat NTB yang Beriman dan Berdaya Saing (BerSaing).

Di samping besarnya potensi lahan dan pakan ternak yang dimiliki—lahan pakan seluas 1.690.156 hektare dan daya tampung ternak mencapai 1.370.258 unit kandang—sejarah dan kultur budaya masyarakat NTB yang memiliki peradaban beternak tinggi pun turut mendukung pengembangan ternak sapi.



► *Ilustrasi ternak sapi. (Sumber: www.kompasiana.com)*

Namun, kendala yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat miskin di NTB, yang umumnya bekerja sebagai buruh tani atau petani tanpa lahan, terutama yang berada di Pulau Lombok, adalah akses per-

modalan yang sulit dan kemampuan bantuan pemerintah yang terbatas sehingga tidak semua dari mereka bisa memiliki ternak sapi.

Oleh karena itu, strategi yang dilakukan untuk mengembangkan potensi peternakan sapi ini adalah dengan memelihara sapi melalui sistem kandang kolektif untuk Pulau Lombok dan pola padang penggembalaan atau *larso* di Pulau Sumbawa.

Sampai dengan pertengahan 2010, terdapat sekitar 880 unit kandang kolektif sapi di Pulau Lombok dari target 1.000 unit kandang kolektif pada 2013. Tiap unit kandang kolektif ini mampu menampung mulai dari 75 ekor sampai 350 ekor dengan melibatkan sekitar 18 ribu petani peternak yang rata-rata memiliki 3–5 ekor sapi.

Memasuki tahun ketiga program Bumi Sejuta Sapi, pemerintah daerah menggelontorkan dana bergulir sebagai wujud percepatan pencapaian target. Program ini diharapkan tidak saja mendorong percepatan peningkatan populasi ternak sapi, tetapi juga mampu mengentaskan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat melalui program NTB BSS pada 2009 mencapai 252 kelompok peternak dengan nilai Rp 30,308 miliar yang bersumber dari APBDP sebesar Rp 4,545 miliar dan APBN sebesar Rp 25,480 miliar. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan petani peternak untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 4.351 ekor, 27 unit stimulan kandang kelompok, rekrutmen 50 orang sarjana membangun desa (SMD) peternakan, LM3 sebanyak 10 pesantren, dan 8 unit pengembangan unit lokasi inseminasi buatan (IB).

SUKSES DENGAN WISATA HALAL KELAS DUNIA

Kemiskinan masih menjadi momok besar di NTB. Kalau dari sudut kinerja penanggulangan kemiskinan, prestasi NTB patut diapresiasi. Penurunan kemiskinan setiap tahun yang rata-rata 1,4% sejak 2009 itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh provinsi lainnya di Indonesia.

Atas prestasi itu, NTB mendapatkan penghargaan bergengsi, yaitu Millennium Development Goals (MDGs) Award pada 2012. MDGs adalah program dunia yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk penanggulangan kemiskinan global. Selain MDGs Award, pemerintah NTB menerima banyak penghargaan bergengsi lainnya dalam kurun lima tahun ini.

Salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor pariwisata. Pariwisata Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, bagaikan “gadis manis” yang kian merampas perhatian orang. Setelah mengundang wisatawan memandangi kecantikannya melalui panorama alam pantai, Lombok kini “dirias wajah”-nya dengan model baru yang inovatif, yaitu wisata halal. Itu menyusul dikukuhkannya Lombok sebagai *World Best Halal Tourism Destination* dan *World Best Halal Honeymoon Destination* dalam ajang *The World Halal Travel Summit/Exhibition* yang diumumkan di Uni Emirat Arab pada Februari 2015.



► Potret keindahan Gili Laya di wilayah Lombok Barat.
(Sumber: www.republika.co.id)

Dengan semakin bergeliatnya wisata di NTB, semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat setempat yang ditandai dengan menjamurnya UMKM serta penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak.

Selama 2014–2015, MUI NTB mengeluarkan 145 sertifikat halal bagi restoran, rumah makan, serta produk makanan usaha kecil dan menengah yang ditangani Dinas Koperasi NTB, lalu 30 UKM yang ditangani Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB dan 100 sertifikat halal diberikan kepada hotel, restoran, katering, dan rumah makan.

Tahun 2016 sertifikat halal diberikan kepada 150 UKM dan 350 hotel, restoran, katering, dan rumah makan. Jumlah yang mendapat sertifikat halal itu baru sebagian kecil dibandingkan jumlah hotel dan restoran yang berada di NTB: tahun 2014 tercatat 941 hotel meliputi 50 hotel bintang satu hingga lima (3.072 kamar), 891 hotel nonbintang (9.015 kamar), dan 1.379 restoran/rumah makan.

SMS CENTER

SMS Center Gubernur NTB ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat secara luas sejak dimulainya masa jabatan pemimpin BARU (Bajang-Badrul). Bajang-Badrul (BARU) adalah singkatan populer Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2008–2013 pada masa pemilukada di NTB pada akhir 2008. Ide awal inovasi *e-Gov* ini adalah sulitnya pemerintah Provinsi NTB untuk mengakses aspirasi dari masyarakat terkait kebijakan yang secara khusus berkaitan langsung dengan Pemprov NTB.

Memang secara konstitusional aspirasi masyarakat dapat disampaikan pada DPRD atau Pemda setempat, tetapi jika aksesnya bisa lebih mudah, murah, dan hemat waktu, tentu penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif. Lagi pula logika dasar dicetuskannya ide SMS Center Gubernur NTB ini adalah hasil survei yang dilakukan XL bahwa 90% masyarakat NTB menggunakan *handphone* dan SMS menjadi salah satu layanan terbanyak yang digunakan masyarakat NTB. Sesuai

dengan hasil tersebut, Pemprov NTB menilai bahwa penggunaan sistem SMS Gateway sebagai basis dari inovasi ini harus dilakukan. Dengan demikian, masyarakat akan dengan mudah menyampaikan aspirasinya, baik berupa pertanyaan, saran, kritik, informasi, maupun masukan bagi Pemprov NTB.

Selain itu, dengan SMS, masyarakat juga tidak perlu datang ke kantor pemerintahan terdekat dan juga tidak perlu takut untuk menyampaikan aspirasi karena telah dijamin keamanannya. Hal ini terbukti: setiap SMS yang masuk dikelola dan diklasifikasi dengan baik oleh PDE dan dipublikasikan pada situs resmi Pemprov NTB dengan menyensor tujuh hingga delapan digit nomor pengirim. Mekanisme yang berlaku adalah setelah diterima oleh operator, pesan akan diklasifikasi sesuai isinya dan diteruskan pada instansi terkait jika berkaitan dengan kebijakan dari instansi masing-masing. Jawaban yang diberikan oleh operator pun minimal 3 sampai 4 hari jika informasi yang dibutuhkan masyarakat bersifat suatu masalah yang perlu dicek kebenarannya.

Perjalanan inovasi ini tentu bukan tanpa hambatan. Pada awal penerapannya, hanya sedikit masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini, yakni sekitar kurang dari seribu. Namun, mulai akhir 2009 menjelang 2010, partisipasi masyarakat meningkat hingga sepuluh kali lipat, yakni sekitar sepuluh hingga sebelas ribu SMS yang masuk dengan nomor yang berbeda. Memang, jumlah ini masih sangat jauh dari jumlah masyarakat NTB.

Namun, bukan berarti dengan jumlah partisipasi yang belum dapat dikatakan meningkat kemudian dianggap program ini tidak berhasil atau bahkan tidak baik. Justru sebaliknya, SMS Center Gubernur NTB ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi Pemprov, tetapi juga bagi masyarakat NTB. Hal ini terbukti dari beberapa informasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait masalah kebijakan.

Sebagai contoh, pada awal Januari 2013, atas inovasi *e-Gov* yaitu SMS Center Gubernur, masyarakat di Kabupaten Dompu memanfaatkan layanan ini untuk memberikan informasi kepada pemerintah bah-

wa terjadi kelangkaan pupuk subsidi di daerahnya. Secara cermat dan cepat operator meneruskan pesan ini kepada Gubernur dan setelah itu orang nomor satu di NTB ini menginstruksikan pejabat terkait untuk meninjau langsung lokasi agar segera diketahui letak permasalahannya. Tak lama setelah peninjauan tersebut, kemudian dicarikan solusi terbaik dan pada akhirnya persoalan kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Dompu dapat diselesaikan dengan baik. Tentu hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses masyarakat memberikan informasi melalui *e-Gov*, yakni SMS Center Gubernur NTB.



◆ 12

PROGRAM PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU UNTUK PENDIDIKAN JAWA BARAT

Permintaan masyarakat akan kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka menjadi sangat kompleks pada akhir-akhir ini sehingga mengharuskan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, melakukan berbagai pembaruan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah akan semakin dirasakan oleh masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, membawa semangat pembaruan dan inovasi tata kelola pemerintahan. Tentunya hal ini juga menjadi komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mengakselerasi pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah Jawa Barat, yakni “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia” (RP.JPD 2005–2025).

Dalam tataran praktiknya, Pemprov Jawa Barat mencetuskan tiga inovasi pelayanan publik yang kemudian dijadikan *pilot project* pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh KPK. Hal ini menjadi energi perubahan bagi Pemprov Jabar guna mengembangkan inovasi-inovasi lainnya menjadi lebih baik lagi. Pemprov Jabar juga

tampak berbangga hati karena aplikasi elektronik berbasis daring yang diterapkan pihaknya telah diadopsi daerah lain.



► Foto Gedung Sate (Sumber: *republika.co.id*)

Terciptanya program ini dilatarbelakangi oleh komitmen Pemprov Jabar dalam rangka menghadirkan proses perizinan yang akuntabel (dipertimbangkan secara matang dan menyeluruh/melibatkan berbagai instansi terkait), sederhana (tidak menambah prosedur dan syarat yang tidak perlu), mempunyai kepastian waktu dan kejelasan prosedur, memiliki standar pelayanan perizinan, serta memenuhi unsur transparansi atas layanan yang dilakukan. Dengan hal itu, masyarakat akan merasa lebih mudah dan efisien dalam hal urusan pelayanan.

Tiga inovasi yang diadopsi itu adalah aplikasi peningkatan pelayanan perizinan melalui program Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik (SIMPATIK), manajemen kepegawaian melalui sistem Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan pendapatan daerah melalui *e-Samsat*. Inovasi tersebut sudah dikembangkan dari 2012 dan secara resmi dapat diaplikasikan pada 2014 dengan diterbitkannya Peraturan

Gubernur Jawa Barat No. 92 Tahun 2014 tentang Juklak Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Inovasi pertama, yakni SIMPATIK, merupakan bentuk aplikasi komitmen pemerintah dalam rangka menghadirkan proses perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sederhana, serta mempunyai kepastian waktu dan kejelasan prosedur. Aplikasi tersebut tidak berbayar sehingga dapat dibagikan kepada seluruh instansi PTSP dan dikembangkan sesuai kebutuhan instansi tersebut.

Keunggulan aplikasi SIMPATIK ini adalah pendaftaran permohonan perizinan yang dapat dilakukan secara *online*, *e-tracking* terhadap status perizinan sudah sampai di mana, fasilitas pengaduan *online*, integrasi portal dan *back-office*, serta *open-source* program. Hal ini tentu sangat memudahkan masyarakat dalam hal urusan pelayanan publik sehingga kesan pengurusan administrasi dan perizinan sudah bukan sesuatu yang ribet dan menyusahkan.

Inovasi kedua adalah TPP. TPP dilaksanakan sebagai salah satu langkah menuju pengelolaan kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif, dan Kreatif (BAIK). Inovasi ini sudah ada sejak 2009. Pihak Pemprov Jabar telah mengembangkan transformasi honorarium sebagai sistem Tambahan Penghasilan PNS (TPP) melalui sistem pengukuran kinerja daring. Gubernur Aher mengklaim, evaluasi penerapan inovasi ini mampu membuat manajemen kepegawaian lebih baik. Evaluasi atas penerapan sistem TPP ini telah menunjukkan tren manajemen kepegawaian yang baik, di antaranya orientasi aparatur dalam bekerja adalah kinerja, sesuai dengan tugas jabatan, bekerja secara terencana, disiplin, dan fokus pelayanan untuk kinerja.

Inovasi ketiga ialah *e-Samsat* yang telah diluncurkan sejak November 2014. Program *e-Samsat* diluncurkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak sewaktu membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Berbagai capaian positif dari aplikasi ini adalah wajib pajak bisa lebih tertib dalam hal administrasi pajak kendar-

an bermotor, bahkan menghilangkan praktik percaloan dan pungli. Ini juga bisa meningkatkan pendapatan daerah dalam sektor penerimaan PKB.



- ▶ *Ilustrasi e-Samsat. Inovasi ini ikut berperan serta dalam meningkatkan pendapatan daerah. (Sumber: metrotvnews.com)*

Inovasi *e-Samsat* ini menunjukkan kenaikan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan total pendapatan daerah provinsi dari sektor pajak (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Permukaan Air, dan Pajak Pokok) antara tahun 2014 sebelum implementasi aplikasi sampai tahun 2015 setelah implementasi aplikasi. Pada 2014, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 4,9 triliun, sementara pada 2015 terjadi peningkatan hingga mencapai Rp 5,3 triliun. Total pendapatan daerah provinsi dari sektor pajak (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Permukaan Air, dan Pajak Pokok) pada 2014 adalah sebesar Rp 13,7 triliun dan meningkat pada 2015 hingga mencapai Rp 14,6 triliun.

PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

Provinsi Jawa Barat pada 2017 membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB) hingga 5.000 untuk sekolah tingkat SMA/SMK se-Jawa Barat. Ada sekitar 170.000 orang siswa/siswi SMP dari seluruh Jawa Barat yang tidak bisa mengenyam bangku SMA/SMK karena kurangnya ruang kelas. Kebutuhan ruang kelas baru itu untuk memenuhi para lulusan SMP agar dapat tertampung sehingga taraf pendidikannya meningkat. Pemerintah Jawa Barat melakukan itu untuk membuka seluas-luasnya akses pendidikan masyarakat dan memutus mata rantai *drop-out*. Untuk menyukseskan hal itu, Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan tahun 2017 sebesar Rp 1,6 triliun, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp 600 miliar.



► *Ilustrasi pembangunan ruang kelas baru (Sumber: balikpapantoday.net)*

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, apabila 5.000 ruang kelas baru ini bisa terealisasi, jumlah siswa/siswi SMP yang bisa ditampung adalah 150.000. Selain upaya pembangunan RKB, Pemprov Jawa Barat juga akan mendorong pengembangan SMA Terbuka yang bisa menampung 100.000 peserta didik per tahunnya serta bekerja sama

dengan pondok pesantren. Dengan demikian, pada akhirnya Jabar akan mewujudkan SDM Jabar yang unggul dan berakhlak kuat, tapi tidak radikal. Memiliki jiwa nasionalisme kuat, tetapi tidak ekstrem. Menguasai sains teknologi secara *kaffah* atau untuk menunjang kemandirian. Terlatih berjiwa *entrepreneur* atau ikut gerakan wirausaha untuk menjadi pelaku-pelaku usaha.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemprov Jawa Barat melalui program pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) SMA, MA, dan SMK (swasta) telah membangun 16.000 ruang kelas baru di Jawa Barat. Setiap tahunnya Pemprov Jabar menargetkan pembangunan 4.000 ruang kelas baru. Hingga akhir 2016 ini, total 16.000 ruang kelas baru telah dibangun oleh Pemprov Jabar.

Tak hanya itu. Sejak 2014, Pemprov Jabar telah membangun 625 ruang kelas baru dan merehabilitasi 98 ruang kelas SD/Mi dan SMP/MTs di 27 kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp 1,743 miliar dan terealisasi Rp 1,53 miliar (87,80%). Program pembangunan RKN ini senantiasa terus konsisten hingga tahun 2016. Berkat kepedulian dan tanggung jawab pemerintah Jawa Barat dalam bidang pendidikan ini, akhirnya Gubernur Aher mendapatkan penghargaan nasional: Kepala Daerah Inovatif 2016 dalam bidang Pendidikan.

“
PROFIL TOKOH

Nama:

Ahmad Heryawan

TTL:

Sukabumi, 19 Juni 1966

Jabatan:

Gubernur Jawa Barat

(2008–2018)

“



◆ 13

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA RUANG PUBLIK KOTA BOGOR

Kota Bogor kadang dijuluki dengan Kota Sejuta Angkot, kadang juga disebut dengan Kota Hujan. Dua-duanya tidak salah. Kota Sejuta Angkot merupakan sebuah julukan untuk mendeskripsikan Bogor yang penuh dengan angkot, bahkan jalanan macet disebabkan angkot yang melimpah ruah di jalanan Kota Bogor. Tak heran masyarakat Bogor sering mengeluh akan kondisi kemacetan ini. Adapun sebutan Kota Hujan memang pas karena faktanya Bogor dikenal sebagai daerah yang sering hujan, bahkan sampai tidak mengenal musim kemarau.

Di samping itu, Bogor memiliki masalah dengan penataan ruang publik. Prasarana pedestrian jalan utama yang minim, kondisi taman-taman kota yang tidak terurus, menjamurnya PKL di sepanjang pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan jalan Kota Bogor semakin panjang, dan sebagainya. Terakhir adalah masalah pelayanan publik di dinas-dinas yang dirasa masyarakat terlalu berbelit. Dengan kondisi pelayanan yang masih susah itu, tentu masyarakat jadi malas untuk berurusan dengan birokrasi Kota Bogor.

Sederet permasalahan Bogor itu kini satu per satu mulai diselesaikan oleh Pemkot Bogor. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bima Arya,

Bogor berupaya menuntaskan berbagai masalah yang sudah turun-temurun tersebut. Berbagai langkah inovasi dan terobosan kebijakan diterapkan Pemkot Bogor untuk membangun Bogor yang lebih baik.



► *Ilustrasi kemacetan (Sumber: www.wovgo.com)*

Salah satu langkah konkret yang diambil Pemkot Bogor dalam mengubah wajah Bogor adalah melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat. Menurut Bima Arya, reformasi birokrasi adalah hal yang penting, di mana perizinan adalah jantung utama dari reformasi birokrasi.

Banyak langkah yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor sebagai reformasi birokrasi. Bagi para pemilik usaha dan pemohon izin, kepastian menjadi hal yang mutlak dibutuhkan. Kepastian tersebut dilihat, baik dari segi waktu maupun jumlah yang harus dibayarkan. Mempertimbangkan hal itu, pemerintah Kota Bogor melakukan inisiasi pengembangan proses perizinan dalam jaringan atau daring (*online*).

Langkah reformasi birokrasi yang diterapkan di antaranya adalah sistem pajak *online*, yaitu pengurusan izin secara *online* yang prosesnya dapat dipantau sampai mana dan dilengkapi dengan SMS Gateway. Dengan inovasi ini dipastikan akan menutup celah pencaloan. *One Day Service* (ODS) yang dijalankan sejak 2015 telah terkoneksi langsung dengan kantor pajak, demikian juga dengan *Taping Box*. Reformasi perizinan yang dijalankan Kota Bogor ini mendapat apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menunjuk DPMPTSP Kota Bogor sebagai percontohan nasional.

Pelayanan perizinan *online* merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 serta visi Pemerintah Kota Bogor untuk menjadikan Bogor sebagai kota cerdas berwawasan teknologi informasi komunikasi. Peluncuran pelayanan perizinan secara daring ini diapresiasi oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, sebagai salah satu perwujudan zona integritas menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Proses perizinan yang sederhana, mudah, murah, akuntabel, dan singkat adalah keharusan jika sebuah kota ingin punya daya kompetisi dengan kota lainnya, terlebih dalam menarik minat investor.

Sepanjang 2014, BPPT-PM Kota Bogor telah menerbitkan izin sebanyak 8.589 perizinan dan non-perizinan. Dari jumlah tersebut, mayoritas didominasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, BPPT-PM Kota Bogor juga telah menyelesaikan 36 pengaduan.

Pemanfaatan teknologi juga diaplikasikan dalam Bogor Green Room (BGR) sebagai *command center* yang terhubung dengan CCTV pantauan lalu lintas. Di bidang pendidikan, sejak 2014 penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara *online*.

Tak hanya itu, bagi warga Bogor yang ingin menyampaikan aduan atau keluhan telah disediakan Pengaduan Online dan sejak Maret 2016 Pemkot Bogor pun telah meluncurkan nomor panggilan sistem 112 untuk panggilan darurat bencana hingga Kekerasan dalam Rumah Tangga

(KDRT). Untuk merespons keluhan warga agar lebih cepat, Bima meminta semua OPD menyediakan juru bicara digital (media sosial).

REFORMASI TATA RUANG PUBLIK KOTA BOGOR

Permasalahan tata ruang publik yang sempit tidak terurus dan memprihatinkan kini mulai mendapat perhatian serius. Pemkot terus berupaya menata wajah Kota Bogor melalui tata ruang publik sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Kesuksesan tersebut dibuktikan oleh Pemkot Bogor dengan hasil bahwa saat ini panjang jalan utama pedestrian meningkat hampir 200%. Secara keseluruhan, panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya termasuk pelebaran prasarana pedestrian telah mencapai 8,231 km atau 169,57% dari target 4,854 km. Pembangunan pedestrian, terutama di lingkaran Kebun Raya Bogor (KRB), telah menarik minat masyarakat untuk menikmatinya. Pada hari libur pukul 07.00–08.00 tercatat sedikitnya sekitar 3.700 warga yang melakukan berbagai aktivitas di sekitar area itu.

Pembangunan dan revitalisasi pedestrian itu merupakan bagian dari upaya Pemkot Bogor dalam program penataan ruang publik, pedestrian, taman, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang termasuk ke dalam enam skala prioritas Pemkot. Hal itu terungkap dalam pemaparan terbuka Wali Kota Bima Arya saat digelarnya Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Bima-Usmar di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Jumat (7/4) malam.

Tahun 2016 menjadi tahun yang penting dalam penataan ruang publik di Kota Bogor. Ada beberapa pekerjaan besar yang telah dilakukan untuk terus mendorong perubahan bagi Bogor sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki (*walkable city*) dan kota yang membuat para warganya nyaman untuk berinteraksi sosial. Pembangunan pedestrian dan jalur sepeda di seputar Kebun Raya Bogor adalah salah satunya. Jalur ini telah menjadi destinasi favorit bagi warga untuk berolahraga setiap hari

pada waktu pagi atau sore hari. Penyelesaian pembangunan jalur pedestrian ini telah memperpanjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun yang telah mencapai 4,734 km atau 101,33% dari target 4,672 km.



► Potret kegembiraan warga bersama Wali Kota Bogor saat peresmian Lapangan Sempur, Bogor (Sumber: bogortoday.com)

Selain pembangunan pedestrian dan jalur sepeda di sekitar Kebun Raya, pencapaian pada pembangunan pedestrian dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan seperti peningkatan trotoar Jalan Heulang dan Jalan Ahmad Sobana, peningkatan trotoar Pulo Empang, perbaikan trotoar seputar alun-alun Empang dan Jalan Cikaret, peningkatan trotoar Jalan Saleh Danasasmita, perbaikan trotoar Jalan Aria Suryawinata, peningkatan trotoar Jalan Malabar, Jalan Brigjen Saptaji, Jalan Sudirman, dan sekitar Sempur, serta peningkatan trotoar Jalan Sindang Barang Loji.

Di sisi lain, semangat menata tata ruang publik juga diwujudkan dengan merevitalisasi Lapangan Sempur dengan konsep baru sebagai taman yang bertemakan rekreasi keluarga dan olahraga. Sejak awal tahun ini, warga sudah bisa melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi keluarga. Taman Sempur, menurut Bima Arya, adalah satu dari empat taman kota yang baru dibangun pada 2016. Taman yang lain adalah Taman Matematika dan Taman Calincing di Kelurahan Tegal Gundil, Ke-

camatan Bogor Utara yang bertemakan taman lingkungan atau taman kekerabatan, dan Taman Kaulinan di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah yang bertemakan permainan tradisional anak-anak. Selain sebagai sarana berolahraga, taman-taman yang dibangun itu juga bertujuan sebagai tempat untuk berinteraksi. Anak-anak menikmati permainan dan antarwarga saling menyapa. Taman juga merupakan oksigen jiwa.



“
PROFIL TOKOH

Nama:

Bima Arya Sugiarto

TTL:

Bogor, 17 Desember 1972

Jabatan:

*Wali Kota
(2014–sekarang)*

“



◆ 14

SATRYA EMAS: PROGRAM KLINIK EKONOMI UNTUK UMKM PASURUAN

Kabupaten Pasuruan dulu bukanlah sebuah daerah yang terkenal dan diperhitungkan. Kabupaten Pasuruan hanya dikenal sebagai daerah perlintasan dari Surabaya menuju Banyuwangi atau Malang. Akan tetapi, Kabupaten Pasuruan merupakan kawasan yang strategis dengan berbagai keindahan alamnya. Meskipun menjadi kawasan yang strategis, Pemkab Pasuruan tidak terobsesi membangun proyek mercusuar. Bahkan, Pemkab lebih memprioritaskan melahirkan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM).

Produk-produk lokal Pasuruan pun didorong untuk maju dengan berbagai fasilitas dan insentif. Hasilnya pun sudah bisa dirasakan masyarakat. Kesejahteraan semakin meningkat dan geliat ekonomi semakin hidup dan mengalir. Pemkab pun mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dalam bentuk Baksyacaraka Award. Penghargaan dari Menko Kesra di era Agung Laksono itu diberikan kepada Pasuruan sebagai kabupaten terbaik se-Indonesia dalam mendorong budaya kreatif masyarakat. Tak hanya itu, seabrek penghargaan lain juga diraih Bupati Pasuruan, H.M. Irsyad Yusuf, S.E., M.MA atau yang lebih dikenal de-

ngan panggilan Gus Irsyad, dalam 2017 ini, di antaranya adalah Kepala Daerah Inspiratif 2017 versi *SINDO Weekly* sekaligus menerima Satrya Lancana Pembangunan tahun 2017 dari Presiden Joko Widodo atas jasa-jasanya terhadap pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

SATRYA EMAS: PROGRAM KLINIK EKONOMI UNTUK UMKM

Akhir-akhir ini, tak hanya dikenal sebagai Kota Santri, Kabupaten Pasuruan mulai dikenal dengan sentra industri kreatif dan UMKM. Kesuksesan menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai sentra UMKM tidak lepas dari program pemerintah kabupaten dalam menunjang perkembangan dan kesuksesan membina para UMKM. Salah satu program itu adalah Program Satrya Emas (Strategi Layanan Ekonomi Maslahat). Program ini banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan termasuk Presiden Jokowi dan mengantarkan Bupati Pasuruan dianugerahi Satyalancana 2017. Program ini sangat memberikan dampak bagi perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kabupaten Pasuruan.

Program Pusat Strategi dan Pelayanan Ekonomi Maslahat (Satrya Emas) merupakan pengembangan konsep *Business Development Services* (BDS) atau semacam klinik ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembentukan Satrya Emas dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan dan mendorong tumbuh kembangnya wirusaha baru, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta potensi peluang usaha lainnya, sehingga tercipta jumlah dan varian peluang kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat yang digarap secara terintegrasi. Oleh karena itu, UMKM dituntut untuk berubah mengikuti perubahan ekonomi global menghadapi MEA, di mana saat ini persoalan yang dihadapi sangat kompleks.

Berdasarkan hal tersebut, UMKM membutuhkan layanan yang bersifat personal, terpadu, dan berkelanjutan. Program Satria Emas dipersiapkan menjadi pusat strategi dan layanan kewirausahaan yang menyediakan layanan pengembangan usaha yang terpadu, inovatif, solutif, dan berkelanjutan secara profesional (cepat, tepat, dan murah) dengan sistem jemput bola yang langsung menyentuh basis-basis masyarakat di seluruh kecamatan.



- ▶ *Maslahat Expo 2016 Kabupaten Pasuruan (Sumber: www.forumdemokrasi.com)*

Program Satria Emas ini tak hanya memberikan saran dan konsultasi secara teoretis, tetapi juga memberikan layanan konsultasi strategi teknis operasional yang solutif, yang dapat mengatasi berbagai permasalahan manajemen, pengolahan hasil, keuangan, fasilitas permodalan, serta pemasaran ataupun kebutuhan, dan permasalahan lainnya, melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sekaligus memfasilitasi pengembangan jaringan usaha bagi UMKM dan masyarakat.

Program Satria Emas yang digodok Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, bersama Dewan Riset Daerah (DRD) ini akan mengumpulkan data masalah ekonomi masyarakat dan di setiap kantor Satria Emas akan ada

dua pendamping ekonomi yang akan menampung seluruh keluhan masyarakat. Jika ada masalah ekonomi (kekurangan modal), masyarakat akan datang ke Satria Emas bukan ke rentenir, sehingga Satria Emas akan membuka akses perbankan. Begitu juga jika ada permasalahan infrastruktur, Satria Emas akan berkoordinasi dengan PU. Jika permasalahannya mengenai pemasaran, akan dicarikan pasar, baik di dalam maupun di luar kota.

Program Satria Emas sendiri melibatkan semua SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, namun SKPD yang terlibat langsung di dalam pelaksanaannya ada 8 SKPD, yaitu: 1) Dinas Koperasi dan UMKM; 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat (Balitbangdiklat); 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disnakertrans); 5) Dinas Lingkup pertanian; 6) Dinas Kominfo; 7) Bappeda; dan 8) Bagian Perekonomian.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa bentuk layanan koperasi dan UMKM yang diberikan, yaitu:

- Memberikan konsultasi bisnis;
- Menyediakan informasi bisnis di bidang manajemen, produksi, teknologi, pemasaran, dan permodalan;
- Layanan advokasi/pendampingan;
- Melaksanakan pelatihan singkat (*short course*) gratis bagi masyarakat, calon wirausaha baru (pembuatan produksi dan manajerial);
- Layanan akses pembiayaan; dan
- Layanan akses pemasaran produk.

Sasaran program Satria Emas adalah seluruh masyarakat di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Sejak dirilis 2015 lalu, jumlah UMKM khususnya usaha mikro di Kabupaten Pasuruan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Sejak kepemimpinan Bupati Irsyad Yusuf, jumlah usaha mikro mengalami peningkatan rata-rata 2.000 usaha

baru. Mulai 2013, jumlah usaha mikro di Kabupaten Pasuruan sebanyak 238.434 usaha dan di tahun berikutnya meningkat menjadi 241.150 usaha, atau naik sebanyak 2.716 usaha baru. Pada 2015 jumlahnya pun semakin bertambah menjadi 245.028 usaha baru atau naik sebanyak 3.878 dari tahun 2014, dan di tahun 2016 juga naik sebanyak 4.655 usaha baru, yakni dari 245.028 menjadi 249.683 usaha baru.

SURYA MAS JELITA: KADO UNTUK MASYARAKAT PASURUAN

Surya Mas Jelita merupakan program Kabupaten Pasuruan. Program ini merupakan singkatan dari Program Sehat untuk Berkarya, Mandiri Bersama Kelompok Jelang Eliminasi Kusta (Surya Mas Jelita). Program ini juga salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam bidang pelayanan publik yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional, yaitu menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Asman Abnur, kepada Bupati Pasuruan, H.M. Irsyad Yusuf, dalam acara Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur tahun 2017.

Surya Mas Jelita adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan penyakit kusta di wilayah Grati Pasuruan sebagai daerah endemik kusta. Di inovasi tersebut, setiap petugas melakukan pendekatan “SRUPUD” (Sosialisasi, Rembug kusta, Upaya pendekatan personal, Pembentukan KPD/keompok perawatan diri, Upaya memberdayakan kelompok, hingga Dievaluasi). Inovasi ini mempunyai keunggulan antara lain memberikan pelayanan yang komprehensif mulai dari perawatan, pengobatan, dan pemberdayaan melalui cara pendekatan yang manusiawi, komitmen dan kesungguhan dari semua pihak, kebersamaan semua elemen yang sehat, sehingga penderita tidak hanya sembuh, tetapi juga mempunyai kemandirian dan berkarya.

Kusta di Grati sendiri bukanlah hal baru. Sejak 2009 hingga 2016, total ada 298 kasus kusta yang menimpa warga Grati. Penyebab munculnya kusta antara lain kurangnya pengetahuan tentang penyakit kusta, tingginya angka kesakitan kusta, ditemukannya kasus kusta pada anak, adanya kecacatan, rendahnya pola hidup bersih dan sehat, kurang optimalnya dukungan lintas sektor, serta kurang tepatnya pendekatan yang dilakukan sehingga timbul kegagalan dalam eliminasi kusta.

Di Puskesmas Grati, penyakit kusta merupakan penyakit yang bercitra negatif dan mendapat perlakuan diskriminatif di masyarakat sehingga penderita kusta merasa malu, tidak mau berobat, dan tidak berdaya guna. Berdasarkan permasalahan yang ada, akhirnya Pemkab melakukan beberapa langkah untuk mengatasinya, seperti sosialisasi pada petugas kesehatan, keluarga, tokoh masyarakat/agama, dan kader kesehatan menggunakan media (*leaflet*, kipas, dan lain-lain) dan format *follow up* pemeriksaan serta rembuk kusta dengan Dinas Kesehatan, kecamatan, Puskesmas, Dinas Pendidikan, KUA, Bappeda, Disnakersos-trans, Dinas Koperasi, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menganalisis permasalahan serta penyelesaiannya, dan langkah lainnya, sehingga semuanya berhasil.

SAKERA JEMPOL UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK

Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pasuruan menjadi tambahan masalah tersendiri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat di Kabupaten Pasuruan. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk program “Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola (Sakera Jempol)”. Program Sakera Jempol dipilih sebagai salah satu inovasi pelayanan publik 2017 yang lolos untuk mengikuti proses lebih lanjut. Dari hasil presentasi ini, Kementerian PAN-RB akan memilih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Pasuruan dalam hal pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan untuk melaporkan tanda-tanda tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sejak dini. Berdasarkan permasalahan ini, Pemkab Pasuruan memberikan solusi yang aplikatif dan komprehensif berupa program Sakera Jempol, yang sudah dimulai sejak 2014. Program ini memiliki beberapa instrumen pencegahan, deteksi dini, dan penanggulangan.



- ▶ *Gus Irsyad saat menyambangi salah satu rumah sakit di wilayah Pasuruan. (Sumber: detik.com)*

Sosialisasi pencegahan dilakukan lewat media sosial bagi masyarakat yang terjangkau teknologi informasi serta menggunakan mobil perlindungan perempuan dan anak untuk menjangkau perdesaan. Kemudian dilakukan pemberian Kartu *Hotline* Jempol. Para kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan populasi kunci diberikan *contact person* atau kartu nama. Jika ditemukan tanda-tanda terjadi tindakan kekerasan perempuan dan anak, warga bisa langsung menghubungi petugas sesuai yang ada di kartu nama. Cara ini juga mengajak warga proaktif melakukan pencegahan.

“
PROFIL TOKOH

Nama:

Irsyad Yusuf

TTL:

Pasuruan,

10 November 1970

Jabatan:

*Bupati Pasuruan
(2013–sekarang)*

“



◆ 15

SPIRIT ETOS KERJA MEWUJUDKAN KEMAJUAN BANYUWANGI

Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar Kabupaten Banyuwangi sepuluh tahun lalu? Pasti stigma masyarakat Indonesia yang mendengar Kabupaten Banyuwangi adalah daerah santet, kotor, tertinggal, miskin, dan tempat perlintasan bagi pelancong yang ingin ke Bali. Namun, stigma negatif tersebut sudah hilang. Kabupaten Banyuwangi kini lebih dikenal sebagai daerah dengan pariwisata yang indah dan berbagai festival yang mendunia.

Perlahan tapi pasti, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, berhasil memoles Banyuwangi menjadi daerah yang terpendang, baik dari sisi keindahan kota, pariwisata, kesejahteraan rakyat, maupun hal teknologi informasi. Dalam lima tahun kepemimpinannya, puluhan prestasi ditorehkan oleh Anas, baik secara pemerintahan maupun kepemimpinan. Selama masa pemerintahannya, ia telah meluncurkan berbagai program untuk menjadikan Banyuwangi seperti sekarang, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

WISATA BANYUWANGI DENGAN KONSEP *ECO-TOURISM*

Awalnya, Banyuwangi merupakan daerah terbelakang dengan wisata yang kurang terkenal. Padahal Banyuwangi memiliki potensi wisata alam yang komplet. Keindahan pantai di Banyuwangi layak disandingkan dengan Bali. Bahkan, ombak di Pantai Plengkung disebut sebagai ombak terbaik kedua di dunia yang sangat ideal untuk berselancar.

Namun, potensi tersebut belum bisa menjadikan Banyuwangi sebagai pilihan destinasi para pelancong saat itu. Para wisatawan lebih memilih hanya melewati Banyuwangi untuk kemudian berlibur ke Bali. Dengan demikian, semakin mereduplah nama Banyuwangi.

Namun siapa sangka, setelah dipimpin oleh Anas, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi meningkat fantastis, yaitu mencapai 300%. Selama 2016 saja, ada 3.831.703 wisatawan nusantara dan 78.865 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Banyuwangi.

Alam Banyuwangi yang indah memang sangat cocok untuk pariwisata *eco-tourism*—pariwisata berbasis alam—apalagi sekarang banyak orang yang butuh hiburan karena tekanan kerja. Sangat baik untuk kembali rehat sejenak ke alam, seperti berkunjung ke daerah Banyuwangi.

Objek wisata di Banyuwangi juga tak kalah indah dengan daerah lain. Banyuwangi memiliki pantai sekaligus gunung, di antaranya Pantai Plengkung dan Pantai Sukamade, dan Kawah Gunung Ijen yang terkenal dengan *blue fire*-nya. Kemampuan Banyuwangi dalam mempromosikan wisata *blue fire* ini membuat turis asing penasaran dan rela merogoh kocek yang tidak sedikit hanya untuk melihat *blue fire*.

Banyuwangi juga memiliki tiga taman nasional terbesar di Jawa, yakni Baluran, Alas Purwo, dan Meru Betiri. Menurut Anas, Banyuwangi mempunyai “Segitiga Emas” dengan kekayaan wisata alam yang luar biasa, yaitu Kawah Ijen, Pantai Sukamade, dan Taman Nasional Alas Purwo.

Ketiganya merupakan perpaduan antara dataran tinggi, pantai, dan kawasan hutan dengan kekayaan flora dan fauna. Dengan modal keindahan alam tersebut, Pemkab Banyuwangi mengusung ekowisata atau *eco-tourism* untuk membangun Banyuwangi. Hal itu tentu sangat prospek untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Banyuwangi.



- ▶ *Pesona Kawah Ijen mampu memikat wisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara (Sumber: 3djuegos.com)*

Berdasarkan hal itu, Pemkab Banyuwangi kemudian melakukan transformasi di bidang wisata Banyuwangi. Semua infrastruktur digen-jot untuk mendukung terwujudnya ekowisata di Banyuwangi. Sarana dan prasarana dipersiapkan untuk meningkatkan nilai pariwisata Banyuwangi sehingga bisa menarik para wisatawan yang banyak, baik domestik maupun mancanegara.

Alhasil, terobosan yang dipilih untuk mengangkat wajah Banyuwangi memang sangat tepat. Dengan mengangkat kembali potensi keindahan alam yang ada, sektor yang lain juga akan tergerak. Terbukti,

sektor pariwisata hanyalah sebagai *trigger* untuk menggerakkan sektor lain seperti ekonomi, infrastruktur, dan pertanian.

Selain itu, menurut Anas ketika diwawancara *Jawapos*, “Dengan membangun sektor pariwisata, Banyuwangi akhirnya berhasil menumbuhkan ekonomi kreatif di Banyuwangi. Bisnis yang terkait dengan pariwisata tumbuh subur seperti transportasi, akomodasi, rumah makan, *homestay*, dan suvenir.” Datangnya wisatawan juga membuat produk buah lokal Banyuwangi meningkat. Misalnya, produksi buah naga pada 2014 mencapai 28.819 ton, meningkat dari 2013 yang hanya 16.631 ton. Begitu pula produksi jeruk siam yang pada 2012 mencapai 140.602 ton menjadi 190 ribu ton pada 2014.

Dengan kebijakan kampanye *eco-tourism* ini pula, perilaku masyarakat Banyuwangi bisa berubah, yang biasanya jorok kini menjaga kebersihan. Mereka juga menjadi lebih ramah kepada pendatang. Yang jelas, warga Banyuwangi kini bangga dengan daerahnya sendiri.

BANYUWANGI FESTIVAL (B-FEST) MEDIA PROMOSI WISATA BANYUWANGI

Berbagai cara dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi untuk menarik para wisatawan ke Kabupaten Banyuwangi. Salah satu cara yang dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk memasarkan pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah mengadakan berbagai macam festival di Banyuwangi. Semua acara festival tersebut disatukan dalam rangkaian B-Fest (Banyuwangi Festival). Berlangsung sejak 2010, menurut Bupati Anas, B-Fest terbukti telah mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke wilayahnya. Tak hanya wisatawan domestik yang bertambah, tetapi juga wisatawan mancanegara. Pada 2017 ini, Bupati Banyuwangi mencatat bahwa ada 72 *event* yang akan dilaksanakan selama 2017 ini. Festival ini mencakup festival yang rutin diadakan dan festival yang baru akan diadakan.

Adapun beberapa *event* utama dari B-Fest 2017 adalah sebagai berikut:

- Banyuwangi International BMX pada 22–23 April 2017
- Kite and Wind Surfing Competition di Pulau Tabuhan pada 26–27 Agustus 2017
- International Tour de Banyuwangi Ijen pada 27–30 September 2017
- Kebo-Keboan pada 14 September 2017 dan 1 Oktober 2017
- Ngopi Sepuluhewu pada 18 Oktober 2017
- Festival Gandrung Sewu pada 8 Oktober 2017
- Banyuwangi Ethno Carnival pada 11 November 2017
- Banyuwangi Jazz Festival



- *Keikutsertaan warga negara asing menambah semaraknya acara Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2017 (Sumber : tourismnews.co.id)*

Pada 2011, menurut Anas, wisatawan asing yang datang ke Banyuwangi hanya sekitar 5.000 orang. Namun, pada akhir 2016, jumlahnya mencapai 80.000-an. Adapun wisatawan domestik pada periode waktu yang sama melonjak dari 7.500 menjadi 3,2 juta orang. Peningkatan

angka kunjungan ini pun, menurut Anas, diikuti dengan terus terjual habisnya tiket transportasi ke Banyuwangi. Hal serupa terjadi pula pada tingkat pemesanan kamar hotel. Angka-angka tersebut juga langsung berdampak pada pendapatan daerah.

Dampak dari program festival tersebut bukan hanya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, bahkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pun meningkat dari sekitar Rp 24 triliun (pada 2010) menjadi Rp 60,5 triliun (pada 2016). Proporsi pendapatan sektor jasa juga naik dari 4% ke 11% pada periode yang sama.

Bersamaan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, untuk lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, Pemkab Banyuwangi juga telah mengeluarkan larangan pembangunan hotel baru selain hotel berbintang. Sebagai gantinya, mereka mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mendirikan *homestay*. *Alhamdulillah*, sekarang sudah ada 400 *homestay* baru yang akan menampung para wisatawan.

Sekali mendayung, 2 sampai 3 pulau terlampaui. Mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk mewakili perubahan di Banyuwangi ini. Festival digalakkan, sektor lainnya seperti pariwisata, ekonomi masyarakat, pertanian, dan lain-lain akan mendulang manfaatnya. Tentunya ini semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

GANCANG ARON: INOVASI PELAYANAN KESEHATAN BANYUWANGI

Pemkab Banyuwangi melakukan inovasi di bidang pelayanan kesehatan. Salah satu program pelayanan kesehatan di Banyuwangi adalah program “Gancang Aron”, yaitu pelayanan mengantar obat ke rumah pasien. *Gancang aron* dalam bahasa lokal berarti 'lekas sembuh'. Pelayanan ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat menikmati layanan kesehatan, termasuk bisa mengurangi antrean pengambilan obat di apotek rumah sakit milik pemerintah daerah.

Sering kali terlihat ada pasien yang setelah berobat harus mengambil obat di apotek. Itu sungguh menyulitkan. Sudah sakit, ia masih harus menunggu obat. Dengan program ini, masyarakat yang sakit tidak usah menunggu antrean, bisa langsung pulang beristirahat di rumah. Obatnya nanti diantar setelah disiapkan apoteker. Layanan ini gratis. Dengan adanya pelayanan tersebut, pasien rawat jalan diharapkan tidak perlu repot antre mengambil obat dan bisa segera sembuh dari penyakit yang diderita.



- ▶ *Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, sedang berbincang dengan warga yang sedang berobat di RSUD Banyuwangi (Sumber: banyuwangi.go.id)*

Pemkab Banyuwangi kemudian mengembangkan program ini dengan melibatkan layanan platform digital dari Go-jek Indonesia. Intinya adalah mengembangkan layanan pengantaran obat pasien dengan tetap menyesuaikan aturan yang ada. Dengan kerja sama ini, ternyata hasilnya lebih efisien dibandingkan sistem layanan pengantaran obat yang sebelumnya. Bupati Anas menyebutkan bahwa ongkos yang dikeluarkan akan bisa lebih murah bila layanan antar tersebut bekerja

sama dengan Go-Jek, karena pihak Pemkab tidak perlu mengadakan pengadaan motor dan juga sopirnya. Dengan Go-Jek, target tercapai lebih cepat dan efisien.

Selain mengenai pelayanan obat, layanan panggilan ambulans bebas pulsa 24 jam *One Call Service Ambulance* Gawat Darurat 118 juga menjadi andalan Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur dalam melayani masyarakat Banyuwangi. Layanan nomor telepon 118 ini mengintegrasikan semua ambulans di Banyuwangi dalam satu komando, baik milik pemerintah maupun swasta. Ketika keluarga pasien menghubungi nomor 118, operator akan segera berkoordinasi dengan rumah sakit atau puskesmas terdekat.

Fasilitas yang terdapat di dalam ambulans gratis tersebut juga dilengkapi dokter, tenaga medis, atau perawat. Selain itu, ada fasilitas tempat tidur pasien, tabung oksigen, peralatan medis yang dilengkapi dengan infus, dan lainnya. Pelayanan ambulans gratis lewat 118 dijamin dapat diakses seluruh masyarakat selama 24 jam. Inilah ikhtiar Bupati dalam memberi pelayanan optimal kepada publik, sekaligus melengkapi layanan lain di bidang pendidikan hingga peningkatan ekonomi rakyat. Layanan ini juga digratiskan bagi peserta BPJS atau warga yang memiliki surat keterangan miskin.

LAHIR PROCOT PULANG BAWA AKTA

Bayi lahir pulang bawa akta atau dalam kalimat lokal di Banyuwangi "*lahir procot pulang bawa akta*" merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi. Awalnya ini terinspirasi oleh sejumlah keterbatasan layanan yang dihadapi warga Banyuwangi. Banyuwangi merupakan daerah kawasan hutan dengan jarak terjauh dari Desa Sarongan menuju Kota Banyuwangi sejauh 80 km dengan waktu tempuh lebih dari 3 jam. Jadi, mengurus akta lahir menjadi sebuah beban tersendiri bagi orangtua yang melahirkan.

Istilah "*lahir procot pulang bawa akta*" dapat dijabarkan: lahir artinya orang yang melakukan persalinan, sedangkan *procot* sendiri berasal dari

bahasa Jawa yang artinya keluar dari dalam. Jadi, inovasi “lahir *procot* pulang bawa akta” bisa diartikan dengan bayi yang baru lahir langsung bisa dibuatkan akta kelahirannya pada hari itu juga.

Inovasi Lahir Procot Pulang Bawa Akta bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan sistematis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui strategi perbaikan sistem dan perbaikan mekanisme pelayanan masyarakat. Dengan program ini, pelayanan kependudukan, khususnya pelayanan akta kelahiran menjadi mudah, murah, dan cepat karena persyaratan akta kelahiran cukup dikumpulkan di tempat kelahiran seperti rumah sakit dan Puskesmas.

Program ini juga memunculkan sebuah kerja sama dengan sejumlah lembaga, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Dinas Kesehatan, rumah sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, kecamatan, dan PT Pos Indonesia. Program ini adalah salah satu program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berbasis IT yang hasil pelayanan dan kemudahannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat (dari segi waktu, transportasi, dan biaya karena semua dapat diterima langsung di tempat pelayanan pertama).

Program inovasi ini mengubah prosedur pelayanan akta kelahiran yang rumit, tidak jelas, tidak pasti, tidak transparan, dan berbelit-belit menjadi mudah, pasti, cepat, dan gratis. Sebelum ada program ini, masyarakat yang mengurus akta kelahiran harus mengurus Kartu Keluarga (KK) terlebih dulu (biasanya 2 minggu), kemudian mengurus akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan waktu pelayanan satu bulan.

Dengan dilaksanakannya Lahir Procot Pulang Bawa Akta, pelayanan akta kelahiran dilayani oleh sarana kesehatan tempat bayi lahir atau di kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat tidak perlu mengurus Kartu Keluarga terlebih dulu, cukup menyiapkan fotokopi KTP kedua orangtua dan fotokopi surat nikah yang dilegalisasi, maka pelayanan

akta kelahiran langsung bisa diproses, satu hari jadi, dan juga mendapatkan Kartu Keluarga yang baru yang sudah ada data identitas dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak secara gratis.

Inovasi ini dalam implementasinya juga menggunakan teknologi informasi. Data permohonan Akta Kelahiran dari masyarakat diverifikasi oleh petugas dan operator Puskesmas, rumah sakit, dan kecamatan. Setelah itu dipindai, kemudian diunggah ke sistem aplikasi akta secara daring (*online*) (<http://akta.banyuwangikab.go.id/>) sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan akta kelahiran.

“
PROFIL TOKOH

Nama:

Abdullah Azwar Anas

TTL:

*Banyuwangi,
06 Agustus 1973*

Jabatan:

*Bupati Banyuwangi
(2010–sekarang)*

“



◆ 16

SUKSES MEMBUKA DAERAH TERISOLASI DI PUNCAK, PAPUA

Kabupaten Puncak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Mardiyanto, pada 21 Juni 2008. Kabupaten Puncak adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan hasil pencatatan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Puncak sementara adalah 93.363 orang, yang terdiri atas 49.308 laki-laki dan 44.055 perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut masih terlihat bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Puncak masih bertumpu di sekitar ibu kota kabupaten, yakni Distrik Ilaga 16,50%, Distrik Sinak 21,00%, Distrik Gome 18,96%, Distrik Pogoma 17,10%, sedangkan distrik lainnya di bawah 12%.

Kondisi Puncak, Papua merupakan daerah yang terisolasi dan sangat tertinggal. Akses menuju daerah Puncak, Papua hanya bisa melalui jalur udara melalui Timika (Ibu Kota Kabupaten Mimika) atau Nabire (Kabupaten Nabire) selama kurang lebih 25 menit dengan pesawat terbang

kecil seperti Cessna Caravan, Twin Otter, atau Pilatus Porte. Selain itu, kondisi kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan masih jauh dari kata mencukupi sehingga daerah Puncak, Papua tergolong yang sangat tertinggal. Pada awal-awal pemekaran, barang-barang kebutuhan pokok di wilayah tersebut harganya “selangit”.



► *Ilustrasi mahalnya bahan bakar minyak (BBM).
(Sumber: www.merdeka.com)*

Sebelumnya, harga satu sak semen di Puncak bisa mencapai Rp 2,5 juta, bahkan bensin per liter-nya dibanderol hingga Rp 60 ribu. Hal tersebut terjadi karena biaya angkut logistik dan keperluan lainnya mahal, yakni harus menggunakan pesawat perintis untuk sampai di Kabupaten Puncak.

Namun saat ini, sudah banyak perbedaan di Puncak, Papua. Pembangunan infrastruktur sudah mulai digalakkan untuk membangun wilayah Puncak, Papua. Sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan dibangun dengan penuh perjuangan di tengah keterbatasan akses menuju Puncak, Papua. Kebijakan untuk menekan harga barang di Puncak sudah berhasil seminimal mungkin agar bisa setara seperti daerah lainnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Bupati Willem Wandik adalah aktor perubahan Puncak, Papua itu. Dengan kontribusinya, ia dianugerahi berbagai penghargaan seperti salah satu *Best Innovative Figures of the year 2017* (Bupati Terbaik se-Indonesia). Willem Wandik juga memperoleh penghargaan *Outstanding Regional Economic Growth* (Pertumbuhan Ekonomi), *Education Sector*

(Sektor Pendidikan), *Infrastructure Development* (Pembangunan Infrastruktur), and *Public Health* (Kesehatan Masyarakat) of the year 2017.

INFRASTRUKTUR: JURUS AWAL MEMBANGUN PUNCAK, PAPUA

Meskipun kondisi harga bahan bangunan untuk menunjang kegiatan fisik di Kabupaten Puncak terbilang cukup mahal, contohnya saja 1 sak semen harganya bisa mencapai Rp 2,5 juta, hal ini tak menyurutkan semangat Bupati Puncak Willem Wandik untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur dasar di Kabupaten Puncak selama empat tahun.

Secara garis besar, pembangunan fisik selama empat tahun terus mengalami perkembangan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, jalan dari Ilaga ke Beoga, dari Ilaga ke Sinak, dan juga jalan di dalam kota Ilaga, termasuk pembangunan peningkatan lapangan terbang perintis seperti lapangan terbang Ilaga, Beoga, dan Sinak.



► *Jalan Trans Papua tampak dari atas. (Sumber: www.puncakkab.go.id)*

Pembangunan sejumlah kantor-kantor pusat pemerintahan, perumahan guru, bangunan sekolah, rumah bagi petugas kesehatan, serta bangunan rumah-rumah pejabat juga sudah dibangun, termasuk kantor Bank Papua serta rumah sehat bagi masyarakat, serta pembangunan jembatan dan pembangunan air bersih. Hal ini bisa dilihat di Kabupa-

ten Puncak dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan rumah dinas bagi bupati dan wakil bupati dan pejabat eselon sebanyak 12 unit kini siap ditempati di Ilaga.

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama. Oleh sebab itu, telah dibangun infrastruktur dasar yang penting. Pemkab Puncak berusaha menyediakan alat-alat berat untuk membuka akses jalan dari kabupaten ke distrik, hasilnya ada yang sudah diaspal dan ada yang masih sebatas tanah. Hal itu harus dipaksakan, meski biaya untuk memobilisasi alat berat terbilang cukup mahal karena harus diangkut dengan pesawat.

PLTMH UNTUK MENYINARI PUNCAK, PAPUA

Terobosan dalam sektor energi dan sumber daya adalah tersedianya pasokan energi listrik untuk penerangan jalan, kantor, serta perumahan melalui PLTD (diesel), PLTMH, dan *solar cell*. Bahkan, pada tahun ini sedang diupayakan pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) menggunakan air sungai berkapasitas 2 x 350 kw (kilowatt) yang sudah dicanangkan pembangunannya oleh Pemkab Puncak sejak 2016 lalu, menggunakan anggaran APBD 2016–2018

PLTMH direncanakan sudah bisa beroperasi pada 2018 sehingga beberapa waktu ke depan tidak perlu lagi terjadi gangguan dan ketidakterediaan pasokan sumber daya listrik, sebagaimana yang dialami sebelumnya. Kalau PLTMH sudah selesai, Ilaga akan terang 24 jam.

Dengan adanya listrik 24 jam tersebut, menurut Bupati, akan bermunculan pusat-pusat ekonomi yang baru di Ilaga. Hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat akan terjadi di Kabupaten Puncak. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Puncak semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera.

MEMBELI PESAWAT KAPASITAS 4 TON

Khusus untuk sektor perhubungan atau transportasi udara, saat ini Kabupaten Puncak dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan swasta

seperti Jhonlin, Pegasus, Trigana, Susi air, MAF, AMA, AIRfast, dan Asian One.

Namun, layanan penerbangan ini masih sangat mahal dan sulit bagi masyarakat. Pemerintah Puncak telah berupaya semaksimal dan sebaik mungkin memberikan subsidi penerbangan, tetapi hal itu belum berdampak nyata dan harga masih tetap mahal, sehingga tetap berakibat pada tingginya harga-harga di Kabupaten Puncak. Dalam hal ini, Pemda Puncak juga telah melakukan terobosan dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Perhubungan RI. Hasilnya adalah akan ada program subsidi kargo dan subsidi penerbangan perintis, yang sudah berlaku sejak pertengahan 2017.



► Pesawat milik Pemkab Puncak, Papua (jenis DHC-4 T Turbo Caribou)
(Sumber: kompas.com)

Bahkan Pemerintah Puncak berencana pada 2017 ini akan kembali membeli pesawat berkapasitas 4–5 ton. Pesawat ini diharapkan akan membantu mempermudah mobilitas orang dan barang serta dalam rangka menurunkan tingkat kemahalan barang dan jasa, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

SUKSES MEMBANGUN 47 GEDUNG SEKOLAH

Sektor pendidikan tak luput dari target perubahan di Puncak, Papua. Pemerintah Puncak menjadikan pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan manusia di Puncak, Papua. Berbagai kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan seperti UGM dan lainnya dilaksanakan. Alhasil, di daerah terpencil tersebut kini sudah ada 435 orang guru, yang terbagi atas guru perintis, Guru Penggerak Desa Terpencil (GPDT) yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Madah (UGM), serta guru tetap ataupun para guru kontrak dan Guru Tidak Tetap (GTT).

Dampaknya, saat ini pembangunan pendidikan makin gencar di Kabupaten Puncak, bahkan jumlah anak usia sekolah makin meningkat. Dengan kebijakan ini, kini masyarakat melihat bahwa pendidikan sangat penting bagi anaknya sehingga mereka berlomba-lomba menyekolahkan anaknya. Sekarang, jumlah murid di Kabupaten Puncak tercatat sebanyak 4.045 orang, dari semua tingkatan.

Untuk mendukung proses belajar-mengajar, pemerintah sudah membangun 47 gedung sekolah, yang terbagi atas TK sebanyak 6 gedung, SD sebanyak 31 gedung, SMP sebanyak 6 gedung, dan SMA sebanyak 3 gedung serta SMK sebanyak 1 gedung. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga mengupayakan pembangunan perumahan guru, perpustakaan, dan sarana pendukung pendidikan lainnya, serta pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk anak SMP dan SMA/SMK. Selain itu, untuk memberikan dukungan pelayanan pendidikan, pemerintah juga memberikan insentif bagi guru-guru serta mendatangkan beberapa Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT) untuk memacu kuantitas dan kualitas pendidikan, serta mendukung proses belajar-mengajar di sekolah.

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa juga secara konsisten dilakukan selama empat tahun terakhir. Dalam program pengiriman praja IPDN sampai dengan saat ini, pemerintah sudah memberikan beasiswa

terhadap mahasiswa asal Kabupaten Puncak mulai dari jenjang diploma sampai dengan jenjang strata 3, siswa penerbangan luar negeri, serta bantuan pemondokan asrama bagi mahasiswa tersebut.

PEMBANGUNAN RSUD PRATAMA TIPE C

Kondisi kesehatan masyarakat Puncak memang bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Keterbatasan akses distribusi obat-obatan dan lingkungan yang tidak sehat membuat penyakit kerap menjangkiti masyarakat Puncak, Papua.

Alhasil, hal itu mendorong Pemda Puncak membangun gedung RSUD Pratama di Kabupaten Puncak. Direncanakan akhir 2018 sudah bisa rampung dan sudah bisa beroperasi. Selain itu, Pemda juga sudah membangun 18 Puskesmas pembantu (pustu), 8 Puskesmas rawat jalan, dan 3 Puskesmas rawat inap, dengan tenaga kesehatan sebanyak 17 dokter, 32 perawat, dan 19 bidan. Jumlah ini akan terus ditingkatkan.

Berbagai program layanan kesehatan juga terus dilakukan, antara lain pelayanan kesehatan di kampung-kampung yang sulit dan terpencil, imunisasi, layanan operasi katarak, pemberian vitamin dan makanan tambahan bagi bayi, ibu hamil, dan ibu melahirkan, pemberian paket perlengkapan bagi bayi dan ibu melahirkan, pemberian bantuan oprasional kesehatan, pembangunan rumah para medis, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta tersedianya Puskesmas keliling dan mobil ambulans, serta melengkapi alat kesehatan dan obat-obatan. Ke depannya, penduduk Kabupaten Puncak tidak perlu lagi keluar daerah dalam hal penanganan penyakit dan permasalahan kesehatan. Dengan demikian, angka kematian di Kabupaten Puncak dapat ditekan.

GROSIR ILAGA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Masyarakat Puncak yang sebelumnya dikenal dengan kemiskinan kini sudah mulai berangsur diuntungkan oleh program-program pemberdaya-

an. Mata pencaharian sehari-hari masyarakat Puncak adalah sektor pertanian sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat mengarah untuk menunjang sektor pertanian masyarakat. Program tersebut antara lain penyediaan bibit pertanian, penyediaan peralatan pertanian, pengembangan budi daya perikanan dan peternakan, pengadaan bibit babi, sapi perah, dan kelinci, pemberian pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas kelompok tani, serta pelatihan industri mebel dan perbengkelan.

Bahkan, pemerintah daerah melakukan subsidi pembelian hasil bumi sektor pertanian dari masyarakat serta pemberian modal usaha bagi pelaku usaha lokal putra dan putri asli daerah. Dengan demikian, diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat, sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.



- ▶ *Bupati Puncak, Papua saat meresmikan Grosir Ilaga. Kehadiran grosir ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat Kabupaten Puncak, Papua. (Sumber: www.puncakkab.go.id)*

Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemahalan harga barang-barang di Puncak, Bupati Puncak melalui salah satu dinasny sudah

membangun Pusat Grosir Ilaga, yang saat ini dikelola oleh BUMD PT Puncak Papua Mandiri, dengan menjual harga barang lebih murah 30%. Dengan berdirinya pusat grosir ini, diharapkan masyarakat Puncak bisa membeli produk atau barang dengan harga yang relatif murah dan bisa lebih hemat hingga 30% dari harga semula.



“
PROFIL TOKOH

Nama:

Willem Wandik

TTL:

Papua, 17 Agustus 1975

Jabatan:

*Bupati Puncak, Papua
(2013–sekarang)*

“

◆ 17

SULISTYO WIMBO: TOKOH PUNOKAWAN DALAM TRANSFORMASI PERUBAHAN PT KAI

Penumpang berjubel. Ada yang bergelantungan di pinggir gerbong kereta dan banyak yang duduk memenuhi bagian atas (atap) luar kereta. Kereta begitu bising dan ramai dengan suara pedagang asongan, copet, dan calo tiket. Juga tercium semerbak bau menyengat sampah dan toilet. Banyak hal lain menjadi suasana dan pemandangan khas kereta api masa lalu. Korban tergencet akibat kepenuhan, putus kaki akibat terbentur peron, jatuh dari kereta, bahkan kecelakaan kereta api adalah musibah yang sudah sering terjadi di masa lalu.

Namun, suasana dan pemandangan kereta api saat ini sudah jauh berbeda dengan masa lalu. Angkutan darat yang memiliki seabrek masalah itu sudah disulap menjadi salah satu moda transportasi darat primadona pilihan masyarakat Indonesia. Sarana dan prasarana PT KAI sudah bertransformasi sehingga memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan kepada para penumpang. Tak ada yang menyangka itu semua akan terjadi.

Siapa sebenarnya sosok yang sangat berpengaruh dalam transformasi perubahan PT KAI? Tentunya yang pertama adalah Dirut PT KAI, Ignasius Jonan. Namun, di balik kesuksesan PT KAI yang dinahkodai

Ignasius Jonan, ternyata ada seorang sosok dengan seabrek ide dan kebijakan yang banyak memberikan perubahan di PT KAI. Siapa dia?

Bapak Wimbo, begitulah sapaan akrabnya. Nama lengkapnya adalah Sulistyio Wimbo Hardjito, Direktur Komersial PT KAI. Sosok yang sudah banyak melintang di dunia bisnis inilah yang menjadi duet maut Ignasius Jonan dan terbukti berhasil melakukan banyak transformasi perubahan di PT KAI. Ide cemerlang, gebrakan, dan kebijakannya di perkeretaapian menjadi ikon tersendiri dalam benak para petugas KAI. Lantas, bagaimana mereka melakukan transformasi perubahan?

MASA AWAL SEBAGAI DIREKTUR KOMERSIAL PT KAI

Pada masa awal-awal menjabat sebagai Direktur Komersial di PT KAI, Wimbo langsung dihadapkan dengan seabrek permasalahan yang sudah menunggu, mulai dari kebijakan pemerintah hingga persoalan internal PT KAI. Ketika itu Wimbo dihadapkan dengan persoalan *unfair* (tidak adil) antara pemerintah dengan operator PT KAI yang sangat mengganggu PT KAI. Salah satu masalah klasik yang juga dialami PT KAI adalah waktu itu BBM (jenis solar) untuk truk masih mendapat subsidi, sedangkan solar untuk kereta api tidak disubsidi. Misalkan, di Karawang, ada *head to head* antara kereta dengan truk. Truk (yang sebagian besar) merusak jalan disubsidi, sedangkan kereta yang punya jalan dan tidak merusak jalan justru tidak disubsidi.

Kondisi saat itu memang pemerintah tidak berpihak kepada moda kereta api. Hal ini terjadi karena Keppres menyatakan bahwa yang mendapat subsidi adalah kepentingan umum. Saat itu kepentingan umum hanya dimaknai sebagai pelat kuning seperti angkutan, truk, bus, dan lain-lain berupa moda angkutan umum, sedangkan lokomotif atau kereta api tidak tergolong kategori kepentingan umum karena tidak ada pelat kuning.

Masalah lain adalah sarana dan prasarana. Misalnya, sinyal PT KAI yang digunakan saat ini masih sisa peralatan sinyal Belanda dulu. Bahkan, di kereta api tidak ada *operation center* sampai sekarang. Wimbo yang termasuk mantan Direktur *Corporate Services* PT Indosat menjelaskan begitu pentingnya *operation center*. Bahkan, beliau menyebutkan bahwa *operation center* adalah sebuah emas karena sangat penting dalam sebuah bisnis.



- ▶ *Ilustrasi kondisi kereta penumpang yang tidak kondusif*
(Sumber: www.hipwee.com)

Salah satu hal buruk yang melekat dalam mental pegawai PT KAI adalah tangan di bawah, yaitu menunggu dana dari pemerintah. Jadi pembangunan harus menunggu dari pemerintah, PSO juga tunggu dari pemerintah. Namun, pada zaman Pak Wimbo mulai ditanamkan bahwa PT KAI harus tangan di atas. Pernah suatu ketika, saat mengeluarkan kebijakan meng-AC-kan semua kereta api, beberapa hari kemudian Wimbo dipanggil oleh kementerian terkait akibat kebijakan tersebut. Ia mendapat teguran berupa: silakan buka kereta dengan AC, tapi tarif ekonomi ditentukan oleh pemerintah dan nonekonomi ditentukan oleh operator, sedangkan kriteria nonekonomi adalah pakai AC.

Wimbo mengakui bahwa pada saat beliau menjabat sebagai Direktur Komersial PT KAI, *by design* perusahaan ini memang sudah tidak enak. Ia mengisahkan, saat pertama kali masuk kereta selepas dilantik, kereta api jurusan Jakarta-Surabaya itu dipenuhi sampah. Ia sempat bergumam, “Ini saya masuk kereta atau tempat sampah.”

Di samping itu, masyarakat dan penumpang kereta juga mengalami “*toilet syndrome*”, yaitu kondisi di mana bau pesing dan kotoran dari toilet sudah tidak terasa bau dan menjijikkan lagi karena mereka sudah terlalu lama menciumnya.

Salah satu gebrakan dan transformasi bagus dari Wimbo adalah AC-nisasi semua kereta api ekonomi. Walaupun sebelumnya sempat terhalang oleh peraturan menteri mengenai peraturan AC kereta api, Wimbo tetap bersikukuh melakukan AC-nisasi semua kereta setelah sebelumnya mengusulkan pergantian peraturan menteri terkait kereta api dan AC-nisasi kereta ekonomi.



- ▶ *Pemasangan AC dalam kereta, semakin menambah rasa nyaman bagi penumpang (Sumber: medanbisnisdaily.com)*

Beliau bercerita bahwa sebelum kereta ekonomi dipasang AC, tarifnya adalah Rp30.000. Pendapatan yang masuk dari PSO hanya sekitar

Rp12.000, padahal biaya operasinya lebih dari Rp50.000. Setelah dipasang AC di semua kereta ekonomi, Wimbo menaikkan tarif tiket kereta api ekonomi menjadi seharga Rp100.000 dan ternyata laris manis, bahkan meningkatkan pendapatan PT KAI. Bagaimana bisa?

“Tentu sangat bisa, perhitungannya gampang. Kereta ekonomi terdiri dari 104 kursi per gerbong. Dulu harga tiket satuan Rp30.000 dikalikan dengan 104 totalnya Rp3.120.000. Setelah dipasang AC, harga tiket naik menjadi Rp100.000 kemudian dikali 104 menjadi Rp10.400.000 per gerbong. Itu kalau satu gerbong. Kalau 8 gerbong, tinggal dikali 8 sehingga perhitungannya Rp10.400.000 dikali 8 menjadi Rp83.200.000. Itu untuk per kereta dan per hari. Padahal modalnya hanya Rp 50 juta. Dengan perhitungan dan konsep demikian tidak sampai satu minggu akan balik modal,” ungkapnya.

Keputusan AC-nisasi kereta ekonomi itu juga tidak lepas dari kritik para karyawan PT KAI. Bisa dibayangkan, memasang 1 AC kereta bisa menghabiskan biaya sebesar Rp 800 juta. Saat itu, PT KAI punya 1.400-an kereta yang harus pakai AC. Dari mana uangnya?

Langkah yang diambil Pak Wimbo adalah menggunakan AC dengan kualitas yang tidak terlalu bagus. Menurutnya, pemasangan AC di kereta yang terpenting adalah dingin. Saat itu, ia tidak memperlakukan pemakaian AC merek Sharp, Daikin, Panasonic, atau merek Jepang lainnya. Yang terpenting, setelah pemasangan AC tersebut, ia juga mengeluarkan kebijakan untuk pergantian AC setiap enam bulan di setiap kereta.

Alasannya adalah banyaknya debu dan karena penggunaan 24 jam terus-menerus sehingga harus diputuskan untuk ada pergantian AC setiap enam bulan demi menjaga kualitas pelayanan kereta dalam hal AC. Langkah yang diambil oleh Wimbo mengenai AC-nisasi kereta ekonomi ini termasuk salah satu dari beberapa jurus maut yang pernah dilakukan di PT KAI dan ia sebut sebagai *killer application*.

Jurus maut (*killer application*) lainnya di kereta api itu adalah PT KAI mengangkut barang, bukan mengangkut manusia (penumpang). Saat

itu ia mengusulkan untuk membuat kereta api dengan 6 jenis perusahaan dan aktivitas yang berbeda, yaitu KA wisata, KA logistik, KA properti, KA rumah sakit, dan KA telekomunikasi. Dua di antara lima terobosan itu akhirnya diterima oleh Ignasius Jonan, yaitu KA logistik yang merupakan ide orisinal dari Wimbo dan KA wisata yang merupakan ide dari Ignasius Jonan.



► *Ilustrasi kehadiran lokomotif baru. (Sumber: www.kaorinusantara.or.id)*

Enam bulan menjabat sebagai Direktur Komersial PT KAI, Wimbo sudah menargetkan PT KAI akan membeli 100 lokomotif dan 1.000 gerbong. Setelah meninggalkan kereta api, Wimbo meninggalkan 174 lokomotif dan 2.400 gerbong. Namun, target tersebut harus tertunda sampai 2 tahun kemudian. Kenapa target 6 bulan sampai mundur 2 tahun?

Ini adalah masalah internal pegawai PT KAI yang sangat susah yakin akan perubahan PT KAI. Wimbo menyebutkan bahwa meyakinkan orang dalam itu sangat susah. Banyak lulusan dari kampus terbaik,

tetapi tidak mengerti arah dan karakteristik bisnisnya. Bahkan, suatu ketika, salah satu direksi lulusan ITB mempertanyakan kebijakan target Wimbo dengan nada sangat tidak yakin. “Pak Wimbo, kalau Bapak menargetkan akan membeli 100 lokomotif, apakah sudah punya kontrak?” Wimbo menjawab, “Kalau menunggu kontrak, saya tidak akan buka warung. Apalagi rumah sakit. Menunggu kontrak adalah menunggu orang sakit. Kapan orang sakit, kapan orang akan kecelakaan, ya kan tidak demikian. Saya menargetkan hal itu karena saya tahu dan mengerti pasar. Orang *marketing* itu harus tahu pasar.”

Wimbo menyentil bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan itu adalah orang yang tidak mengerti bisnis. “Kita ini bisnisnya transportasi kereta, saya belikan lokomotif, mereka justru menolak. Kamu itu bisnisnya apa? saya belikan itu tapi nolak. Ya tadi sebenarnya mereka selalu berharap dan menunggu pemberian pemerintah.”

Dulu, pemerintah akan membelikan 10 kereta api dan meminta PT KAI menyumbang 10%, tapi PT KAI tidak mampu sehingga pembelian 10 kereta api dari pemerintah itu batal. “Kalau saya, ya saya akan menyumbang 10% itu. Hal itu logikanya seperti seseorang punya produk dan akan dibelikan alat produksi, tapi tidak mau. Ini sebenarnya masalah pada pola pikir. Kebanyakan pola pikir mereka (karyawan PT KAI) dianggap tidak sesuai.”

Setelah melalui proses yang begitu lama dalam meyakinkan para jajaran PT KAI untuk pembelian 100 lokomotif dan 1.000 gerbong, baru pada 2011 akhirnya Wimbo berhasil meyakinkan mereka dan mengeksekusi target tersebut. Prosesnya cukup lama sejak target itu disampaikan di hadapan jajaran PT KAI pada 2009. Kemudian 2011 dilakukan proses lelang dan pengadaan. Akhirnya, *alhamdulillah* pada 2013 target tersebut bisa terwujud. Andai proses meyakinkan tersebut tidak menghabiskan waktu 2 tahun, tentu PT KAI sudah bisa sangat berkembang dan maju lebih cepat dari saat itu.

Permasalahan lainnya adalah permasalahan sarana dan prasarana PT KAI yang sudah berlabel *No Go Item* tapi masih dioperasikan. Dalam

peraturan PT KAI, ada ketentuan di mana semua aset atau semua peralatan kereta yang berlabel *No Go Item* tidak boleh dioperasikan atau tidak boleh dipakai. Mungkin kalau di bandara itu sudah lampu kuning, *No Go Item* itu tidak boleh jalan.

Namun, pada saat awal-awal Wimbo menjabat, semua sarana dan prasarana PT KAI yang berlabel *No Go Item* itu hanya sebatas istilah. Misalnya, ada banyak lokomotif yang sudah berlabel *No Go Item* tapi masih tetap jalan dan beroperasi. Contohnya lagi, pedal-pedal itu termasuk *No Go Item*. Seharusnya kalau ditekan bunyi alarmnya, banyak yang sudah tidak berbunyi. Ada yang harus diganjol terlebih dulu baru bisa berbunyi. Lampu juga banyak yang berlabel ini, padahal merupakan bagian dari keamanan. “Mentalnya rusak, relnya rusak, keretanya rusak, dan keamanannya rusak. Sehingga kalau dulu berantakan, ya memang berantakan. Tak ada pilihan. Ketika *No Go Item* dijalankan dari Cilacap ke Kroya, perjalanannya langsung berhenti karena memang ada *No Go Item*,” imbuh Wimbo.

BAGAIMANA DIREKSI MEMUPUK SPIRIT TRANSFORMASI PERUBAHAN KEPADA JAJARAN PT KAI?

Transformasi yang terjadi di PT KAI pada dasarnya tidak ada pihak yang meyakinkan dan tidak ada yang memotivasi untuk melakukan perubahan. Tidak ada yang diungkapkan dari direksi dan tidak ada desain untuk melakukan transformasi perubahan, tidak seperti perusahaan lain yang harus menggunakan konsultan dan lainnya. Tidak ada yang diluncurkan bahwa sampai saat ini perusahaan harus sampai di sini, pokoknya pergerakan terjadi tanpa ada *woro-woro*. KAI *new services* tidak ada. Bahkan sebagian besar dari mereka pun (jajaran PT KAI) tidak mau berubah. Lebih parahnya, Wimbo menyebut bahwa jajaran PT KAI pada saat itu adalah sarang maling (menggambil keuntungan yang tidak halal dari PT KAI).

Ia merasa perlu ada perubahan di PT KAI ketika para karyawan menerima kenaikan gaji dari sebelumnya. Pada saat itu, memang di jajaran PT KAI tidak ada yang memaknai perubahan, kecuali gaji naik. Kebijakan itu pada awalnya diambil oleh Ignasius Jonan untuk memacu

... tidak ada yang memaknai perubahan, kecuali gaji naik.

dan meningkatkan kinerja karyawan PT KAI sekaligus melarang semua karyawan untuk korupsi atau mencari pendapatan ilegal di PT KAI. Tentu kebijakan naik gaji terasa tidak baik bagi jajaran PT KAI yang sejak dulu memperoleh pendapatan besar dari aktivitas ilegal di PT KAI. Bahkan, ada yang mengklaim bahwa walaupun gaji naik, pendapatan tetap lebih tinggi yang sebelumnya. Pendapatan yang tidak biasa itu menjadi biasa, lumrah, dan rutin.

Lebih lanjut, Wimbo menceritakan bahwa perubahan tersebut pada dasarnya adalah hasil kreativitasnya dalam menangani sebuah masalah. Bahkan, perubahan itu dilakukan tanpa ada bantuan jasa konsultan seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Keberadaan konsultan, menurut pandangan Wimbo saat itu, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan di PT KAI karena konsultan dirasa tidak mengerti karakteristik dan roh dari bisnis PT KAI. "Konsultan itu tidak paham rohnya bisnis PT KAI." Wimbo menceritakan bahwa pada masanya itu, BCA menyewa jasa salah satu konsultan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas operasional BCA. Konsultan tersebut memberi masukan kepada BCA untuk menutup tabungan atau rekening nasabah yang di bawah Rp500.000 karena dianggap menghabiskan SDM, tenaga, dan biaya. Namun, akhirnya BCA justru kelimpungan. Inilah yang dimaksud Wimbo dengan tidak mengetahui rohnya.

Selain itu, salah satu kebijakan awal yang dilakukan Ignasius Jonan yang menjadi awal perubahan dalam PT KAI adalah perubahan tanggung jawab pelayanan yang sebelumnya ada pada Direktur Operasional,

pada pertengahan 2009 dipindahkan kepada Direktur Komersial. Dengan demikian, tanggung jawab Wimbo bertambah, yang sebelumnya hanya mengelola aset PT KAI menjadi mengurus semua operasional PT KAI. Tak hanya itu, perubahan urutan nomor jajaran direksi PT KAI juga ikut diubah oleh Ignasius Jonan saat itu.

Ketika itu, Wimbo selaku Direktur Komersial awalnya berada di urutan D6, julukan yang mengartikan jajaran direktur paling belakang. Jonan mengubahnya menjadi D1 dengan alasan orang yang mencari uang itu adalah orang yang paling penting, bukan orang yang menghambur-hamburkan uang—Direktur Operasional, dulunya direktur keuangan pada 2009.

JURUS PUNOKAWAN DALAM TRANSFORMASI PERUBAHAN PELAYANAN PT KAI SAAT LEBARAN 2010

Semua transformasi yang terjadi di PT KAI pada dasarnya memang tidak ada sejenis *woro-woro*, maklumat, atau anjurannya untuk melakukan perubahan dalam diri PT KAI. Bahkan pada saat itu, Wimbo merasa bingung menyelesaikan seabrek permasalahan PT KAI. Memulai perubahan dan menyelesaikan permasalahan di PT KAI adalah kebingungan dan keresahan tersendiri dalam hidupnya. Salah satu terobosan dan ide perubahan yang dilakukannya saat Lebaran Idul Fitri pada 2010 adalah membatasi penumpang kereta.

Pada Lebaran 2010, Wimbo mengeluarkan kebijakan terkait harus dibatasinya penumpang kereta. Pada saat itu kebijakan yang diambil adalah penumpang dibatasi sebesar 100%. Maksudnya, jika dalam suatu gerbong kereta itu tersedia 104 kursi, gerbong itu bisa diisi oleh penumpang maksimal menjadi 200 penumpang. Bordes saat itu diperkenankan untuk diisi penumpang sebanyak 20–25 penumpang. Jadi, bila ada dua bordes di tengah, berarti akan ada sekitar 50 penumpang. Dengan be-

gitu, penumpang bisa kelihatan dan tidak terlalu sesak seperti Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itu, Wimbo menyebutkan bahwa ada dua mental yang menjadi penyebab fenomena penumpang melebihi kapasitas dan sangat penuh saat musim mudik Lebaran, yaitu mental masyarakat dan mental petugas.

Penyebab pertama adalah mental masyarakat. Dulu kapasitas penumpang 100, isinya bisa mencapai 300 orang. Isinya jadi tidak kelihatan. Yang terpenting bagi masyarakat adalah naik kereta tanpa peduli apa pun. Gerbong kereta penuh sesak, kaki berdempet-dempetan, dan lainnya. Dulu berdiri saja dengan kaki bisa menempel sudah syukur. Toilet menjadi tempat tujuan sehingga walaupun ada kotoran, asalkan bisa duduk di situ, penumpang pun menjadi puas. Tak hanya itu, masyarakat yang tidak bisa masuk di dalam gerbong malah memaksa naik berbondong-bondong di bagian atas kereta tanpa peduli keselamatan di perjalanan. Yang terpenting dalam benak mereka adalah naik kereta dan pulang kampung tanpa peduli risiko apa pun.

Sebenarnya ada banyak mental buruk petugas PT KAI di setiap jabatannya. Hal itu berkaitan erat dengan penerimaan pendapatan ilegal dari operasional PT KAI. Pada masa Lebaran 2010, misalnya, ada fenomena penumpang di lokomotif yang begitu banyak tapi masinis tidak pernah berani menurunkannya. Masinis itu loyalnya kepada direktur teknik, tidak dengan dirut. Mereka tidak mau menurunkan, tapi akhirnya dipaksa untuk menurunkan. Masinis pun terpaksa mengganti uang penumpang. Mungkin masinis juga setor ke direksi sehingga tidak berani untuk menurunkan penumpang yang begitu banyak. Pada saat itu masinis juga adalah teknisi seperti kebiasaan pada zaman Belanda, kalau lokomotif rusak, masinis yang memperbaiki. Ketika kereta jenis 204 itu menggunakan IT, masinis sudah tidak merangkap sebagai teknisi.

Pada saat itu, Wimbo memisahkan tugas dan tanggung jawab antara masinis dan teknisi. Pada 2010, masinis masih menginduk ke direktur teknik sekarang ganti ke direktur operasional. Jadi, andai masinis me-

nemukan kerusakan, ia pasti tidak mungkin menyalahkan seniornya di tempat kereta. Ada aspek-aspek psikologi di situ. Contohnya, kereta dengan jenis CC 204 tidak bisa diperbaiki kecuali *computerized*.

Dari sisi kondektur, kalau lokomotif sudah penuh, kita tidak bisa keluar dan begitu pun sebaliknya. Intinya, fenomena itu sebenarnya terjadi karena banyak dari penumpang kereta api yang tidak bayar atau bayar kepada kondektur dan tidak masuk ke kereta api. Jadi, ketika Wimbo mengambil keputusan untuk membatasi penumpang menjadi 100% dari kapasitas asal penumpang kereta api, PT KAI mendulang pendapatan yang naik dari biasanya—sebelum penumpang dibatasi 100%. Apalagi, ketika kebijakan AC-nisasi kereta ekonomi selesai, pendapatan PT KAI pun semakin meningkat.

Salah satu pandangan yang ditemukan Wimbo adalah penumpang kereta api sudah memenuhi kereta semenjak di stasiun awal, yaitu Pasar Senen, Jakarta. Hal itu membuatnya penasaran. Seharusnya kereta api sudah mencapai batas penumpang ketika kereta sampai di stasiun akhir, bukan di stasiun awal.

Usut punya usut, ternyata di Stasiun Kota, tempat pemberhentian kereta, teknisi juga ada “main”. Artinya, para teknisi juga ikut berperan dalam menaikkan penumpang semenjak di tempat penyimpanan kereta. Ada kemungkinan hal ini dilakukan bagian teknisi karena mereka bisa mendapatkan penghasilan ilegal dari para penumpang yang ingin naik dari Stasiun Kota. Banyak penumpang sejak di pul sudah naik. Para teknisi “disuap” agar penumpang bisa masuk sebelum kereta berangkat ke Stasiun Senen. Kini mentalitas itu memang sudah tidak ada. “Mulainya itu dari toleransi, tapi toleransi yang keliru. Ya *kayak* kita, lampu rem *nggak* hidup ya tidak apa-apa, lampu sen tidak hidup ya tidak apa-apa,” ujarnya.

Semua orang di PT KAI saat itu memang mencari pendapatan dari kesalahan yang ada di sistem perkeretaapian. Akhirnya, setelah Wimbo mengeluarkan kebijakan kereta ekonomi ber-AC dan penumpang ke-

reta kelas 3 (ekonomi) hanya 100% dari kapasitas asal dan tidak ada subsidi, semua karyawan di PT KAI melakukan perlawanan dan menolak kebijakan tersebut. Tahun 2009 adalah masa di mana kebijakan tersebut mendapat arus penolakan dari banyak pihak, termasuk KDOP, karena kebijakan tersebut dianggap mengancam akan mengurangi pendapatan ilegal mereka, bahkan menghilangkannya.

Alibi KDOP saat itu adalah petugas yang di lapangan merasa kesulitan. Akhirnya, ide pembatasan penumpang diperkuat oleh Ignasius Jonan untuk disampaikan kepada jajaran PT KAI dan akhirnya diterapkan pada Lebaran 2010. Peraturan menteri mengenai kereta api membolehkan kalau kelas 2 toleransi 25%, kelas 3 boleh toleransi 50%, dan komprominya untuk kereta ekonomi adalah 100%. Sebelum itu, pada 2009 tidak ada batasan, sepenuhnya lokomotif.

Di situlah pentingnya *political will* sehingga menjadikan jabatan dengan pengambil keputusan tertinggi meng-endorse ide bawahannya mengenai pembatasan penumpang.

JURUS PUNOKAWAN DALAM REVITALISASI PARKIR

Salah satu kebijakan yang tergolong ide orisinalnya Wimbo sebagai Direktur Komersial PT KAI adalah revitalisasi parkir di setiap stasiun. Proyek revitalisasi parkir pertama itu dilakukan di Stasiun Tawang, Semarang. Kebijakan itu pun tentunya tidak luput dari perlawanan, baik internal PT KAI maupun preman.

Dulu pendapatan parkir sekitar Rp 600 juta per tahun dari seluruh stasiun di Indonesia. Sekarang sehari saja bisa mencapai Rp 400 juta di seluruh Indonesia. Kenapa hal itu ditolak?

Tak lain karena mereka (jajaran PT KAI) juga mendapat uang dari lahan parkir ini di masing-masing stasiun. Polanya adalah uang parkir sebagian masuk ke PT KAI dan sebagian masuk kantong petugas kereta, mulai dari KDOP hingga lainnya. Salah satu stasiun yang pernah diuji

... kunci keberhasilan transformasi PT KAI adalah kerja keras, integritas, dan tidak menerima uang sepeser pun.

(Sulistyo Wimbo)

coba untuk menerapkan kebijakan ini adalah Stasiun Gubeng, Surabaya, namun gagal saat itu.

MOTIVASI UNTUK MELAKUKAN TRANSFORMASI PERUBAHAN

Kata kunci yang bisa menggambarkan lima tahun terakhir perjalanan PT KAI adalah *Continuous Improvement*, yaitu terus-menerus

melakukan perbaikan di PT KAI tanpa mengenal batas dan hari libur.

Salah satu kunci di balik kesuksesan transformasi perubahan di PT KAI adalah ikhlas. Dikisahkan selama menjabat Direktur Komersial, Wimbo bekerja selama tujuh hari seminggu tanpa ada hari libur. Bahkan, ia pernah menyewa hotel dari uang pribadi selama dua tahun untuk mengontrol perbaikan kereta api. Pencapaian yang dianggap sangat spektakuler menurut Wimbo adalah ketika masyarakat bisa membeli tiket, pilih kursi, dan bayar tiket dengan BlackBerry (*smartphone*).

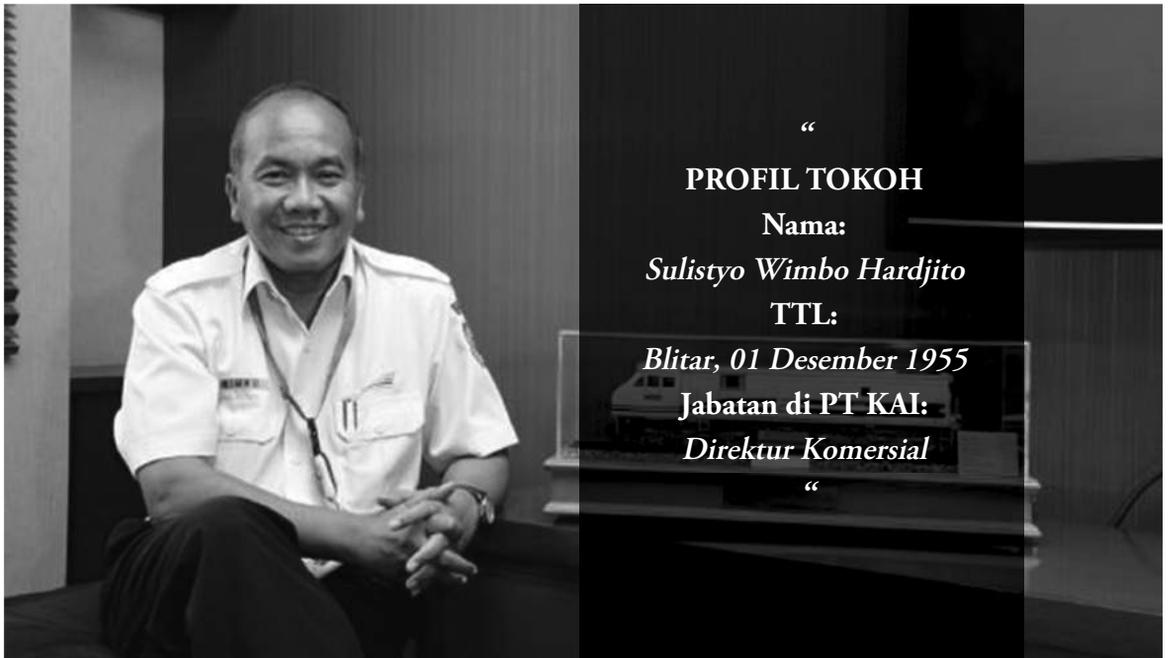
Tak hanya itu, keyakinan untuk menyelamatkan PT KAI dari berbagai permasalahan akut menjadi semangat tersendiri yang selalu memacu aktivitas perubahan. Pada saat itu, Wimbo sangat yakin bisa mengubah wajah perkeretaapian Indonesia dengan bekal pengalaman-pengalamannya. Sesulit apa pun dan serumit apa pun perkeretaapian Indonesia, Wimbo masih sangat yakin untuk bisa melakukan perubahan. Berbekal pengalaman menjadi direksi dan menjabat jabatan pada perusahaan telekomunikasi di Jawa Tengah, ia sangat optimistis.

Ia menceritakan pengalaman selama di Indosat, selama 50 tahun Indonesia merdeka, Indosat hanya memiliki 400.000 SSP (satuan sambungan pasang) di seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada saat itu Wimbo hanya diberi waktu tiga tahun untuk menambah SSP dengan jumlah yang sama. Alhasil, saat Wimbo meninggalkan Indosat pada

1997 seluruh kecamatan Jawa Tengah sudah terpasang *waid drompting*. Pencapaian tersebut tidak pernah terbayang sebelumnya. Pengalaman di Jawa Tengah itulah yang membuatnya selalu penuh keyakinan dalam transformasi di PT KAI di tengah pesimistis jajaran PT KAI.

Sebagai penutup, Wimbo menyampaikan bahwa kunci keberhasilan transformasi PT KAI adalah kerja keras, integritas, dan tidak menerima uang sepeser pun. Bahkan saat Lebaran, Wimbo menginstruksikan agar tidak ada yang mengirim apa pun kepadanya. Akhirnya, semenjak 2010, wajah perkeretaapian Indonesia mulai menunjukkan perubahan hingga mencapai kemajuan sampai saat ini.

Salam Indonesia Maju, yuk naik kereta api!



◆ 18

TRANSFORMASI PERUBAHAN KOTA SURABAYA: POTRET INDONESIA MELAYANI

"Dalam sepekan terakhir, mencuat isu yang membuat warga resah, khususnya warga Surabaya, yaitu mundurnya Wali Kota Tri Rismaharini. Di media sosial, percakapan tentang hal itu juga ramai dibicarakan, terutama setelah sebuah acara televisi swasta mengundang Tri Rismaharini dalam talkshow-nya. Di halaman petisi online Change.org, ada tiga pembuat petisi yang memulai kampanye #SaveRisma yang meminta Wali Kota mengundurkan niatnya untuk mengundurkan diri."

—korankota.co.id

Kira-kira apa yang menyebabkan munculnya gelombang penolakan masyarakat Surabaya atas isu mundurnya Risma dari kursi Wali Kota Surabaya pada saat itu? Tentu, karena Risma berhasil memimpin Pemkot Surabaya melakukan perubahan di Surabaya.

Pada saat itu, Pemkot Surabaya sudah terbukti kinerjanya dalam membangun Kota Pahlawan, Surabaya. Masyarakat Surabaya sudah sangat percaya dengan pemerintah Surabaya. Pemkot Surabaya dianggap

sukses mengubah wajah Surabaya menjadi kota yang jauh lebih bersih, hijau, dan bermartabat. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah sukses menyulap lingkungan Surabaya menjadi sangat baik. Beberapa kegiatan sudah digalakkan, mulai dari menata pemukiman kumuh, menghijaukan taman, menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, mereformasi pelayanan publik, bahkan hingga mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Surabaya.



► *Ilustrasi pemukiman kumuh (Sumber :www.kompasiana.com)*

Dulu, sebelum 2010, Surabaya memang terkenal dengan kota yang kumuh, minim ruang terbuka hijau, penuh sampah, punya seabrek masalah lingkungan dan sosial, hingga adanya masalah arus urbanisasi yang luar biasa. Akibatnya, Kota Surabaya dilabeli sebagai kota dengan sederet masalah yang tidak berkesudahan. Semuanya menjadi pekerjaan rumah bagi siapa pun yang memimpin Surabaya saat itu. Namun, akhirnya itu semua tinggal kenangan. Wajah Surabaya sekarang sudah jauh berbeda dengan kondisi Surabaya pada sebelum 2010. Surabaya

menjadi kota yang bersih dan penuh taman. Salah satu buktinya adalah pemugaran Taman Bungkul di tengah kota. Dulunya, taman tersebut tidak layak disebut taman, namun kini Taman Bungkul menjadi taman terbesar dan terkenal di Kota Surabaya.

Perubahan wajah Surabaya yang signifikan memang tidak bisa lepas dari tangan dingin Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menjabat sejak 28 September 2010 dan dilanjutkan masa bakti periode jilid kedua dari 2016–2021. Wali kota lulusan Arsitektur ITS ini melakukan berbagai terobosan kebijakan dan langkah konkret yang tiada henti dalam membangun Surabaya. Tak hanya kebijakan, bahkan Risma tidak segan-segan ikut *blusukan* menyusuri sudut-sudut Surabaya untuk memastikan masalah-masalah di Surabaya terselesaikan. Berbagai program pelayanan publik sudah dicetuskan untuk mewujudkan Surabaya yang bisa menjadi seperti saat ini.

MENGUBAH WAJAH KOTA SURABAYA

Menjadi wali kota dengan 3,2 juta penduduk tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Tri Rismaharini. Dengan luas wilayah 33 ribu hektare, Surabaya membutuhkan sentuhan khusus saat ditata wajah dan juga penghuninya. Pada 2009, Surabaya memiliki masalah dengan ruang terbuka hijau dan taman yang tidak terurus. Risma mengatakan, “RTH baru mencapai 20,70%, sedangkan target RTH di Kota Surabaya kelak mencapai 35%. Saat ini, kita sedang membangun taman kota seluas 60 hektare. Baru lima hektare yang selesai dibangun. Konsepnya adalah taman berbunga dan berbuah. Untuk perawatannya, nanti kita menggandeng BNI dari sisi pembiayaannya.” (<http://kotaku.pu.go.id>)

Dari permasalahan itu, Pemkot Surabaya terus berupaya mempercantik wajah Kota Surabaya. Proyek ini dimulai dari penataan kelurahan. Sejumlah taman telah dibangun dan direvitalisasi guna menyegarkan pemandangan sekaligus menambah ruang terbuka hijau. Di Taman Bulak dan Taman Ronggolawe, Pemkot Surabaya memasang fasilitas

Wi-Fi. Tujuannya adalah mengajak warga betah beraktivitas di taman sembari berselancar di dunia maya.



- ▶ *Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Risma mengimbau warga untuk tidak membuang sampah di Taman Bungkul (Sumber: www.encycity.com)*

Ada juga taman yang dilengkapi perpustakaan. Tak hanya bersantai, warga juga didorong untuk mau membaca dan menambah pengetahuan. Pemerintah Surabaya menargetkan nantinya setiap kelurahan di Kota Surabaya punya taman. Target satu kelurahan satu taman ini sejalan dengan rencana Pemkot Surabaya untuk menambah luas ruang terbuka hijaunya secara bertahap.

Sebagian taman merupakan proses revitalisasi dari kondisi sebelumnya yang tidak terurus, ada juga taman yang murni dibuat oleh Pemkot Surabaya. Di antaranya adalah pemugaran Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep *all-in-one entertainment park*. Berkat kinerja keras dalam melakukan revitalisasi taman, akhirnya Taman Bungkul ini menjadi taman terbaik se-Asia pada 2013.

Ada pula taman di Bundaran Dolog, Taman Buah Undaan, taman di Bawean, dan Taman Lansia di sudut Jalan Biliton dan Jalan Kalimantan.

Taman Flora yang ada di Jalan Bratan dilengkapi fasilitas internet dan perpustakaan. Taman Prestasi di tepian Kalimas Kota Surabaya adalah taman yang diambil alih dari bekas SPBU dan dibangun di jalur hijau untuk dijadikan taman.

Tak hanya taman, ruang terbuka hijau di Surabaya juga diperluas dengan mengembangkan hutan kota. Hutan kota Balas Klumprik dan Pakal menjadi contoh nyata upaya Pemkot Surabaya mengembangkan paru-paru udara bagi kota terbesar kedua di Indonesia ini. Bahkan, di Hutan Pakal, seluruh buah di Indonesia ditanam.

Keputusan untuk menyediakan sebanyak mungkin ruang terbuka hijau seperti taman kota dan hutan bukan saja terkait dengan masalah ekologi. Lebih dari itu, sebetulnya ini merupakan komitmen dari pemerintah kota untuk memberikan akses hiburan murah seluas-luasnya kepada masyarakat. Di tengah kehidupan kota Surabaya, kebutuhan akan ruang terbuka hijau menjadi mutlak adanya. Taman-taman kota ini menjadi semacam oase untuk sekadar melepas penat dengan cara yang murah. Jika Raja Midas mampu mengubah segala sesuatunya menjadi emas, Pemkot Surabaya pun demikian, yaitu mampu membuat seluruh isi kota menjadi hijau sehingga masyarakat menjadi bahagia dan memiliki banyak hiburan dan bersantai di tempat yang menyenangkan.

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DENGAN *E-GOVERNMENT*

Sering mendengar kata *e-budgeting* dan *e-procurement*? Dalam dunia pemerintahan, dua hal tersebut bukanlah sesuatu yang tabu. Faktanya, Surabaya terkenal sebagai kota yang pertama kali menerapkan *e-budgeting* dan *e-procurement* sejak 2002, bahkan sebelum Presiden mengeluarkan Keppres No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencantumkan sistem lelang elektronik.

Atau, masih ingatkah insiden jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 dari Surabaya ke Singapura pada akhir Desember 2014? Pada saat itu, Pemkot Surabaya hanya menerima daftar nama penumpang dari pihak

AirAsia. Dengan sistem informasi kependudukan yang akurat, hanya dalam hitungan detik alamat korban yang berdomisili di Surabaya langsung dapat diketahui.

Terakhir, warga Surabaya yang ingin mengajukan akta kelahiran tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan setempat. Cukup masukkan nama ayah, ibu, dan anak yang baru lahir serta alamat rumah melalui *e-kiosk*, maka secara otomatis dalam tiga hari akta akan dikirimkan ke rumah. Begitu mudah bukan pelayanan publik di Surabaya?

Tiga potret pelayanan publik itu menjadi fragmen kesuksesan Pemerintah Surabaya dalam membangun kota Surabaya dengan konsep *Smart City*. Pelayanan yang berbelit-belit dan tidak terintegrasi kini berubah menjadi pelayanan prima dan memanjakan masyarakat.

Perwujudan *Smart City* merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan 101 taman kota *free Wi-Fi*, hingga pembuatan pelayanan masyarakat yang dapat diakses melalui internet atau disebut dengan *E-Government*. Pembangunan *E-Government* juga bertujuan agar pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, juga sebagai wujud transparansi antara masyarakat dan pemerintah, serta untuk menghindari terjadinya KKN di lapangan.

E-government merupakan program yang menyajikan pelayanan untuk masyarakat yang dapat diakses secara *online*. *E-Government* sendiri terdiri dari E-SDM yang berfungsi untuk mengakses soal tes PNS, pengajian pegawai secara berkala, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun.

Kemudian ada *e-monitoring* yang berfungsi memantau tiap kejadian lalu lintas, sampah, pemakaman, dan penertiban reklame melalui CCTV. Dengan hal ini, permasalahan kemacetan lalu lintas, sampah, dan lainnya bisa dipantau secara baik oleh Pemkot Surabaya.

Selain itu, ada juga *e-health* yang berfungsi mengatur registrasi urusan kesehatan masyarakat Surabaya, mulai dari daftar rawat inap, konsultasi obat, hingga lain sebagainya seputar kesehatan. Ada pula *e-education* yang berfungsi untuk melakukan proses penerimaan murid baru, *tryout online*, rapor *online*, penerimaan kepek *online*, dan radio visual.



► Tampilan situs e-kiosk Pemkot Surabaya (dok.pribadi)

Di samping itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pendekatan dalam penerapan sistem pelayanan publik yang dibangun dengan menyesuaikan kemajemukan lokal yang ada di masyarakat Surabaya. Hal ini diwujudkan dengan adanya tiga mode bahasa di aplikasi *e-kiosk* (Kios Pelayanan Publik), yakni bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Jadi, warga semakin mudah memahami cara kerja aplikasi yang terdapat di *e-kiosk*, di antaranya *e-health* (aplikasi layanan kesehatan) dan *e-Lampid* (aplikasi pengurusan data kelahiran, kematian, kepindahan, dan kedatangan), tentunya dengan mode bahasa yang mereka pahami.

Salah satu terobosan brilian dalam meningkatkan investasi di Surabaya adalah pembuatan Surabaya Single Window (SSW), aplikasi untuk memangkas birokrasi berbagai perizinan. SSW dapat digunakan untuk mengurus perizinan mulai dari izin membuat perusahaan, izin reklame, sampai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebelum ada aplikasi SSW, perizinan IMB di Surabaya tidak pernah sekalipun mencapai target penerimaan daerah. Namun, setelah aplikasi ini berjalan, target bisa

tercapai. Selain memangkas birokrasi, survei dalam prosedur perizinan IMB juga sudah bisa dilakukan secara *realtime* dan *online*. Oleh karenanya, tak heran kalau Kota Surabaya menjadi tuan rumah perhelatan Forum *Smart City* kedua yang diselenggarakan Smart Indonesia Initiatives Forum pada 20–21 Juli 2016.

COMMAND CENTER SURABAYA-PELAYANAN TERPADU DI SIOLA

Selain menerima aduan darurat dari masyarakat melalui nomor pengaduan 112, fungsi *Command Center* juga memantau kondisi kota melalui kamera CCTV yang tervisualisasi lewat visual di layar monitor berukuran besar, termasuk juga memantau ketinggian air sungai. Selain itu, *Command Center* juga terhubung dengan beberapa instansi terkait seperti PMI, Basarnas, juga kepolisian.

Command Center yang berada di Siola juga memiliki pelayanan terpadu dengan beberapa dinas dan instansi Pemkot. Beberapa dinas dan instansi yang terkait pelayanan publik dan perizinan itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), semuanya ditempatkan dalam satu lokasi. Tujuannya adalah memudahkan pelayanan kepada publik. Kebijakan tersebut bertujuan agar pelayanan di Siola hidup sampai pagi. Tidak semua orang bisa mengurus pelayanan pada pagi atau sore hari karena harus bekerja.

Sejak diresmikan Wali Kota Surabaya pada akhir Juli 2016 lalu, *Command Center* telah efektif melayani aduan darurat masyarakat melalui nomor pengaduan 112. Nomor tersebut bisa diakses 24 jam dan bebas pulsa. Ketika warga menelepon ke nomor 112 dan menyampaikan laporannya, petugas segera menghubungi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segera menindaklanjuti laporan itu dengan menerjunkan petugas ke lokasi. Pusat kendali ini juga bisa memangkas

alur birokrasi penanganan bencana. Bila selama ini dinas yang menangani masalah darurat seperti Dinas Kebakaran atau Bakesbang Linmas ataupun lainnya memiliki posko sendiri-sendiri, kini dengan *Command Center*, SKPD tersebut akan disinergikan dalam satu ruangan untuk memantau kondisi kota selama 24 jam dan menerima laporan masyarakat.

SAMPAH UNTUK PEMBANGUNAN SURABAYA

Pada 2014 Kota Surabaya terpilih menjadi tuan rumah Hari Peduli Sampah 2014. Alasannya, Kota Surabaya dinilai berhasil mengelola sampah. Selain itu, Kota Surabaya juga menerima tiga piala juara pertama, yang salah satunya terkait pengelolaan sanitasi, subbidang pengelolaan sampah pada Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) 2014. Sebagai kota terbaik dalam bidang pengelolaan sampah, Wali Kota Tri Rismaharini telah melakukan berbagai inovasi dan upaya untuk menekan volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang berhasil diolah dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat serta dapat digunakan untuk membangun taman-taman kota.

Surabaya menghasilkan rata-rata 1.500 ton sampah per hari. Sampah tersebut tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan kembali itu berupa pengolahan sampah menjadi kompos untuk tanaman di taman kota, untuk bahan pembangkit listrik, dan sebagian lagi direproduksi menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Untuk kebutuhan kompos tanaman di taman-taman kota Surabaya, Pemkot Surabaya sudah mendirikan banyak depo sampah untuk menyelesaikan masalah sampah sekaligus menyuplai pupuk untuk tanaman di taman tersebut.

Di Depo Jambangan, misalnya, sampah organik tersebut diolah dengan metode *composting* “kue lapis”. Metode ini menumpuk sampah organik dengan tumpukan daun kering menjadi beberapa lapis. Bagian bawah didasari dengan tumpukan daun kering agar sampah organik ti-

dak menjatuhkan air yang menyebabkan aroma busuk dan belatung. Pada hitungan hari tertentu, susunan sampah dan daun kering dibalik dan dicampur hingga berusia 21 hari. Dari 21 hari ditambah 5 hari lagi untuk proses pengeringan. Tidak susah juga untuk mendapatkan daun-daun kering, pengelola depo bekerja sama dengan Dinas Kebersihan untuk menampung semua daun kering yang dibersihkan dari jalanan kota.

Di samping tempat *composting* pupuk ada tempat khusus pengolahan sampah anorganik. Sampah-sampah dari rumah penduduk itu dipilah menjadi beberapa kategori, dari sampah kemasan, plastik warna, plastik transparan, kertas, botol plastik, dan kaleng. Hasil pilahan dijual ke pengepul. Sebanyak 70% hasil penjualan untuk pemilah, 10% untuk tabungan hari raya, 10% untuk simpan pinjam, dan 10% lagi untuk biaya operasional. Sebanyak Rp 6 juta bisa dihasilkan dalam sebulan dari hasil penjualan sampah anorganik itu.



- ▶ *Ibu Risma berpartisipasi membantu petugas kebersihan membersihkan sampah di area Jembatan Merah (Sumber: www.jakartapost.com)*

Berdirinya Depo Jambangan sebagai pengolahan sampah organik juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdiri di atas lahan

2.900 meter persegi dengan bangunan gudang berukuran 20 x 15 meter persegi, PDU Jambangan mempekerjakan 14 orang pegawai. Lima pegawai adalah warga kelurahan Jambangan, sisanya warga eks lokalisasi Dolly.

Pegawai pria bertugas mengambil operator alat *pressure* dan pengolahan *composting*, sementara pegawai perempuan memilah sampah. Selain dapat keuntungan dari hasil penjualan sampah anorganik, mereka juga digaji oleh Pemkot Surabaya sebesar Rp 70 ribu per hari per orang. Selain pupuk, konsep pemanfaatan sampah sebagai bahan pembangkit listrik juga dilakukan Pemkot Surabaya. Salah satu terobosan ini terwujud di tempat pembuangan akhir (TPA) Kecamatan Keputih. Bahkan, di tempat ini, kapasitasnya sudah 60.000 kilowatt. Selain di TPA Keputih, dua rumah kompos milik Pemkot Surabaya di Bratang dan Wonorejo ternyata juga mampu menghasilkan listrik untuk penerangan taman kota. Rumah kompos Wonorejo mampu menghasilkan 8.000 watt dan rumah kompos Bratang menghasilkan 6.000 watt, semua itu digunakan untuk menerangi taman kota.

Selain untuk keperluan penerangan taman, tempat pembuangan akhir (TPA) Kota Surabaya dengan inovasinya juga mampu memproduksi listrik untuk dijual ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 2 megawatt per hari. Bahkan, Pemkot Surabaya menargetkan program listrik dari hasil kelola limbah sampah akan ditingkatkan dan optimis pada awal 2019 Surabaya bisa menjual 11 megawatt per hari ke PLN.

DOLLY MENJADI KAMPUNG LITERASI BACA DAN WISATA

Wajah Dolly yang terletak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sekarang sudah berbeda bila dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Bila dulu Dolly menjadi tempat prostitusi dan gemerlap dunia hiburan malam, kini kondisinya malah bikin pangling.

Setelah ditutup sebagai lokalisasi oleh Wali Kota Tri Rismaharini pada Juni 2014 lalu, kini Dolly sudah menjadi tempat ekonomi baru bagi pelaku usaha UMKM. Dolly sebagai tempat lokalisasi mulai terkikis.

Selain dijadikan sebagai sentra pelaku usaha UMKM, Dolly kini sudah dinobatkan sebagai kampung literasi baca dan wisata. Pemkot Surabaya bekerja sama dengan komunitas Surabaya mengubah pandangan Dolly dari yang sebelumnya negatif menjadi positif sehingga dinobatkan sebagai kampung literasi baca dan wisata. Di samping itu, Pemkot Surabaya juga menyadarkan dan mengajak anak-anak untuk berbenah agar mau kembali ke sekolah, bahkan sekarang sudah ada yang kuliah. Kini, warga Dolly sudah sangat mengerti dan paham bahwa kini kampungnya menjadi tempat wisata dan bisa dijual. Oleh karenanya, warga secara terus-menerus mempercantik setiap sudut kampungnya.

“
PROFIL TOKOH

Nama:

Tri Rismaharini

TTL:

Kediri, 20 November 1961

Jabatan:

*Wali Kota Surabaya
(2010–sekarang)*

“



◆ 19

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN): PELAYANAN BPN SEMAKIN MENDEKATI MASYARAKAT

Pendapatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2015 sudah mencapai Rp 3 triliun. Pendapatan tersebut dicapai setelah BPN melakukan revolusi pelayanan di seluruh Indonesia.

Meningkatnya pendapatan sebagian besar berasal dari permohonan yang tinggi untuk pembuatan sertifikat dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara permohonan yang tinggi ditopang oleh pelayanan yang agresif di setiap daerah. Di era kepemimpinan Menteri Ferry Mursyidan Baldan, layanan pertanahan tidak hanya berhenti di kantor BPN atau pada saat jam kerja. Setiap daerah memiliki inovasi pelayanan yang khas sehingga masyarakat dengan mudah mau mengurus hak-hak atas tanah mereka.

Permasalahan yang sering terjadi pada BPN adalah permasalahan terhadap pelayanan. Apabila menginginkan banyak masyarakat untuk mengurus hak-hak tanahnya, seyogianya BPN pun memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Permasalahan pelayanan ini ter-

jadi ketika masyarakat tidak mau mengurus hak-hak tanahnya karena proses dan biaya yang cukup rumit serta kurangnya kejelasan prosedur. Banyak masyarakat yang sudah khawatir terlebih dulu saat akan mengurus hak-hak tanahnya karena hal tersebut. Ini mengakibatkan banyak masyarakat yang acuh terhadap pengurusan hak-hak tanahnya, bahkan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan, baik dari oknum di dalam BPN itu sendiri, yang memainkannya dengan menaikkan harga dan mempersulit prosedur, maupun dari luar BPN yang bertindak sebagai calo pengurusan hak-hak tanah tersebut.



► *Ilustrasi lambatnya layanan administrasi (Sumber : www.poskotanews.com)*

Permasalahan tersebut ditangkap dengan baik oleh BPN dalam melayani masyarakat yang mempunyai keinginan baik untuk mengurus hak-hak tanahnya. Pengurusan sertifikat tanah yang cepat saat ini sudah bisa diurus sendiri oleh individu masing-masing dengan datang langsung ke kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Di setiap kantor BPN telah disediakan *barcode* atau pin di setiap antrean kepengurusan hak-hak tanah. Permintaan bayaran lebih di loket-loket pun bisa di-

mintakan buktinya karena BPN sudah punya standarnya. Bahkan, lamanya proses sudah bisa dilihat di *barcode*-nya.

Hal tersebut memberikan sebuah kepastian kepada masyarakat terkait biaya dan waktu yang selama ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat dalam mengurus urusan pertanahannya.

Permasalahan lainnya yang dianggap cukup mendominasi dalam kurangnya keinginan masyarakat mengurus hak-hak tanahnya sendiri adalah waktu yang tidak pas. Jam buka kantor BPN sama seperti jam kerja kantor lain pada umumnya. Ternyata ini menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang ingin mengurus hak-hak tanahnya. Banyak individu yang tidak jadi mengurus pertanahan ke BPN karena bentrok dengan jam masuk kantornya. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan, baik dari oknum di dalam BPN itu sendiri, yang memainkannya dalam menaikkan harga dan mempersulit prosedur, maupun dari luar BPN yang bertindak sebagai calo pengurusan hak-hak tanah tersebut.



► *Gedung Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)*
(Sumber: www.bpn.go.id)

Menteri Agraria dan Tata Ruang saat itu, Ferry Mursyidan Baldan, menginstruksikan kepada seluruh kantor BPN untuk buka pada Sabtu dan Minggu. Dengan demikian, tidak ada alasan jam kantor yang sama bagi masyarakat untuk mewakilkan pengurusan hak-hak tanahnya. Pegawai BPN yang mendapatkan tugas untuk melayani masyarakat pada Sabtu dan Minggu dengan penuh perhatiannya menggeser waktu liburannya di antara Senin sampai Jumat. Langkah ini diambil demi meningkatkan pelayanan BPN. Hal ini pun menjadi bentuk kemudahan pelayanan masyarakat perkantoran untuk mengurus surat-surat pertanahan.

Setelah membuka kantor pelayanannya pada Sabtu dan Minggu, BPN juga mengoptimalkan pelayanannya dengan tidak hanya menunggu di dalam kantor, tetapi juga mengembangkannya dengan menjemput bola. BPN membuka pelayanan di mana masyarakat dapat menjangkaunya lebih dekat. Pelayanan tersebut dapat ditemui baik di *car free day* (CFD) maupun di pusat perbelanjaan di Jabodetabek. Pada arena CFD di seluruh wilayah Indonesia akan dibuka kantor pelayanan pertanahan *online*. *Event* tersebut dapat digunakan untuk 7 layanan utama, yakni pengecekan sertifikat hak atas tanah, pendaftaran SK untuk hak milik, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Hapusnya Hak Tanggungan Roya, Pendaftaran Blokir, serta Perubahan dari HGB ke Hak Milik (RSS) dan Sita.

Pelayanan seperti ini menjadi bagian dari strategi setiap kantor pertanahan di seluruh Indonesia: membuka inisiatif untuk pelayanan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Pelayanan ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat, khususnya untuk kemudahan pelayanan sertifikasi tanah.

◆ 20

BUSWAY: REVOLUSI PELAYANAN TRANSPORTASI IBU KOTA

Analoginya, kemacetan di Jakarta sudah menjadi penyakit akut yang hingga kini belum ditemukan obat manjur untuk mengobatinya. Dari masa ke masa, yang bisa dilakukan hanyalah mengurangi volume kemacetan di jalanan Jakarta dengan berbagai cara, termasuk penyediaan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman. Entah bagaimana bila 2004 silam Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, tidak berani mengambil kebijakan penyediaan transportasi publik yang sekarang dikenal dengan Transjakarta atau Busway, sudah bisa dipastikan Jakarta saat ini akan macet total dan lumpuh karena volume kendaraan yang terus meningkat, sedangkan tidak ada penambahan jumlah jalan di Jakarta.

SUTIYOSO: BAPAK BUSWAY DKI JAKARTA

Kini, bus Transjakarta sudah menjadi salah satu moda transportasi massal yang menjadi alternatif pilihan bagi siapa pun yang datang ke

Jakarta, baik itu warga maupun pelancong. Bus Rapid Transit (BRT) Jakarta atau lebih dikenal dengan *busway* dikelola oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan mulai beroperasi pada Januari 2004. Bus Transjakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Busway ini merupakan sebuah ide revolusioner yang diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Sutiyoso. Ia menginginkan adanya moda transportasi massal yang terintegrasi dan memiliki jalur tersendiri sebagai alternatif pemecah kemacetan.



► *Ilustrasi transportasi publik di Kolombia (Sumber: www.jakarta.go.id)*

Ide ini pada dasarnya mencontoh moda transportasi yang serupa di Bogota, Colombia. Sutiyoso dengan beberapa pakar transportasi waktu itu merumuskan pengoperasian Transjakarta dengan jalur khusus. Pada awal pelaksanaannya, hal ini dianggap ide yang aneh dan tidak propublik karena jalur yang dibuat oleh Transjakarta mengambil jalur jalan utama yang awalnya dapat digunakan oleh mobil atau kendaraan lainnya. Jalur yang tadinya secara horizontal atau sejajar dapat digunakan 3 mobil bersamaan, sekarang hanya dapat digunakan oleh 2 mobil secara bersamaan.



Kalau naik ojek kan mahal, sementara Transjakarta nyaman, adem, dingin

Hal ini tentu saja mengundang protes dari kalangan masyarakat pemilik kendaraan. Protes bahkan datang dari angkutan umum lainnya yang khawatir pendapatan mereka akan berkurang jika moda transportasi massal ini jadi beroperasi, apalagi dengan tarif yang lebih murah. Namun, pilihan tangan dingin Sutiyoso

sebagai pengambil kebijakan saat itu ternyata tepat, visioner, bahkan revolusioner. Beliau tidak bergeming dengan berbagai protes yang ada, tetapi tetap pada pendiriannya bahwa moda transportasi massal ini harus beroperasi karena pasti akan bermanfaat nantinya bagi masyarakat Jakarta.

Benar apa yang dipikirkan oleh Sutiyoso dulu. Keberadaan Transjakarta paling tidak hingga saat ini menjadi satu-satunya angkutan yang bisa memecah kemacetan di jalanan Jakarta, selain kereta api *commuter line* tentunya.

Sebenarnya, pada saat itu Sutiyoso dihadapkan di antara dua pilihan, yaitu membangun *subway* (kereta bawah tanah) yang menelan biaya sangat besar dan diperkirakan rampung setelah masa jabatannya habis atau membangun Transjakarta dengan biaya yang lebih murah dan bisa diresmikan saat dirinya masih menjabat sebagai orang nomor satu di DKI.

Sutiyoso yang saat itu dikenal sebagai sosok nekat memilih opsi kedua. Baginya, Transjakarta dapat menjadi solusi kemacetan Ibu Kota dengan biaya yang murah dan tempo pembangunan yang relatif cepat. Realisasi pembangunan Transjakarta pada masa kepemimpinan Sutiyoso sangat cepat. Tujuh koridor adalah bukti pengabdianya kepada pengguna jasa transportasi publik di Jakarta.

Rinciannya, pada 2004 hanya koridor I (Blok M–Kota) yang beroperasi. Setahun berjalan, ternyata kehadiran Transjakarta mendapatkan sambutan yang positif dari warga Ibu Kota. Sutiyoso pun semakin per-

caya diri untuk mengembangkan transportasi ini dengan membangun koridor-koridor di jalur utama Jakarta. Akhirnya, pada awal 2006, dua koridor yaitu koridor II (Pulogadung–Harmoni) dan koridor III (Harmoni–Kalideres) diresmikan. Bermodal keyakinan bahwa transportasi ini bakal banyak peminat, pada Januari 2007, empat koridor yaitu koridor IV (Pulogadung–Dukuh Atas), koridor V (Kampung Melayu–Ancol), koridor VI (Ragunan–Dukuh Atas), dan koridor VII (Kampung Rambutan–Kampung Melayu) juga diresmikan.

Jelang masa jabatannya selesai pada Agustus 2007, Sutiyoso kembali membangun satu koridor, yakni koridor VIII (Lebak Bulus–Harmoni). Namun, koridor itu belum selesai ketika Sutiyoso harus lengser dan digantikan oleh Fauzi Bowo.

Ketika pertama kali resmi beroperasi pada 15 Januari 2004, Transjakarta menggratiskan ongkos penumpang selama dua minggu. Mulai 1 Februari 2004 diberlakukan tarif Rp2000. Tarif kembali disesuaikan menjadi Rp3500 pada 2012. Dedikasi Sutiyoso mengenai sistem transportasi BRT pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan ini mengadopsi sistem transportasi yang sama seperti di Kota Bogota, Colombia. Dengan prestasi dalam sektor transportasi ini, Sutiyoso sering disebut sebagai Bapak Busway DKI Jakarta.

“Kalau naik ojek mahal, sementara Transjakarta kan nyaman, adem, dingin,” ujar Wati pada Kumparan, Kamis (26/1).

FAUZI BOWO DAN PERBAIKAN OPERASIONAL TRANSJAKARTA

Di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo, pengembangan Transjakarta memang terasa lambat. Pengoperasian koridor VIII yang seharusnya dilakukan awal Maret 2008 tertunda beberapa kali karena ketersediaan bus yang belum mencukupi. Dengan sedikit dipaksakan, akhirnya pada Februari 2009 koridor ini pun beroperasi.

Melihat antusiasme masyarakat terhadap Transjakarta yang terus meningkat, dua koridor yaitu koridor IX (Pinang Ranti–Pluit) dan ko-

ridor X (Cililitan–Tanjung Priok) dibangun. Keduanya dioperasikan pada awal 2011. Terakhir, satu koridor lagi, yaitu koridor XI (Kampung Melayu–Pulogebang), telah diresmikan pada Desember 2011.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap moda transportasi Transjakarta saat itu, Gubernur Fauzi Bowo telah melakukan penambahan 94 bus, terdiri dari 25 bus gandeng dan 69 bus *single*, sehingga total armada Transjakarta yang beroperasi di 10 koridor mencapai 524 bus. Di samping itu, dilakukan pula sterilisasi jalur, pembangunan portal, penyempurnaan marka, serta peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas pendukung Transjakarta. Upaya ini telah meningkatkan penumpang Transjakarta dari 83,2 juta orang pada 2009 menjadi 86,9 juta orang pada 2010.

Sekalipun pengembangan koridor Transjakarta melambat pada era Gubernur Fauzi Bowo, di sisi lain ia memberikan banyak perubahan untuk Transjakarta melalui langkah merapikan sistem pelayanan dan operasional Transjakarta. Berbagai macam sistem pelayanan dan operasional Transjakarta berhasil diselesaikan pada era Fauzi Bowo.

Dedikasi lainnya yang telah diberikan Fauzi Bowo untuk Transjakarta adalah mengubah status Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) menjadi BLU penuh. Dengan status BLU penuh, Transjakarta mulai belajar mandiri dan bertanggung jawab kepada gubernur, sedangkan Dinas Perhubungan DKI hanya menjadi badan pengawas terhadap kinerja BLU.

Badan Layanan Penuh diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan manajemen sendiri. Status ini juga menjadikan Transjakarta fleksibel dalam mempekerjakan tenaga profesional non-PNS. BLU juga mempunyai kebijakan penuh sehingga boleh berhubungan dengan perbankan untuk memperoleh kredit. Dengan demikian, Transjakarta lebih luwes dan fleksibel. Sementara untuk mendukung transparansi keuangan, pemerintah pada akhir tahun akan menempatkan auditor keuangan untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran pendapatan.

JOKOWI-AHOK: MENINGKATKAN PENUMPANG TRANSJAKARTA HINGGA TRANSJAKARTA CARES

Masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi ini terus menyempurnakan kebijakan Transjakarta dari pemerintahan sebelumnya. Satu tahun pertama menjabat Gubernur, Jokowi meresmikan peluncuran sistem *E-ticketing* Transjakarta pada Selasa (22/1/2013) di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam peresmian sistem *E-ticketing* ini, Pemprov DKI Jakarta menggandeng beberapa bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Central Asia (BCA) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank DKI untuk membantu melayani pembayaran tiket bus Transjakarta.

Penerapan *E-ticketing* ini bertujuan membantu para pengguna Transjakarta untuk lebih cepat dan praktis dalam pembelian tiket. Pada saat itu, Pemprov DKI Jakarta baru menerapkan *E-ticketing* pada koridor 1 dengan tujuan Blok M–Kota, sementara koridor lainnya baru dimulai pada Februari–April 2013.

Tahap berikutnya, tepatnya pada Sabtu (21/2/2015), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kemudian menyatakan seluruh 12 koridor Transjakarta resmi menggunakan *E-ticketing*. *E-ticketing* pada saat itu tidak hanya beroperasi di koridor 1, namun di seluruh koridor Transjakarta yang ada. Peresmian Transjakarta 100% *full E-ticketing* digelar di Halte Busway Manggarai, Jakarta Selatan.

Tak sampai di situ, duet Jokowi-Ahok memimpin DKI Jakarta juga memberikan status baru untuk Transjakarta. Perubahan status tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta pada (27/3/2014). Gubernur Jokowi menandatangani akta peresmian PT Transjakarta di Balairung Balai Kota. Transjakarta yang sebelumnya berstatus Badan

Layanan Umum (BLU) penuh sejak tanggal tersebut sudah berubah menjadi PT. Dengan begitu, PT Transjakarta menjadi salah satu BUMD yang dimiliki oleh DKI Jakarta.



- ▶ *Presiden Jokowi (saat masih menjabat Gubernur DKI) meresmikan E-ticketing Transjakarta. Selain praktis, e-ticketing memiliki kegunaan yang multifungsi. (Sumber : www.tempo.co)*

Transjakarta dikelola oleh PT Jakarta Propertindo. Pembagian saham dalam PT Transjakarta ini adalah 99% milik Pemprov DKI Jakarta dan 1% milik Jakarta Propertindo. Dengan kata lain, PT Transjakarta 100% dimiliki Pemprov DKI.

Pada 2015, jumlah penumpang yang dilayani Transjakarta hanya 102 juta. Jumlah rata-rata penumpang per hari adalah 207.000 orang. Dengan pencapaian itu, akhirnya PT Transjakarta menerapkan *tagline* “Berani Berubah” pada 2016. Berbagai perubahan dilakukan untuk meningkatkan jumlah penumpang bus Transjakarta. Harapannya, kenaikan jumlah penumpang bus Transjakarta dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Perlahan pencapaian naik dan pada Mei 2016 berhasil melampaui pencapaian 2014 dan 2015. Transjakarta berhasil *reborn* pada Mei 2016. Ketika itu, jumlah penumpang bus Transjakarta mencapai 10 juta orang. Angka ini merupakan jumlah terbesar selama bus Transja-

karta beroperasi. Jumlah penumpang terus meningkat pada bulan-bulan selanjutnya.

Pada Oktober 2016, PT Transjakarta mencapai rekor jumlah penumpang terbanyak, yaitu 12,3 juta orang. Kenaikan ini bisa terjadi karena ada penambahan armada bus yang signifikan. Pada 2015, jumlah bus Transjakarta hanya 605 dan jumlahnya meningkat menjadi 1.347 unit pada 2016. Bus baru yang dimiliki PT Transjakarta ada 800 unit. Selain itu, ada 80 rute baru bus Transjakarta pada 2016.

Faktor kesuksesan peningkatan penumpang Transjakarta tersebut tidak hanya disebabkan oleh penambahan armada, namun juga ada banyak faktor lain. Direktur Pelayanan PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan pihaknya bukan hanya penambahan jumlah bus, melainkan juga peningkatan pelayanan dan pola komunikasi dengan pelanggan. Lebih lanjut Welfi mengatakan bahwa manajemen Transjakarta telah melakukan pelatihan terhadap 6.000 karyawan Transjakarta agar bisa memberi pelayanan yang baik pada penumpang. Selain itu, PT Transjakarta juga melakukan kegiatan sosial agar semakin dekat dengan pelanggan, misalnya saat hari libur nasional.

Pada masa pemerintahan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, PT Transjakarta meluncurkan dua aplikasi pendukung yaitu Go-Busway dan Qlue Transit. Kedua aplikasi tersebut hasil kerja sama antara Go-Jek dan Qlue. Secara garis besar, aplikasi Go-Busway dapat menginformasikan estimasi waktu kedatangan bus Transjakarta di tiap halte dan memesan layanan Go-Ride dari dan ke halte bus Transjakarta yang dipilih. Pengguna Go-Jek harus meng-*update* aplikasi ke versi terbaru. Sementara itu, dengan menggunakan Qlue Transit, warga bisa mengetahui posisi dan kondisi kepadatan penumpang di dalam bus serta halte bus Transjakarta di seluruh wilayah Jakarta. Warga juga bisa tahu nomor, arah tujuan, hingga kondisi jalan pada saat itu. Pengguna Transjakarta bisa memberi *update* informasi secara *real time* atau keluhan pelayanan bus dan halte Transjakarta melalui Qlue Transit

Inovasi dan kemajuan Transjakarta tidak berakhir sampai di situ. Pada 2016, PT Transjakarta memiliki layanan bus khusus yang semakin banyak. PT Transjakarta mendapatkan tambahan bus wisata tingkat hingga 19 unit yang berasal dari sumbangan swasta. Ada juga inovasi layanan “Transjakarta Cares” yang dibuat untuk warga berkebutuhan khusus. Selain itu, ada juga bus-bus khusus wanita dengan ciri khas berwarna merah muda dengan tipe *vintage series*.

◆ 21

COMMUTER LINE: BEST CHOICE FOR URBAN TRANSPORT

Masyarakat yang pernah merasakan transportasi kereta Jabodetabek sebelum 2012 pasti akan puas ketika sekarang menggunakan *commuter line*. Nyaman, harum, aman, dan tenang pasti akan dirasakan oleh setiap penumpang saat ini. Hal ini tentu sangat berbeda dengan masa sebelum *commuter line* berbenah. Bising, kotor, dan rawan kriminalitas menjadi momok tersendiri ketika berada di dalam transportasi ini. Bahkan transportasi *commuter line* kini menjadi *the best choice* bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan Jabodetabek dan sekitar. Perjalanan aman, nyaman, tenang, dan tentunya bebas macet dan polusi menjadi jaminannya.

Masyarakat untuk saat ini cukuplah bersyukur dengan adanya transportasi publik yang satu ini. Ini adalah hasil kerja keras dari anak perusahaan PT KAI yang memfasilitasi penghubung lintas Jabodetabek dalam wujud *commuter line*. Moda transportasi ini menjadi solusi dan alternatif dari padatnya kendaraan berbahan bakar fosil yang memenuhi jalanan ibu kota sembari menunggu transportasi massal modern seperti MRT ataupun monorel terealisasi.

Sejarah kereta listrik ini cukup panjang karena sistem kereta listrik ini bahkan telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada sekitar tahun 2008 PT KCJ fokus dalam penyederhanaan rute dan modernisasi armada yang rata-rata diambil langsung bekas dari Jepang. Tepat pada 2011 sistem kereta listrik yang sebelumnya biasa disebut ekonomi AC ataupun KRL Express resmi digantikan dengan *commuter line* di mana setiap armada akan berhenti di setiap stasiun kecil dan stasiun besar.

Kini, PT KAI Commuter Jabodetabek sejak 19 September 2017 telah berganti nama menjadi PT Kereta Commuter Indonesia. PT KCI adalah salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengelola KA Commuter Jabodetabek dan sekitarnya.

Hingga Agustus 2017, KCI telah memiliki 758 unit KRL dan akan terus bertambah. Sepanjang 2016, KCI telah melakukan penambahan armada sebanyak 60 kereta. Hal ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Hingga Agustus 2017, rata-rata jumlah pengguna KRL per hari mencapai 993.804 pengguna pada hari kerja, dengan rekor jumlah pengguna terbanyak yang dilayani dalam satu hari adalah 1.065.522. Sebagai operator sarana, kereta *commuter line* yang dioperasikan KCI saat ini melayani 75 stasiun di seluruh Jabodetabek, Banten, dan Cikarang dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km. Dengan mengusung semangat dan semboyan *Best Choice for Urban Transport*, PT KCI saat ini terus bekerja keras untuk memenuhi target melayani 1,2 juta penumpang per hari dengan kekuatan armada KRL hingga 1.450 unit pada 2019.

REVITALISASI STASIUN KRL

Sebelum diterapkan *E-ticketing* di 64 stasiun di Jabodetabek, PT KCJ telah berjibaku membongkar kios-kios di peron dan area parkir yang jumlahnya hampir mencapai 5.100 bangunan. Proses pembongkaran

bangunan kios di peron stasiun dan penutupan lubang-lubang akses tidak resmi untuk masuk ke stasiun ini menghabiskan waktu selama hampir 9 bulan.

Setelah itu, tugas selanjutnya adalah merevitalisasi stasiun agar terlihat bagus, nyaman, dan aman. Berbagai macam inovasi dan perubahan dilakukan untuk mengubah stasiun-stasiun Jabodetabek agar bisa memberikan kenyamanan termasuk melarang pedagang, pengamen, dan pengemis masuk ke dalam stasiun dan KRL. Sebagai gantinya, setiap stasiun disediakan sebuah toko ritel resmi seperti Indomaret atau Alfamart untuk memenuhi kebutuhan penumpang.



- ▶ *Peron yang luas dan bersih semakin menambah kenyamanan penumpang (Sumber: bacaini.com)*

Tak hanya itu, area peron diperluas sehingga mampu mengakomodasi dan meningkatkan kenyamanan penumpang. Mengantre di loket dan menunggu KRL kini menjadi lebih lega, nyaman, dan aman dibandingkan sebelumnya. Manfaat perluasan peron dan sterilisasi dapat dirasakan sendiri oleh penumpang, seperti di Stasiun Depok Baru dan Pasar Minggu.

Selain perluasan peron, PT KAI Daerah Operasi 1 juga tengah melakukan perpanjangan peron secara bertahap di 63 stasiun se-Jabodetabek. Melalui perpanjangan peron ini diharapkan ke depannya jumlah gerbong KRL dalam satu rangkaian yang beroperasi dapat bertambah menjadi 10 gerbong. Stasiun Lenteng Agung dan Stasiun Tebet merupakan contoh yang sudah mengalami perpanjangan peron.

Penataan ulang stasiun juga mencakup perluasan dan pembuatan lahan parkir baru di area yang telah ditertibkan pada 63 stasiun di Jabodetabek, seperti Stasiun Bojong Gede, Stasiun Bogor, Stasiun Depok Baru, dan Stasiun Citayam. Sekarang penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi dari rumah menuju stasiun semakin nyaman. Penumpang dapat meninggalkan kendaraannya dengan tenang di area parkir stasiun yang luas dan tertata rapi.

E-TICKETING COMMUTER LINE DAN E-GATE

Berawal dari penandatanganan nota kesepahaman di ruang Rakor Kantor Pusat Bandung pada 16 April 2010, PT KAI dan PT Telkom sepakat untuk bekerja sama dalam pelayanan teknologi informasi dan komunikasi perusahaan. Salah satu hasil kerja sama itu adalah *rail ticketing system (E-ticket)* dalam pelayanan KRL Jabodetabek yang merupakan inovasi perusahaan, yang setara dengan teknologi informasi di Bandara Changi, Singapura.

E-ticketing telah sejajar dengan pelayanan sistem *ticketing* di luar negeri dan kini hadir di KRL. Ini merupakan suatu perubahan besar dan menjadi salah satu kebanggaan bagi seluruh karyawan KRL dari semua lapisan. Rencananya dengan penerapan awal *E-ticketing* pada 2013 tersebut akan dipasang 307 pintu *gate* elektronik sebagai akses pintu masuk dan pintu keluar penumpang. Selain itu, akan dipasang pula 270 perangkat sistem otomatis pada loket di 60 stasiun di Jabodetabek. Jumlah itu akan terus bertambah seiring kebutuhan PT KAI. *E-ticketing* dan *E-gate* yang pelaksanaannya merupakan sinergi antar-BUMN ini sudah

diimplementasikan pada 2013 di 63 stasiun dari 4 rute KRL, yaitu Jakarta–Bogor, Jakarta–Bekasi, Jakarta–Serpong, dan Jakarta–Tangerang. PT Telkom telah bekerja keras menyukseskan penerapan *E-ticketing* tersebut termasuk menyediakan aplikasi *E-Ticketing System* sampai penyediaan *E-payment system* sehingga bisa menghemat kertas sebagai bahan baku tiket kertas yang telah diganti mulai 1 Juli 2013.

PT KCJ telah menyediakan fasilitas untuk mendukung *E-ticketing* sehingga petugas tidak terlalu direpotkan dengan sistem baru ini. Tiket perjalanan KRL dibuat dengan dua kepentingan. Pertama adalah tiket sekali perjalanan atau tiket pulang pergi dan kedua adalah tiket berlangganan. Pengguna tiket berlangganan berbeda dengan pengguna tiket sekali perjalanan. Pada tiket sekali perjalanan, penumpang datang ke loket untuk membeli tiket, kemudian mendapat tiket plastik untuk membuka pintu masuk.

Menuju sistem yang semakin modern, Indonesia juga memerlukan adaptasi yang cukup panjang. Pada awal peluncuran *e-ticketing*, PT KAI harus menelan kerugian hingga Rp 3 miliar hanya dalam waktu seminggu, apa sebabnya? PT KAI selalu kehilangan kartu yang menjadi tiket di setiap perjalanan *commuter line*. Hal ini karena para penumpang keluar tanpa melewati pintu resmi. Beberapa pengguna yang diwawancarai mengatakan bahwa alasan mereka membawa pulang tiket tersebut adalah sebagai buah tangan atau oleh-oleh yang bisa disimpan sebagai suvenir atau juga sebagai cara curang untuk mengakali rute jauh yang lebih mahal dengan membeli tiket dengan tujuan jarak dekat lalu keluar tanpa melalui pintu resmi.

Untuk menanggulangi hal tersebut, akhirnya PT KAI Commuter Jabodetabek mulai memberlakukan penggunaan Tiket Harian Berjamin (THB) di semua stasiun. THB merupakan pengganti dari tiket jenis *single trip* yang sudah diterapkan sebelumnya. Pemberlakuan THB ini merupakan langkah yang ditempuh PT KAI Commuter Jabodetabek setelah banyaknya tiket *single trip* yang hilang saat dibawa pulang oleh penumpang yang keluar stasiun tidak lewat *pintu* resmi, yang mensya-

ratkan kartu tiket harus dimasukkan ke mesin. Akibatnya, PT KAI Commuter Jabodetabek mengalami kerugian yang cukup besar karena 700–800 ribu tiket tidak kembali.



► *Commuter Vending Machine (C-VIM) (Sumber: www.kompasiana.com)*

Untuk dapat menggunakan THB, para penumpang cukup datang ke loket dan membayar uang jaminan tiket sebesar Rp5.000—pada awalnya—dan kini sebesar Rp10.000. Karena tiket ini bersifat jaminan, uang jaminan yang sudah diserahkan penumpang dapat diambil kembali sewaktu-waktu dalam kurun tujuh hari, terhitung setelah tanggal pembelian terakhir tiket perjalanan. Selain itu, selama masa tujuh hari tersebut, tiket juga dapat digunakan untuk membeli tiket lain dengan rute perjalanan baru.

Selain dalam bentuk THB, *E-ticketing* juga bisa berupa kartu *Multitrip* alias kartu langganan yang diluncurkan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Kartu *Multitrip* ini memiliki berbagai macam varian bentuk. Ada yang berupa kartu seperti kartu THB, berbentuk gelang, dan ada yang berbentuk gantungan kunci. Semua itu dilakukan untuk

semakin mempermudah para penumpang agar lebih nyaman, simpel, dan tentunya tidak perlu antri membeli tiket.

TARIF PROGRESIF KRL DAN PSO

Bersamaan dengan penerapan *e-ticket* atau tiket elektronik KRL Jabodetabek pada 1 Juli 2013, diberlakukan pula penerapan tarif progresif KRL Jabodetabek. Tarif KRL semula diterapkan secara *flat* dengan harga rata-rata hampir sama sesuai koridor pelayanan KRL. Untuk menarik minat pengguna KRL lebih banyak, khususnya penumpang jarak pendek, PT KCJ menerapkan tarif progresif.

Dengan tarif ini, para pengguna mendapat keadilan karena penumpang jarak pendek akan membayar lebih murah dibandingkan sistem sebelumnya dengan tarif *flat*. Sebelumnya, penerapan tarif KRL menggunakan sistem *flat* sesuai dengan koridor tujuan KRL. Penumpang jarak pendek harus membayar lebih mahal karena harus membeli tiket sama dengan penumpang tujuan terjauh pada rute KRL. Misalnya, penumpang dari Bekasi ke Klender harus membayar dengan harga Rp8.500 sama dengan penumpang dari Bekasi ke Jakarta Kota. Tarif progresif tiket Bekasi–Klender adalah Rp2.000. Selisihnya lumayan besar.

Dengan penerapan tarif progresif ditambah dengan subsidi dari pemerintah melalui *Public Service Obligation* (PSO), tarif yang dibayar penumpang menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Dengan PSO, penumpang hanya membayar sekitar 60% dari tarif yang seharusnya diterapkan untuk KRL Jabodetabek. Peran pemerintah dalam mengucurkan dana subsidi KRL Jabodetabek sangat membantu para pengguna KRL Jabodetabek.

Pemberian subsidi pemerintah kepada penumpang KRL telah diusulkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan dan telah disetujui oleh Komisi V DPR sehingga subsidi dapat dianggarkan pada 2013 silam. Subsidi ini telah berdampak positif. Pengguna

KRL Jabodetabek sangat terbantu dengan adanya subsidi ini, terutama golongan masyarakat dengan berpenghasilan rendah yang biasanya menggunakan KRL ekonomi. Sejak diberlakukan tiket elektronik dan penerapan tarif progresif, masyarakat berbondong-bondong naik KRL. Bahkan, anak sekolah di daerah Depok, Citayam, Bojong Gede, dan Bogor yang semula menggunakan angkot kini sudah beralih menggunakan KRL.

◆ 22

KA BANDARA SOEKARNO-HATTA: GOTONG ROYONG ANAK BANGSA

Ada kabar baik bagi pengguna moda transportasi pesawat yang memanfaatkan Bandara Soekarno-Hatta. Bila dulu ketika ingin bepergian menggunakan transportasi pesawat kita sering dibuat jengkel dan jenuh dengan perjalanan macet menuju Bandara Soekarno-Hatta, kini ada solusi yang bisa menjadi pilihan utama untuk menghindari kemacetan jalan raya. Transportasi ini pastinya akan terbebas dari kemacetan dan tentunya lebih aman, nyaman, dan memiliki waktu perjalanan yang pasti. Jadi, para penumpang tidak perlu berlama-lama di kendaraan pribadi, bus, atau lainnya saat menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Ya, inilah transportasi KA Bandara Soekarno-Hatta (BSH), salah satu inovasi moda transportasi kereta listrik menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kereta ini sangat memanjakan para penumpang dengan berbagai fasilitas yang ada. KA BSH dilengkapi pendingin udara, pengisi daya ponsel (*charging port*), serta toilet terpisah antara pria dan wanita. Di tiap kereta juga dilengkapi bagasi khusus untuk menempatkan barang bawaan penumpang serta 4 layar TV LED untuk hiburan dan juga memberikan informasi posisi kereta.

KA Bandara Soekarno-Hatta ini sudah melalui uji coba oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, pada Selasa, 28 November 2017. Rini Soemarno melakukan uji coba perdana pengoperasian KA Bandara Soekarno-Hatta (BSH) dari *shelter integrated building* di bandara hingga ke Stasiun Sudirman Baru, Jakarta. Turut hadir mendampingi Menteri BUMN dalam uji coba KA BSH ini di antaranya M. Nur Sodik (PLT Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero)), Heru Kuswanto (Direktur Utama PT Railink), dan sejumlah pejabat BUMN lainnya.

JARAK TEMPUH DAN TICKETING KA BSH

Jarak tempuh yang dilayani Kereta Bandara Soekarno-Hatta untuk rute Manggarai sampai Bandara Soetta sepanjang 36,3 kilometer. Jalurnya terdiri dari jalur yang sudah ada (Manggarai–Batuceper) sepanjang 24,2 km dan jalur baru (Batuceper–Bandara Soetta) sepanjang 12,1 km.



► Foto Tampilan Kereta Api Bandara (Sumber: www.kompas.com)

Adapun stasiun yang dilayani kereta bandara meliputi Manggarai, BNI City (Sudirman Baru), Duri, Batuceper, dan Bandara Soekarno-Hatta. Untuk sementara, pada tahap awal pengoperasian, kereta ini be-

lum melayani naik-turun penumpang di Stasiun Manggarai. Ini karena proses pembangunan peron dan jalur masih berlangsung oleh Satuan Kerja Proyek DDT DJKA Kemenhub. Stasiun Sudirman Baru (BNI City), yang merupakan *city railway station* (CRS), dilengkapi dengan fasilitas *city check in*, *baggage handling*, area komersial terpadu, gerai ATM, *business center*, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Railink membangun sistem *ticketing* secara *inhouse* bernama ARTS (*Airport Railway Ticketing System*) dan ini merupakan produk sistem *ticketing* pertama yang dibangun oleh KAI Group.

Sistem ARTS ini dibangun dengan mengadopsi perkembangan ITC mutakhir berbasis *cashless* (100 persen layanan tanpa tunai seiring dengan program Bank Indonesia dan pemerintah). Layanan ini mampu melayani pembayaran dengan kartu apa pun (kartu kredit, kartu debit, kartu *prepaid*, dan T-cash), serta tanpa loket dan tanpa petugas loket. *Channel* pembayaran menggunakan *single* EDC, ATM, dan *e-commerce* dengan menggandeng mitra perbankan. Sistem ARTS ini telah dikenalkan pada 28 September 2017. Besaran tarif yang akan dikenakan kepada penumpang untuk layanan KA Bandara Soekarno-Hatta dipatok Rp30.000 hingga 31 Desember 2017. Selanjutnya, pada awal tahun, tarif kereta Bandara Soekarno-Hatta disesuaikan. Diperkirakan tarif normalnya menjadi Rp100.000 per orang.

Selain itu, kereta bandara akan berangkat tiap 30 menit sekali. Jadwal pengoperasian adalah pukul 03.00–23.00 WIB. Diperkirakan waktu tempuh ke bandara nantinya bisa dicapai hanya sekitar 40–50 menit. Direktur Utama PT Railink, Heru Kuswanto, mengatakan telah menyiapkan 10 rangkaian KA Bandara Soekarno-Hatta dengan 82 perjalanan dan kapasitas 33.000 penumpang setiap harinya. Satu rangkaian terdiri atas enam kereta yang mampu mengangkut 272 penumpang. Jadwal berangkat kereta pertama dari Stasiun Sudirman Baru pukul 03.21 WIB dan sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 04.18 WIB, sedangkan untuk perjalanan terakhir pada pukul 22.51 WIB di Stasi-

un Sudirman Baru dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta pukul 23.48 WIB.

KA BSH GOTONG ROYONG ANAK BANGSA

Dalam aktivitas uji coba KA BSH, Menteri Rini Soemarno menegaskan bahwa pembangunan KA Bandara ini merupakan wujud sinergi antar-BUMN. Selain melibatkan PT KAI (Persero) dan PT Angkasa Pura II, ada PT LEN Industri (Persero) yang membangun persinyalan dan PT INKA (Persero) sebagai pembuat kereta. Jadi, KA BSH ini merupakan hasil karya anak bangsa, bahkan sistem *ticketing* yang dijelaskan sebelumnya itu dikembangkan sendiri oleh Railink.

Untuk mewujudkan proyek KA BSH terdapat pembagian tugas antara induk perusahaan (PT KAI dan PT Angkasa Pura II) dan anak perusahaan (PT Railink). PT KAI membangun prasarana untuk menunjang pengoperasian KA BSH meliputi jalur baru sepanjang 12,1 km dari Batuceper sampai bandara lengkap dengan jaringan LAA-persinyalan dan telekomunikasi KA, stasiun (Sudirman Baru, Duri, Batuceper), gardu induk LAA, dan dipo pemeliharaan KRL Railink.

Kontribusi PT Angkasa Pura II adalah membangun stasiun di bandara dan konektivitas ke APMS Skytrain untuk menghubungkan stasiun bandara menuju seluruh terminal keberangkatan penerbangan. Yang terakhir adalah kontribusi PT Railink yang bertindak sebagai operator KA Bandara, yaitu melakukan pengadaan sarana, interior stasiun dan kantor, *maintenance tools*, *overhead crane*, rekrutmen pegawai, dan lain-lain.

Tak hanya sampai di situ, gotong royong dalam kesuksesan pembangunan KA BSH ini juga tidak lepas dari peran bank BUMN. Ketiga bank BUMN, yaitu BNI, BRI, dan Mandiri juga berperan dalam pendanaan pengadaan *trainset* yang bernilai \$ 70,407 juta dengan pembiayaan sindikasi. Pembiayaan tersebut untuk memenuhi investasi sarana yang dilakukan oleh PT Railink dengan tujuan membeli *Electric Multiple*

Unit (EMU) atau Kereta Rel Listrik (KRL) baru dari Konsorsium Bombardier Transportation Swedia dan PT INKA sebanyak 10 *trainset* KRL (6 *car* per *trainset*). Adapun kapasitas per *trainset* sebanyak 272 penumpang. Total pengadaan *trainset* tersebut bernilai \$ 70,407 juta dengan pendanaan melalui sindikasi perbankan (BRI, BNI, Mandiri, BCA) dan *self-financing* PT Railink. Lama produksi sarana oleh Konsorsium Bombardier dan INKA adalah 16 bulan sejak dibuka LC.

◆ 23

PT PELINDO II: KESUKSESAN MENGURAI BENANG KUSUT MASA LALU

Aktivitas ekspor-impor yang menggunakan moda transportasi laut tentu mengenal istilah *dwell time*. Menurut World Bank (2011), *dwelling time* adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (*unloading*) dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama. Dulu, tepatnya 5 tahun silam, permasalahan *dwell time* di Indonesia memang tergolong sangat lama, misalnya di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola PT Pelindo 2 mencapai 7 hari. Betapa lamanya, bukan?

Tentu kondisi seperti ini tidak baik dalam bisnis, bahkan bisa menghambat distribusi suatu barang di pasaran—bila itu berupa barang. Bahkan, permasalahan ini sempat mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, tepatnya pada masa Menko Maritim Rizal Ramli. Ia harus membentuk tim atau *task force* untuk mempercepat *Dwell Time*.

Saat ini sudah berbeda, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Priok sudah banyak melakukan perubah-

an untuk mempersingkat *dwell time*. Dengan demikian, hal ini mempermudah sekaligus memberikan pelayanan yang baik dan efektivitas waktu bagi pengguna PT Pelindo 2.

Pada saat ini, *dwell time* atau waktu tunggu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok hanya 3 hari. Bahkan Direktur Utama Pelindo 2, Elvyn G., menargetkan pada tahun depan hanya 2,5 hari. Ini tentu sangat menggembirakan, dari yang sebelumnya menghabiskan 7 hari kini hanya 3 hari.



► Potret aktivitas *Dwelling Time* (Sumber: www.voaindonesia.com)

Salah satu cara yang ditempuh oleh PT Pelindo II untuk menurunkan *dwelling time* adalah saat kapal tiba di pelabuhan, tak perlu lagi memakai dokumen fisik untuk proses pengeluaran barang. Bahkan, pembayarannya kini nontunai sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan bisa dimonitor secara transparan. Upaya penurunan *dwelling time* tersebut juga dalam rangka pemangkasan biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok yang kerap dikeluhkan pengusaha. Dengan sistem baru itu, biaya logistik bisa terpotong hingga 20%. Kalau kapal terlalu lama bersandar, pasti biayanya semakin tinggi. PT Pelindo II terus menekan *dwelling time*. Selain itu, dengan adanya transparansi diharapkan tidak ada ok-

num-oknum yang bermain lagi dalam urusan pungutan liar, yang bisa menghambat waktu bongkar muat peti kemas.

Adanya terobosan pelayanan tersebut tentunya akan semakin memberikan dampak dan kesan positif bagi para eksportir ataupun importir yang menggunakan moda transportasi laut sebagai pilihan untuk pengiriman dan penerimaan barang. Selain itu, akan semakin tercipta iklim bisnis yang kompetitif di mata para pengusaha dan pebisnis karena berbagai kemudahan dan efektivitas waktu.

◆ 24

REVOLUSI DISDUKCAPIL: PELAYANAN YANG LEBIH BAIK

Pernahkah Anda mengurus akta lahir, KTP, surat pindah, atau KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di kota Anda? Pasti sebagian besar menjawab pernah atau bahkan sering. Selanjutnya, apa yang pernah Anda rasakan saat mengurus itu semua? Pasti ada banyak pengalaman kurang menyenangkan yang dialami seperti lambannya pelayanan, rumitnya administrasi, menjamurnya calo yang berkeliaran, serta antrean semrawut yang membludak dan menghabiskan waktu yang sangat lama.

Itu semua mungkin sekelumit potret pelayanan administrasi kependudukan masa lalu. Kini, seiring dengan gerakan revolusi pelayanan yang digalakkan oleh pemerintah, Kemendagri juga terus mencoba melakukan revolusi pelayanan publik, termasuk di sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing daerah. Ada banyak inovasi dan gebrakan yang dilakukan Disdukcapil masing-masing daerah. Bahkan tak jarang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Berikut uraian singkat beberapa program revolusioner layanan administrasi kependudukan.

PROGRAM 3 IN 1 ATAU 4 IN 1

Program *3 in 1* atau *4 in 1* merupakan program di mana masyarakat mengurus satu dokumen, tapi nantinya bisa mendapat tiga atau empat dokumen sekaligus. Misalnya, saat seorang warga mengurus akta perkawinan, otomatis akan mendapat KTP dengan status baru (menikah) dan Kartu Keluarga (KK) baru. Orangtuanya juga mendapat KK baru yang isinya dikurangi anggota keluarga yang menikah dan KK-nya menjadi pisah. Contoh lain adalah bayi yang baru lahir. Dengan mengurus penerbitan akta lahir, KK juga diperbarui dan sang anak mendapat Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini lebih simpel dan efisien ketika berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Dampaknya keberadaan negara benar-benar akan terasa di tengah masyarakat.

Program *3 in 1* atau *4 in 1* sudah banyak diterapkan di berbagai Disdukcapil daerah di Indonesia. Program ini sudah mulai digalakkan secara nasional. Tertanggal 31 Juli 2017, sebagaimana dilansir dari situs dukcapil.kemendagri.go.id, diberitakan sebelumnya sudah ada empat provinsi yang kabupaten/kotanya menerapkan layanan integrasi 100%, yakni Jateng, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Lampung.

Ada satu provinsi lagi yang sudah melakukan hal yang sama, yaitu Maluku. Hal ini berdasarkan Surat Kadis Dukcapil Provinsi Maluku kepada Dirjen Dukcapil Nomor 062/304/Disdukcapil/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017. Provinsi yang beribu kota di Ambon ini sudah melayani dokumen kependudukan terintegrasi di sebelas dinas Dukcapil kabupaten/kota, yakni Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kota Ambon, dan Kota Tual.

JEMPUT BOLA MELAYANI MASYARAKAT

Semangat melayani rakyat sepenuh hati sekarang sudah mulai aktif di berbagai Disdukcapil di berbagai wilayah. Salah satunya adalah dengan pelayanan sistem jemput bola. Pegawai atau staf dinas akan terjun

langsung mendatangi masyarakat untuk menyelesaikan urusan kependudukan. Di masing-masing daerah dengan berbagai inovasinya sudah benar-benar terealisasi. Sudah banyak Disdukcapil melakukan jemput bola untuk melayani urusan administrasi kependudukan masyarakat Indonesia sehingga menciptakan Indonesia yang tertib administrasi kependudukan.



- ▶ *Contoh layanan jemput bola yang dilakukan Disdukcapil Pontianak (Sumber: www.tribunnews.com)*

Sebut saja di Kabupaten Gunungkidul. Daerah ini merupakan dataran tinggi (perbukitan) yang dikenal dengan kawasan Pegunungan Seribu. Gunungkidul memiliki 18 kecamatan dan 144 desa. Dengan kondisi seperti itu, layanan jemput bola menjadi sebuah tuntutan, sehingga dalam peningkatan stelsel aktif dilaksanakan pelayanan keliling yang dilaksanakan secara bergilir sesuai kemampuan, mengingat sarananya sekarang baru satu armada.

Di daerah lain, Disdukcapil Buleleng, juga turut melakukan jemput bola ke sejumlah instansi. Salah satunya ke sekolah-sekolah melalui Unit Pelaksana Pendidikan (UPP). Sistem jemput bola diutamakan bagi anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran. Akta ini menjadi syarat utama pencetakan KIA. Kepala Disdukcapil Buleleng, Putu Reika Nur-

haeni, pada Senin (27/11/2017) mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan sekolah-sekolah untuk memaksimalkan kepemilikan KIA di Buleleng diawali dengan pengurusan akta kelahiran.

Sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat (Sumbar) juga tidak kalah dalam pelayanan jemput bola ini. Dispendukcapil Kabupaten Pasaman Barat melakukan jemput bola dengan cara memaksimalkan layanan pengurusan akta kelahiran sampai ke tingkat jorong (lurah). Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasaman Barat, Yulisna, terobosan ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Pasaman Barat, Syahiran, dengan bukti setiap kegiatan Bupati ke lapangan selalu diikuti dengan layanan administrasi kependudukan terutama akta kelahiran.

SI BUAH HATI LAHIR, PULANG BAWA AKTA LAHIR

Kemudahan mengurus akta lahir semakin terasa di tengah masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan dinas kependudukan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta menjadikan pengurusan akta lahir semakin mudah. Salah satu potret kesuksesan pelayanan akta lahir adalah program Si Buah Hati Lahir, Pulang Bawa Akta Kelahiran. Program ini bekerja sama dengan sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di Kudus.

Kini, program tersebut melebarkan sayapnya ke 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kudus, beberapa di antaranya adalah Puskesmas Wergu Wetan, Purwosari, Ngembalrejo, Mejobo, Tanjungrejo, Dawe, Undaan, Sidorekso, Gondosari, Gribig, Jati Wetan, Rejosori, Ngemplak, dan Jekulo. Penandatanganan kerja sama pelayanan akta kelahiran gratis antara Dinas Dukcapil Kudus dengan seluruh Puskesmas yang telah berlangsung sejak 16 Februari 2017 ini mendapat apresiasi dari Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh.

PELAYANAN DENGAN WAKTU 3 MENIT

Masalah waktu penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk atau surat lainnya memang menjadi masalah tersendiri. Namun, hal itu tidak berlaku di Disdukcapil Padang. Di tempat ini, pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk atau akta hanya 3 menit. Begitu cepat, bukan? Upaya yang dilakukan Disdukcapil ini cukup baik dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk atau akta dengan waktu yang singkat.

Keberhasilan Disdukcapil Padang dengan pelayanan dalam waktu 3 menit dapat dikatakan cukup cepat dibanding wilayah lainnya di Indonesia. Di beberapa daerah juga ada pelayanan Dukcapil yang singkat, namun secara waktu masih kalah dari Padang. Untuk itu, segala sistem dan upaya yang dilakukan Padang dapat menjadi contoh bagi Disdukcapil lain di seluruh Indonesia. Selain pelayanan untuk pembuatan, secara keseluruhan rekam data kependudukan di Padang juga cukup baik dan cepat. Alhasil, capaian 91% penduduk yang telah menyelesaikan pengurusan KTP dinilai melebihi capaian rata-rata nasional yang mencapai 87%.

APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak 2009. Sistem tersebut bertujuan menata sistem administrasi kepen-

dudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan menghasilkan *database* kependudukan yang terpusat.



► *Tampilan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP)*
(Sumber: www.depok.go.id)

Database kependudukan yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Gunungkidul dan ke depannya diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan.

PELAYANAN KEPENDUDUKAN SERBAGRATIS

Sesuai amanat undang-undang administrasi kependudukan, semua dokumen kependudukan seperti KK, E-KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan lain-lain tidak dipungut biaya atau gratis. Jika ada oknum yang masih memungut biaya, hal itu merupakan tindakan pidana.

Penggratisan ini merupakan bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah pusat lewat peluncuran program perbaikan layanan

dasar publik yang diluncurkan Wapres Boediono. Menurutnya, Kemendagri pada masa pemerintahan SBY-Boediono melakukan perbaikan pelayanan publik, terutama untuk dokumen tertentu yang telah dibebaskan biaya pengurusan, seperti kartu keluarga (KK), KTP, dan akta catatan sipil. Untuk mengurus akta kelahiran, masyarakat bisa melakukan di wilayah domisili masing-masing, tidak lagi harus mengurus ke tempat kelahiran seperti dulu.

◆ 25

REVOLUSI PELAYANAN PASPOR: KEBANGKITAN LAYANAN KANTOR IMIGRASI

Carut-marut pelayanan paspor memang tak ada habisnya, antara lain permasalahan antrean yang tumpah ruah, banyak pungli, pelayanan tidak sesuai standar, waktu penyelesaian yang tidak pasti, pelayanan tidak ramah, dan lainnya. Salah satu contoh yang miris adalah masyarakat mendatangi kantor imigrasi sejak tengah malam agar bisa memperoleh 100 antrean yang akan dilayani pada hari itu, namun ternyata mereka tidak dapat antrean karena petugas imigrasi memberikan nomor antrean pada orang yang datang pukul 07.00. Bahkan, usut punya usut ternyata orang tersebut sudah membayar kepada petugas untuk mendapat nomor antrean. Sungguh miris.

Realitas masalah pelayanan pengurusan paspor saat ini dapat kita lihat dari berbagai indikasi, di antaranya masih banyak keluhan para pelanggan atau masyarakat terhadap pelayanan dan pengurusan pemberian paspor. Sarana dan prasarana juga belum memadai sehingga pelanggan atau masyarakat harus datang berulang-ulang, kemampuan sumber daya terbatas, kurangnya transparansi dan prosedur yang berbelit-belit, serta sikap petugas yang kurang ramah dan mencari keuntungan.

Realitasnya, saat ini kebutuhan akan paspor sangat meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permintaan pengurusan paspor oleh masyarakat tiap bulannya, yang mencapai ribuan paspor. Hal ini menandakan bahwa mobilitas masyarakat yang semakin tinggi akan berpengaruh pada kebutuhan masyarakat akan paspor dan diharapkan pelayanan yang diberikan semakin baik. Dengan kata lain, revolusi pelayanan publik di bidang pelayanan paspor adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Saat ini kita bisa sejenak bernapas lega. Kantor-kantor imigrasi mulai beranjak dari masa-masa suram pelayanan paspor menuju pelayanan paspor yang prima. Banyak terobosan dan inovasi di berbagai kantor imigrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memanjakan dan mempermudah pelayanan pengurusan paspor bagi masyarakat. Ini tentunya kabar gembira. Petugas di kantor imigrasi mulai sadar bahwa tugas mereka adalah melayani dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin untuk memberikan kemudahan dan efektivitas pelayanan tanpa berharap keuntungan materiel dari pelayanan tersebut.

Lantas, bagaimana potret inovasi-inovasi pelayanan paspor di berbagai kantor imigrasi?

APLIKASI “ANTREAN PASPOR”

Pemandangan antrean panjang di kantor imigrasi sejak hari masih gelap pasti kerap kita temui. Sudah semakin banyak warga Indonesia yang membutuhkan paspor, maka tak heran kalau pemandangan ini selalu ada setiap saat. Untuk menanggulangnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan inovasi antrean yang bisa diakses secara *online*. Inovasi ini diluncurkan pada awal Mei 2017 untuk mempermudah pelayanan paspor bagi masyarakat. Antrean permohonan paspor *online* bisa diakses lewat ponsel pintar berbasis Android dengan terlebih dulu mengunduh aplikasi “Antrean Paspor”. Dilansir dari detik.com, Sekretaris Dirjen Imigrasi, Friement F.S Aruan,

mengatakan bahwa inovasi ini dikeluarkan untuk memperbaiki sistem pelayanan paspor agar lebih baik. “Saya kira sistem ini akan menjadikan pelayanan semakin baik. Untuk yang baru dan perpanjangan, semua akan dilayani secara *online*,” ungkapnya di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, 10 Mei 2017.

Lewat aplikasi ini, pemohon akan diberikan informasi mengenai hari dan waktu antre yang jelas. Kemudian sistem akan memberikan alokasi tanggal dan waktu untuk datang ke kantor imigrasi. Sistem di kantor imigrasi itu nantinya akan menentukan waktu yang jelas bagi pemohon. Setiap harinya antrean pemohon pun akan dibatasi sesuai kapasitas dari kantor imigrasi, yakni 50 orang per jam. Menurut Friement, hal ini berdasarkan asumsi satu hari kerja dihitung 8 jam, artinya akan ada 8 kali 50 orang setiap harinya.

Inovasi layanan ini masih baru diuji coba di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan karena masyarakat yang mengajukan permohonan paspor di sana cukup banyak. Cara mengakses permohonan antrean paspor *online* adalah pemohon harus mengunduh aplikasi “Antrean Paspor”. Kemudian, pemohon melakukan registrasi terlebih dulu agar bisa mengakses permohonan antrean *online* ini, setelah itu mengisi data pribadi mulai dari *username* hingga nomor induk kependudukan.

Setelah semuanya terisi, pemohon akan melalui proses validasi. Pendaftar pun secara resmi telah terdaftar dalam aplikasi ini. Bagi yang telah selesai melakukan pendaftar-

- ▶ Tampilan Aplikasi Antrean Paspor (Sumber: twitter.com/kanim_jaktim)

an, pendaftar dapat masuk dan mengisi kolom *username* dan *password*. Pendaftar kemudian akan masuk ke halaman permohonan antrean. Di situ pemohon akan memilih kantor imigrasi yang akan menjadi tempat proses pembuatan paspor. Setelah dipilih, ada halaman antrean paspor dan apabila telah selesai tinggal diklik tombol lanjut. Pemohon kemudian akan mendapatkan *e-mail* mengenai waktu pembuatan paspor di kantor imigrasi.

TIGA INOVASI UNTUK KEMUDAHAN PENGURUSAN PASPOR

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus melakukan inovasi untuk mendorong revolusi pelayanan paspor di Indonesia. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei 2016 lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, sudah merilis inovasi pelayanan paspor di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Tak tanggung-tanggung, ia meresmikan tiga inovasi sekaligus.

“Inovasi-inovasi tersebut antara lain Layanan Pagi Hari (*Early Morning Service*), Layanan Proses Permohonan Paspor Tiga Jam, dan Kemudahan Pengambilan Paspor,” tegas Menkumham saat melakukan telekonferensi di *Control Room*, Gedung eks Sentra Mulia, Jakarta, Jumat (20/05/2016).

Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Selatan sudah melakukan layanan pagi hari ini sejak 18 Mei 2016. Karena animo masyarakat yang besar, orang yang mengantre pun sudah ada dari pukul 06.00. Dari keadaan tersebut, Kanim Jakarta Selatan memutuskan membuka pelayanan paspor mulai dari pukul 06.00 setiap Selasa dan Jumat.

Tak hanya pelayanan di pagi hari, kantor imigrasi juga mengeluarkan inovasi *Sunset Passport Service* yaitu layanan imigrasi bagi masyarakat pada sore hari atau selepas masyarakat pulang bekerja. Untuk program ini, kantor imigrasi buka sampai pukul 19.00 sehingga masyarakat dapat

memiliki pilihan untuk mengurus paspor. Ada pula *Emergency Passport Service*, sebuah program layanan imigrasi untuk penerbitan paspor selama 24 jam sehari bagi warga negara Indonesia yang mendadak harus pergi ke luar negeri. Layanan ini diterapkan hanya di kantor imigrasi Soekarno-Hatta.

Dengan inovasi pelayanan tersebut, warga Jakarta tidak terganggu aktivitasnya. Mereka bisa melanjutkan produktivitasnya setelah mengurus paspor di kantor imigrasi. *Early Morning Service* ini dilaksanakan secara serentak pada Kantor Imigrasi di wilayah DKI Jakarta pada 31 Mei 2016.

Program Layanan Proses Permohonan Paspor Tiga Jam telah diuji coba di Kantor Imigrasi Karawang. Dengan penggunaan sistem informasi antrean paspor yang otomatis, pemohon dapat mengetahui estimasi waktu, kapan pemohon dilayani oleh petugas *booth* yang dapat dilihat melalui laman www.sisteminformasiantreanpaspor.go.id. Jadi, pemohon tak perlu menunggu lama di ruang tunggu kantor imigrasi (*kanim*). Dengan diberitahukan kapan pemohon mendapatkan pelayanan, pemohon bisa melakukan aktivitas di luar atau sekitar *kanim*. Kemudian pemohon juga dijamin mendapatkan kepastian pelayanan paspor hingga selesai maksimal tiga jam. Kantor Imigrasi Karawang telah menjamin dalam waktu maksimal tiga jam pemohon telah selesai melakukan proses pelayanan paspor.

Selanjutnya inovasi yang ketiga, pemohon paspor dimudahkan dengan Layanan Kemudahan Pengambilan Paspor. Pemohon akan di manjakan dengan tiga jenis metode pengambilan paspor, yaitu layanan antar ke rumah melalui jasa PT Pos Indonesia, sistem *drive thru*, serta sistem pengambilan menggunakan *barcode*.

Untuk layanan antar ke rumah, yang sudah diuji coba di *Kanim* Jakarta Selatan, pemohon cukup memberikan alamat lengkap beserta tiga orang nama yang tinggal di rumah tersebut. Di Kota Jakarta yang macet ini, untuk mengambil paspor di *kanim* perlu perjuangan yang besar, baik waktu maupun tenaga, belum lagi harus meminta izin kepada atasan ka-

rena harus meninggalkan pekerjaan. Dengan layanan ini, diharapkan warga Jakarta tetap produktif, tidak perlu datang lagi ke kanim untuk mengambil paspor.

Selanjutnya pada sistem *Drive Thru*, yang telah diuji coba di Kanim Cirebon dan Kanim Madiun, pemohon tidak perlu lagi turun atau keluar dari kendaraan untuk mengambil paspor. Pemohon cukup menghampiri alat untuk *scan barcode* yang didapat setelah melakukan pembayaran, kemudian berpindah ke bagian pengambilan paspor tanpa harus turun atau keluar dari kendaraan.



- ▶ Dalam foto ini, tampak seorang warga sedang melakukan pengambilan paspor dibantu petugas (Sumber: www.jawapos.com)

Terakhir adalah sistem pengambilan paspor dengan *barcode*, yang telah diuji coba di Kanim Surabaya. Pemohon dimanjakan dengan pelayanan pengambilan paspor yang cepat, karena dengan *barcode* yang didapat setelah pembayaran, petugas dapat mengetahui dengan mudah tempat penyimpanan paspor pemohon. Cukup dalam hitungan menit, paspor sudah didapat.

Lahirnya inovasi-inovasi ini semoga dapat diterapkan juga di tempat-tempat lain, sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, pelayanan pengurusan paspor sudah tidak terkesan buruk bahkan mendapat kesan baik di tengah masyarakat Indonesia.

PELAYANAN PASPOR DI MAL

Salah satu inovasi pelayanan paspor di Indonesia adalah inovasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Klas 1 khusus Surabaya di Kecamatan Waru dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu melakukan terobosan inovatif dengan membuka pelayanan paspor di dalam mal atau pusat perbelanjaan. Pelayanan paspor ini mendapat apresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, serta para pemohon paspor.

Warga Surabaya dan sekitarnya yang akan mengurus paspor baru ataupun memperpanjang kini bisa memanfaatkan tempat alternatif pelayanan paspor yang relatif lebih nyaman. Selain di Kantor Pelayanan Waru Sidoarjo dan Tanjung Perak Surabaya, pemohon paspor bisa memanfaatkan pelayanan di mal atau pusat perbelanjaan. Tempat pelayanan pengurusan paspor ini terletak di dalam Mal Maspion Square di kawasan Margorejo Kota Surabaya. Selain lebih nyaman berada dalam mal, warga yang mengurus paspor di tempat layanan ini tak perlu antrre berjubel seperti di kantor imigrasi pada umumnya.

Tentu saja tempat layanan paspor di dalam mal ini bebas dari calo dan proses pelayanan tertib sesuai nomor urut antrean. Sambil menunggu proses pembuatan paspor, warga yang mengurus pun bisa berjalan-jalan atau berbelanja di mal itu. Namun, kapasitas pembuatan paspor di dalam mal ini masih dibatasi hanya 75 paspor per hari. Pelayanan pas-

por dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 15.00 WIB. Pembuatan paspor dijamin selesai maksimal tiga hari kerja setelah proses pendaftaran dan foto dilakukan oleh pemohon. “Saya kira pelayanan paspor



“Saya berharap akan dibuka lagi kantor pelayanan seperti ini di mal-mal lain, lebih dekat dengan rumah dan pelayanan nyaman dan tertib.”

(Elly, 50 tahun)

ini harus didaftarkan dalam lomba inovasi pelayanan publik pada Januari tahun depan,” ungkap Yuddy Chrisnandi.

PASPOR MOBIL KELILING DAN CAR FREE DAY

Terobosan dan inovasi pelayanan publik lain di bidang pelayanan paspor adalah membuka pembuatan paspor mobil keliling di wilayah Kota Solo, Jawa Tengah. Terobosan ini adalah yang pertama kali di Indonesia untuk memudahkan masyarakat Solo dan sekitarnya dalam pembuatan paspor. “Karena mereka selama ini dipusatkan di Kantor Induk Imigrasi Surakarta saja,” kata Direktur Lalu lintas (Lalin) Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Cucu Koswala, di sela Pameran Nasional Pelayanan Paspor Mobil Keliling di halaman parkir Stadion Manahan Solo, Jumat (25/8/2017).



► Layanan paspor keliling (Sumber: www.okezone.com)

Dengan adanya layanan Paspor Keliling, masyarakat sekarang dapat membuat paspor lebih mudah, yakni cukup membawa sejumlah dokumen persyaratan, antara lain KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah dalam

bentuk fotokopi dan asli, lalu diberikan kepada petugas penjaga pembuatan paspor keliling.

Pemohon dengan syarat lengkap kemudian akan melakukan wawancara, pengambilan sidik jari, dan pemotretan di lokasi. Namun, untuk pengambilan paspor yang telah selesai dibuat dapat dilakukan di Kantor Induk Imigrasi Surakarta dengan menunjukkan bukti pembayaran dan pendaftaran pembuatan paspor keliling. Layanan Paspor Keliling ini tidak hanya beroperasi pada hari kerja, tetapi juga dibuka pada kegiatan *Car Free Day* di Jalan Slamet Riyadi, Solo, tepatnya di depan Plaza Sriwedari, setiap Minggu pagi. Jadi, masyarakat yang sibuk bekerja pada hari kerja bisa membuat paspor pada hari libur di acara *car free day*.

◆ 26

SIM: TINGKATKAN PELAYANAN, MENJAMIN KEAMANAN

Surat Izin Mengemudi atau yang biasa dikenal dengan SIM menjadi satu tuntutan bagi masyarakat untuk memilikinya. Kartu yang dikeluarkan untuk memberikan izin seseorang mengendarai kendaraan tertentu ini menjadi sorotan publik karena intensitas pelayanannya tinggi setiap waktu. Pada pelayanan SIM ini, ada dua hal utama yang sering dilakukan, yakni pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM lama.

Pelayanan SIM dahulu dikenal dengan pelayanan yang sulit dan tidak transparan, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk mengurus SIM sendiri. Percaloan kerap terjadi dalam pengurusan SIM, baik untuk pembuatan baru maupun perpanjangan SIM. Calo memanfaatkan kesempatan sulitnya dan waktunya yang cukup lama untuk mengurus SIM sebagai pertambahan harga yang harus dibayar. Belum lagi apabila posisi kita sedang berada di tempat yang berbeda dengan domisili. Kita diharuskan kembali ke kota asal untuk memperpanjang SIM tersebut.

Kini proses yang menyita waktu cukup banyak dan memakan biaya cukup besar itu dapat dihindari sebab layanan SIM dapat dilakukan secara *online* sehingga segala proses dapat lebih praktis. Pengurusan tersebut bisa diakses melalui <http://sim.korlantas.polri.go.id>.



► *Ilustrasi penggunaan calo dalam pembuatan SIM (Sumber: acehsatu.com)*

Khususnya untuk perpanjangan SIM, pelayanan secara *online* ini sangat memudahkan masyarakat yang telah berdomisili di daerah lain (bukan daerah asalnya). Jika masa berlaku SIM-nya habis, ia dapat melakukan perpanjangan di mana ia sekarang tinggal.

Basis *online* pada pelayanan SIM bukan berarti layanan SIM dapat memberikan pengemudi kebebasan dalam melakukan perpanjangan atau pembuatan SIM secara *online*. Maksud dari layanan SIM *online* ini adalah semua data dari pemilik SIM sudah terkoneksi secara *online* di seluruh Indonesia. Jadi data SIM dari suatu daerah dapat diakses oleh petugas lain di mana pun di wilayah Indonesia. Perpindahan domisili pun tidak menjadi permasalahan yang berarti pada pelayanan ini.

Pada proses perpanjangan SIM secara *online*, Anda tetap harus mengikuti prosedur sebagaimana perpanjangan SIM pada umumnya. Beberapa persyaratan tentunya belum bisa dilakukan secara *online* keseluruhan, seperti pengecekan kesehatan dan pembayaran yang masih harus dilakukan secara manual dengan mendatangi lokasi Satpas/Gerai/SIM Keliling. Bukan berarti juga saat setelah memasukkan data dalam formulir isian yang bisa diakses melalui situs SIM *online*, Polri selanjutnya langsung mendapatkan SIM baru pengganti yang lama.

Proses *online* ini dianggap mampu menjawab permasalahan masyarakat mengenai jarak dan waktu mengurus SIM. Konsekuensi yang akan diterima pun berat, maka pemilik kendaraan harus memperpanjangnya sebelum masa kedaluwarsa. Pasalnya, terlambat satu hari saja, masyarakat akan diminta membuat SIM baru. Permasalahan penggunaan calo dalam pembuatan dan perpanjangan SIM pun dapat diminimalisasi karena masyarakat sudah tidak khawatir lagi mengurus SIM sendiri.

Permasalahan selanjutnya yang biasa ditemui dari pelayanan SIM adalah pelayanan yang hanya terpusat di kantor DIRLANTAS sehingga menyulitkan para pengurus SIM yang jaraknya jauh. SIM *online* ini telah disempurnakan lagi dengan adanya SIM Keliling. SIM Keliling yang biasa menggunakan bus ini berada di sudut-sudut kota, bahkan di beberapa kota seperti Bekasi, SIM Keliling hadir di parkir pusat perbelanjaan.

Menurut pengalaman salah satu pengguna jasa SIM Keliling, dengan menggunakan pelayanan ini, ia hanya membutuhkan waktu 7 menit 6 detik untuk memperpanjang SIM lamanya sampai mendapatkan SIM baru. Efisiensi ini sangat baik untuk pelayanan publik. Permasalahan calo pun dapat tertanggulangi dengan adanya pelayanan ini karena masyarakat lebih mudah untuk mengurus sendiri tanpa membutuhkan bantuan pihak lain. Pengurusan SIM dengan mandiri ini juga dapat mengurangi harga yang terlampau jauh karena menggunakan jasa calo.

Akan tetapi, yang patut diperhatikan adalah, karena pelayanan ini berbasis internet, kelancaran pelayanan pun tergantung koneksi internet pada saat itu. Apabila koneksi sedang buruk atau justru tidak dapat terkoneksi, layanan pasti akan lumpuh.

SIM Keliling menjadi pelayanan publik yang sangat menarik karena DIRLANTAS tak hanya menunggu bola di dalam ruangan kantor, tetapi mencoba mengejar bola. Pelayanan ini pun disambut positif dengan banyaknya masyarakat yang mengurus keperluan SIM di SIM Keliling sehingga pelayanan ini terbukti sangat membantu. SIM Keliling tidak hanya beroperasi pada jam kantor hari Senin sampai Jumat, namun pada

Sabtu pun masih beroperasi. Kemudahan ini ditawarkan untuk masyarakat perkantoran yang tetap ingin mengurus SIM-nya sendiri.



- ▶ *Peluncuran layanan E-Tilang oleh Korlantas Polri (Sumber :news. okezone.com)*

Selain SIM *online*, sekarang pun sudah bertambah kemudahan-kemudahan seperti E-Samsat dan E-Tilang yang bekerja sama dengan perbankan. E-Samsat bertujuan meningkatkan pelayanan pembayaran pajak daerah dan registrasi kendaraan bermotor dengan menghadirkan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang dilakukan melalui mesin ATM. Dengan kemudahan pembayaran melalui mesin ATM, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan lebih cepat, praktis, dan murah.

Adapun E-Tilang dimaksudkan untuk kemudahan pengurusan dan pembayaran denda tilang dengan mudah, cepat, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi Android dan jaringan *host-to-host real time online* serta dibangunnya sentra data yang dimanfaatkan oleh institusi ini, perkara tilang dapat dikelola secara terpadu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Titipan Denda Tilang di ribuan *channel* dan unit kerja perbankan yang ditunjuk, yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air, tanpa harus menghadiri sidang pengadilan.

◆ 27

TRANSFORMASI PT KAI: BUAH KEPEMIMPINAN IGNASIUS JONAN

Penumpang berjubel. Ada yang bergelantungan di pinggir gerbong kereta. Banyak juga yang duduk memenuhi bagian atas (atap) luar kereta. Begitu bising dan ramai dengan suara pedagang asongan, copet, dan calo tiket. Juga tercium semerbak bau menyengat sampah dan toilet. Banyak hal lain menjadi suasana dan pemandangan khas kereta api masa lalu. Korban tergencet akibat kepenuhan, korban putus kaki akibat terbentur peron, korban jatuh dari kereta, bahkan kecelakaan kereta api adalah musibah yang sudah sering terjadi di masa lalu.

Namun, suasana dan pemandangan kereta api saat ini sudah jauh berbeda dengan masa lalu. Angkutan darat yang memiliki sebak masalah itu sudah disulap menjadi salah satu moda transportasi darat primadona pilihan masyarakat Indonesia. Sarana dan prasarana PT KAI sudah bertransformasi sehingga memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan kepada para penumpang. Siapa sangka itu semua akan terjadi.

Lantas, siapa sosok di balik perubahan pelayanan PT KAI ini? Ia adalah Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama

PT Kereta Api Indonesia (Persero). Ignasius Jonan berhasil menjadikan KAI sebagai transportasi primadona bagi masyarakat saat ini. Jonan mengubah orientasi perusahaan dari orientasi produk ke orientasi pelanggan. Bagi Dirut PT KAI ini, membuat hati pelanggan senang adalah tugas utama dari perusahaan yang dipimpinnya. Pasalnya jika pelanggan puas, mereka akan menjadikan kereta api sebagai alat transportasi favorit untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Berkat ketekunan yang dilakukan Ignasius Jonan, kini wajah perkeretaapian Indonesia pun berubah. Kereta api yang awalnya terkesan kumuh kini menjadi alat transportasi yang nyaman, aman, dan modern. Tak hanya itu, di bawah kepemimpinannya bersama Sulistyو Wimbo yang menjabat sebagai Direktur Komersial PT KAI, keuntungan PT KAI meningkat cukup signifikan. Pada 2008, PT KAI masih mengalami kerugian Rp 80 miliar, namun kini berhasil meraup untung hingga ratusan miliar. Hal itu terjadi karena perubahan strategi dan budaya SDM yang dilakukan oleh Ignasius Jonan. Berikut beberapa inovasi pelayanan di PT KAI:

AC-NISASI KERETA DAN STERILISASI PEDAGANG ASONGAN

Salah satu inovasi yang sangat terkenal yang dilakukan PT KAI melalui ide Direktur Komersial PT KAI, Wimbo, dan telah melalui persetujuan dan sepengetahuan Ignasius Jonan selaku Dirut PT KAI adalah pemasangan AC di kereta ekonomi dan kereta bisnis, baik kereta antarkota maupun KA lokal. Penambahan AC pada kereta kelas ekonomi tidak perlu mengubah desain dasar kereta. PT KAI hanya menambah fasilitas AC Split yang biasa dipakai di rumah-rumah atau perkantoran.

Pemasangan AC ini telah diuji coba beberapa kali dan hasilnya bagus sehingga program AC-nisasi kereta ekonomi dan bisnis ini berlanjut hingga kini. Sejak awal 2012, PT KAI telah mencanangkan pemasangan AC Split di kereta api kelas bisnis dan kelas ekonomi.

Program tersebut disertai dengan penggantian toilet ramah lingkungan yang harus selesai pada 2013 silam. Selain pemasangan AC, PT KAI juga melarang semua pedagang asongan berjualan di dalam kereta, bahkan di dalam stasiun. Stasiun dan area di dalam kereta steril dari para pedagang asongan yang mondar-mandir.

Awalnya terjadi resistensi dalam penerapan program ini karena sudah bertahun-tahun kondisi seperti itu berjalan. Namun pada akhirnya, larangan bagi penjual asongan dan pemasangan AC di kereta ekonomi dan bisnis ini mendapat respons dan sambutan masyarakat yang sangat



Sekarang naik KA kelas ekonomi nyaman. Keretanya ber-AC. Semua memacu roda si ular besi lebih cepat dengan 193 penumpang yang duduk. Tidak ada penumpang berdesakan dan tidak ada pedagang asongan mondar-mandir di atas kereta menjajakan dagangannya dan terakhir keretanya tepat waktu. Mantap pokoknya kereta sekarang.

—Putri, seorang pengguna kereta api yang rutin pergi ke Yogyakarta

baik. Tarif kereta pun terjangkau sehingga dapat menjadi alternatif penumpang dalam memilih produk transportasi. Kini naik kereta ekonomi sudah sangat nyaman. Tidak ada lagi penumpang berdesakan, semuanya duduk sesuai dengan nomor tempat duduk pemesanannya. Juga tidak ada lagi pedagang asongan yang mondar-mandir di atas kereta api.

“Masih ada pedagang yang berseliweran dan perokok di sambungan gerbong *nggak*? Hmm... itu sih cerita dulu, sekarang sudah nihil. Salut sama PT KAI yang sudah sukses dengan tegas merapikan mereka,” tulis Agi Maulana dalam kolom Kompasiana setelah pertama kali menikmati KA Ekonomi Matarmaja pascatransformasi.

PEMBATASAN PENUMPANG KERETA EKONOMI

Pernahkah sudah membeli tiket kereta tapi tidak mendapat kursi saat sampai di dalam gerbong? Atau, sudah membeli tiket dan sudah duduk di kursi tapi sangat jengkel karena berdesakan dengan penumpang yang duduk di lantai? Ya, itu dulu. Semua orang yang pernah menggunakan transportasi kereta jarak jauh sebelum 2013 pasti merasakan dan mengalami hal itu.

Namun, hal itu tidak akan ada lagi sekarang. Tidak akan pernah ada lagi suasana seperti itu. Setiap penumpang yang sudah membeli tiket akan duduk sesuai dengan nomor kursi yang tertera di tiket. Penumpang tidak akan merasa jengkel dengan suasana berdesakan penumpang yang melebihi kursi karena setiap gerbong akan diisi sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia. Jika kursi penuh, tidak akan ada penumpang yang duduk di lantai.



► *Ilustrasi kondisi di dalam kereta saat ini (www.tribunnews.com)*

Itulah kebijakan yang sangat berarti bagi masyarakat karena semenjak 2013 PT KAI sudah mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan penumpang sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di setiap gerbong.

Kesuksesan pembatasan penumpang tentu juga didukung dengan beberapa langkah dari KAI seperti menjaga agar penumpang tanpa tiket tidak naik ke dalam KA dengan ketegasan para kepala stasiun, petugas portir di pintu masuk, dan para kru di atas KA, terutama kondektur, tanpa pandang bulu.

Sistem *boarding* yang ketat juga sangat membantu kesuksesan pembatasan penumpang. Jadi, penumpang yang masuk ke dalam peron stasiun dapat dipastikan adalah penumpang yang telah memiliki tiket.

ONLINE TICKETING

Perkembangan IT yang demikian pesat akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh PT KAI untuk perbaikan sistem *ticketing*. Kalau dulu kita harus antre panjang untuk membeli tiket kereta jarak jauh, kini hal itu sudah tidak perlu lagi. Cukup *smartphone* dalam genggam tangan, kita sudah bisa memesan dan membeli tiket kereta ketika ingin bepergian dengan kereta api, tanpa harus ke loket yang pastinya menyita waktu, tenaga, dan ongkos.

Kesuksesan perubahan pelayanan KAI di bidang *ticketing* berawal dari tangan Kuncoro Wibowo melalui persetujuan Ignasius Jonan. Pada saat itu, Jonan merekrut Kuncoro untuk mempercepat perubahan di bidang IT PT KAI. Masuknya Kuncoro yang merupakan mantan personel sebuah perusahaan seluler swasta telah mendongkrak IT PT KAI menjadi lebih maju dan sejajar dengan perusahaan kelas dunia. Yang lebih terasa bagi masyarakat adalah penerapan IT untuk *ticketing* KA sehingga bisa terkoneksi dengan berbagai jaringan di luar PT KAI. Tiket kereta pun dapat diperoleh melalui berbagai lini penjualan sehingga mempermudah distribusi ke konsumen.

Perbaikan sistem *ticketing* KA tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga untuk PT KAI yang sebagai operator bisa meningkatkan keuntungan. Selain memberikan data yang cepat dan akurat, penerapan *online ticketing* yang bisa dibeli di berbagai layanan seperti aplikasi

KAI atau lainnya bisa menghemat uang transportasi. Ini memberikan efisiensi di berbagai bidang. Loket stasiun beserta petugasnya akan berkurang cukup signifikan. Dengan model penerapan penjualan tiket ini, loket yang sebelumnya mencapai 10 loket di setiap stasiun, kini cukup 4 loket.

Perubahan sistem *ticketing* ini telah mengantarkan PT KAI meraih juara. Perusahaan warisan Belanda yang dulu tidak pernah terdengar suaranya di dunia internasional kecuali kalau terjadi kecelakaan KA, kini telah menjadi finalis dan masuk 5 besar dari 3.000 perusahaan pada *IT Excellence Awards 2012* tingkat Asia Pasifik. Penghargaan itu diterima oleh Direktur SDM dan IT, M. Kuncoro Wibowo, didampingi Dirut Ignasius Jonan di Singapura pada Kamis, 2 Agustus 2012.

KA LOGISTIK DAN WISATA

Dulu PT KAI hanya mengandalkan transportasi untuk mengangkut manusia, bukan barang. Padahal saat itu banyak para pengusaha atau pebisnis membutuhkan alat transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan jumlah besar, baik dari Surabaya ke Jakarta maupun sebaliknya. Mengandalkan transportasi seperti truk tentu menghabiskan banyak biaya dan tentunya tidak aman, karena khawatir dibawa kabur atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian besar.

Kini persoalan itu bisa terjawab. Sejak Dirut KAI dipimpin oleh Ignasius Jonan, diperkenalkanlah moda transportasi untuk mengangkut barang sekaligus kereta untuk wisata yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kereta pengangkut barang sekarang ditangani oleh anak perusahaan PT KAI, yaitu PT Kereta Api Logistik (KALOG). KALOG adalah perusahaan di bawah induk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan bidang layanan distribusi logistik berbasis kereta api (KA) dan dengan cakupan bisnis “*door to door*” (DTD) *service* untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan paripurna serta layanan penunjangnya. Layanan penunjang

itu meliputi pengelolaan Terminal Peti Kemas (TPK), bongkar muat, pergudangan, pengepakan, pelabelan, pengangkutan, penjejakan, pengawasan logistik, serta manajemen logistik dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Orientasi bisnis KALOG ke depan adalah sebagai penyedia jasa layanan distribusi logistik secara total (*Total Logistics Solution*) melalui “*End-to-End Services*” atau dengan kata lain sebagai *SCM Service Provider*.



► *Kereta Api Logistik (KALOG). (Sumber: www.bumn.go.id)*

Fokus dan penguatan peran penting KALOG ini diwujudkan pada tahapan *Pre-Service* dan *Post-Service* dari layanan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta *integrated-service* berbasis *information technology* sepanjang rantai jasa layanan distribusi logistik.

KA Wisata ini tentu sangat bermanfaat bagi para pelancong dan para wisatawan yang ingin berwisata secara rombongan bersama keluarga, rekan kerja, dan lain-lain. Kereta dengan pelayanan prima dan super-menyenangkan tentu menambah kebahagiaan di tengah perjalanan wisata. KA Wisata saat ini melayani tujuan Jakarta–Yogyakarta yang terdapat di KA Taksaka pada keberangkatan setiap Jumat pukul 20.45

WIB di Stasiun Gambir dan dari Stasiun Tugu Yogyakarta pada Minggu 20.00 WIB. Sedangkan untuk tujuan Jakarta–Solo, KA Wisata terdapat di rangkaian KA Argo Lawu yang diberangkatkan di Stasiun Gambir setiap Jumat pukul 20.15 WIB dan di Stasiun Solo Balapan pada Minggu malam pukul 20.00 WIB.

Tiket KA Wisata tujuan Jakarta–Yogyakarta dan Jakarta–Solo dipatok seharga Rp 750 ribu per penumpang dengan fasilitas interior gerbong yang elegan dan mewah. Hal ini bisa terlihat dari dinding kayu jati yang dipasang sepanjang ruang gerbong mulai dari kabin penumpang, kamar mandi, hingga restorasi. Selain interior yang terkesan mewah terdapat tv layar besar untuk karaoke dan *video on demand* (vod) layar sentuh di setiap bangku penumpang yang menyajikan hiburan. Untuk makanan dan minuman, penumpang mendapat “*welcome drink*” berupa jus, sup pembuka, dan makanan utama. Sangat menyenangkan? Yuk, naik kereta wisata!

◆ 28

BUMN HADIR UNTUK NEGERI: SEMANGAT RINI SOEMARNO

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu roda penggerak kehidupan Indonesia. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia sangatlah besar. BUMN sudah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara berupa pajak pada khususnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Menteri BUMN, Rini Soemarno telah memperkenalkan slogan baru Kementerian BUMN yaitu “BUMN Hadir untuk Negeri”. Slogan tersebut pertama kali diluncurkan oleh Rini Soemarno pada perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-70 tahun 2015. Slogan tersebut adalah perwujudan nyata dari program revolusi mental dalam bidang Indonesia Melayani. Slogan ini tentu sangat dalam menunjukkan peranan penting BUMN bagi masyarakat Indonesia. BUMN harus hadir dalam setiap aspek dan membantu setiap warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan slogan tersebut, Menteri Rini Soemarno dalam sebuah wawancara dengan *Media Indonesia* mengungkapkan bahwa sebagai aktualisasi dari slogan tersebut, ia selalu menekankan agar semua jajaran Kementerian BUMN dan para direksi BUMN dalam bekerja senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat yang paling membutuh-

kan dan rakyat yang paling banyak. Direksi BUMN juga bertanggung jawab membesarkan BUMN, memberikan keuntungan, dan meningkatkan nilai investasi. Itu semua adalah sebuah keharusan.



► Logo dan Slogan BUMN. (Sumber: untuknegeri.bumn.go.id)

Akan tetapi, pada saat yang sama, para direksi mesti memberikan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kepada rakyat Indonesia. BUMN bukanlah badan usaha milik investor yang hanya memikirkan keuntungan dan nilai investasi berlipat ganda, melainkan BUMN harus benar-benar hadir sebagai milik negara, yang berarti milik rakyat Indonesia dan berkontribusi kepada rakyat Indonesia.

Kini, tiga tahun berjalan, slogan “BUMN Hadir untuk Negeri” telah menjadi sebuah gerakan nyata dalam bentuk program-program yang telah berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Berbagai program telah dilahirkan di berbagai wilayah Indonesia melalui kerja sama antar-BUMN. Semua BUMN mengambil peran dan kontribusi dalam menyukseskan slogan tersebut di berbagai wilayah Indonesia. Di antara berbagai program dari perwujudan slogan tersebut adalah potret yang telah dilakukan Kementerian BUMN bersama BUMN seperti program Bedah Rumah Veteran, Siswa Mengenal Nusantara, BUMN Mengajar, Pameran Indonesia Hebat, bantuan penambahan fasilitas laboratorium 17 SMK di 34 Provinsi, Jalan Sehat 8 KM, dan Mudik Bareng BUMN.

BEDAH RUMAH VETERAN

Para tentara bersenjata yang pernah berjuang untuk kemerdekaan (veteran) tidak boleh terlupakan. Para pejuang yang sangat berjasa bagi

kemerdekaan Indonesia harus terus diperhatikan pemerintah sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka. Saat ini sering kali ditemukan para veteran perang dan pejuang kemerdekaan memiliki nasib yang tidak beruntung, bahkan hidup serba-kekurangan. Masih banyak para veteran yang di hari tuanya mengalami kesulitan, khususnya belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Oleh karenanya, Kementerian BUMN menginisiasi program Bedah Rumah Veteran sebagai bukti nyata dari slogan “BUMN Hadir untuk Negeri”. Tujuan program ini adalah meningkatkan rasa penghargaan kepada para pahlawan atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Pelaksanaan program ini difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Masing-masing BUMN berkontribusi melakukan bedah rumah veteran yang berada di wilayah kerjanya. Dengan demikian, program tersebut membantu membangun pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai peran Kementerian BUMN dan semua perusahaan pelat merah (BUMN) agar turut berkontribusi nyata pada masyarakat.



- ▶ *Penyerahan bantuan renovasi rumah secara simbolis kepada 48 orang veteran pejuang Republik Indonesia dalam rangkaian BUMN Hadir Untuk Negeri 2017. (Sumber: bumng.go.id)*

Hasil program ini sangat membantu para veteran Indonesia. Bagaimana tidak? Hingga kini, realisasi program ini sejak pertama kali digalakkan pada 2015 di 34 provinsi telah menyelesaikan sebanyak 2.433 rumah dari target sebanyak 4.077 rumah. Rinciannya, sebagaimana dirilis dalam situs resmi untuknegeri.bumn.go.id disebutkan bahwa pada 2015 program ini berhasil melakukan bedah rumah veteran sebanyak 990 dan sebanyak 1.443 selama 2016. Untuk tahun 2017 sampai Januari 2018, belum ada rilis dan keterangan resmi.

BUMN MENGAJAR SISWA NUSANTARA

Berbagai macam program pengabdian masyarakat terus dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama seluruh perusahaan milik negara (BUMN). Semangat slogan “BUMN Hadir untuk Negeri” terus diaktualisasikan dalam bentuk program-program konkret. Salah satunya adalah program BUMN MENGAJAR. Program ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan pelat merah (BUMN) dan dilakukan dengan cara setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengutus direktur utama atau jajaran direksi lainnya untuk mengajar di berbagai sekolah yang tersebar di Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala N. Mansury, misalnya, mewakili maspakai nasional bangsa—Garuda Indonesia—ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan BUMN Mengajar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Program tersebut merupakan inisiasi Kementerian BUMN yang diimplementasikan oleh Garuda Indonesia bekerja sama dengan perusahaan BUMN lainnya, yaitu Damri, Perumnas, PNRI, dan AirNav. Program ini dilaksanakan oleh Garuda Indonesia dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-72 pada 16–17 Agustus 2017.

Selain Garuda Indonesia, M. Arif Zainuddin sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) bersama Kepala Unit PKBL, Arif Wardhana, dan Sekretaris Perusahaan, Ponky L. Kardono juga melaksanakan gerakan BUMN Mengajar di SMK Putra Bangsa yang terletak

di Jalan Raya Jakarta Km. 9 Kecamatan Ciruas, Serang, Banten pada 29 Maret 2017. Arif Zainuddin memberikan pelajaran sekaligus memotivasi semua siswa bekerja keras dalam belajar agar bisa membangun Indonesia. Acara ini juga diisi dengan pengecatan gedung sekolah dan pemberian wawasan mengenai sistem tanam hidroponik yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah.



- ▶ *Direktur Digital & Strategic Portofolio Telkom, Indra Utoyo saat memberi paparan di depan siswa SMAN 1 Bangkalan Madura. (Sumber: aktual.com)*

Adapun PT Telkom Indonesia Tbk. yang termasuk salah satu BUMN tak mau kalah berpartisipasi dalam program ini. Sebanyak empat anggota direksi PT Telkom Indonesia turun ke sekolah-sekolah di Jawa Timur pada 2016 untuk memberikan materi pelajaran terkait industri telekomunikasi. Keempat anggota direksi yang menjadi pengajar itu adalah Indra Utoyo (Direktur Digital & Strategic Portofolio) di SMAN 1 Bangkalan, Abdus Somad Arief (Direktur Network IT and Solution) di SMAN 1 Sidoarjo, Dian Rachmawan (Direktur Consumer Service) di SMAN 2 Surabaya, dan Herdy Harman (Direktur Human Capital Management) di SMA Glagah Banyuwangi. Indra Utoyo di hadapan

sekitar 200 orang pelajar SMA 1 Bangkalan memaparkan tentang peran pentingnya BUMN di Indonesia, termasuk portofolio bisnis yang dikelola dan profesi-profesi yang ada di dalamnya.

Tentunya masih banyak lagi BUMN yang melaksanakan program BUMN Mengajar, tetapi tidak bisa disebutkan semuanya. Yang terpenting dengan potret itu semua adalah kita bisa melihat bahwa semangat hadirnya BUMN di tengah masyarakat, khususnya di tengah siswa dalam konteks ini adalah sebuah prestasi yang harus diapresiasi. Mengajar siswa adalah sebuah investasi emas agar generasi mendatang melahirkan para pemimpin yang bisa membawa BUMN menjadi lebih baik dan sukses.

SISWA MENGENAL NUSANTARA

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia juga terdiri dari banyak suku, budaya, bahasa, ras, dan agama. Namun, dengan keragaman tersebut ternyata Indonesia mampu tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan lambang Pancasila. Indonesia berdiri dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Dengan latar belakang tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menginisiasi sebuah program untuk mengenalkan keanekaragaman Indonesia kepada pelajar. Dalam tataran praktiknya, program ini juga difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Program tersebut diberi nama Siswa Mengenal Nusantara (SMN). Tujuan program ini adalah menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan nusantara. Praktik konkretnya adalah BUMN menyeleksi para siswa terbaik di masing-masing wilayah untuk kemudian dilakukan pertukaran pelajar dari satu wilayah ke wilayah lain selama beberapa hari yang telah ditentukan. Kegiatan ini nantinya akan berdampak kepada proses pertukaran informasi dan kebudayaan antarpelajar/siswa.

BUMN yang mengadakan kegiatan Siswa Mengenal Nusantara (SMN) di antaranya adalah PT Telkom Indonesia dan PT Krakatau Steel. Dua perusahaan ini pada Juli 2017 telah sukses bersinergi melepas 20 siswa dari Provinsi Banten ke Provinsi Lampung untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini. Direktur Human Capital Management Telkom, Herdy Harman, mengatakan bahwa program Siswa Mengenal Nusantara merupakan peluang bagi para siswa untuk mempraktikkan “*digital mindset*”, yakni pola pikir untuk dapat mengakses dan memanfaatkan informasi dari seluruh dunia sehingga memberikan nilai, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, PT Semen Indonesia juga melakukan gerakan ini. Sebanyak 20 siswa SMA/SMK/SLB berprestasi dari Provinsi Sulawesi Utara pada Juli 2017 diberangkatkan ke Provinsi Papua dalam program Siswa Mengenal Nusantara. Selama sepekan, mereka akan mengikuti sejumlah program untuk mengenal berbagai tempat bersejarah dan edukasi. Program SMN di Provinsi Sulawesi Utara ini diinisiasi oleh PT Semen Indonesia bersama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Bhandha Ghara Rekha (BGR).

Tak hanya perusahaan BUMN yang telah disebutkan. Tentunya semua BUMN turut mengadakan program ini di wilayah kerja masing-masing. Program SMN ini telah dilaksanakan sejak 2015 dan telah diikuti oleh 558 siswa pada 2015 dan 679 siswa pada 2016. Program ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang akan dilakukan secara reguler pada tahun-tahun mendatang sehingga menjadi sebuah program yang berkelanjutan.

KAPAL TERAS BRI UNTUK KEPULAUAN DI INDONESIA

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank milik negara (BUMN) yang sudah memiliki cabang di setiap provinsi dan kecamatan. Namun, menurut Menteri BUMN, Rini Soemarno, hal itu belum

bisa dikategorikan “BUMN Hadir untuk Negeri”. Oleh karenanya, dalam Februari 2017, BRI berinvestasi dalam bentuk kapal bernama Kapal Teras BRI. Dengan begitu, BRI sudah bisa dikatakan hadir untuk negeri menurut Rini Soemarno. Menurutnya, dengan bantuan kapal tersebut, BRI bisa mengelilingi sejumlah pulau yang masyarakatnya belum pernah mengenal perbankan. Sebagai informasi, hingga saat ini, sudah ada tiga Kapal Teras BRI yang beroperasi di Kepulauan Seribu, NTT, dan Maluku dengan nilai investasi Rp 40 miliar.



- ▶ *Presiden Joko Widodo meresmikan layanan teras BRI Kapal Bahtera sewa III di Ambon, Maluku. (Sumber: republika.co.id)*

BBM SATU HARGA: DARI BUMN UNTUK INDONESIA

Bentuk lain dari BUMN hadir di tengah masyarakat adalah program yang telah dilakukan perusahaan Pertamina di Papua dan di daerah lain di Indonesia, yaitu program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan ini, warga Papua dan pulau terdepan di

Indonesia dapat menikmati harga BBM seragam seperti di Pulau Jawa. Ini tentu menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Program ini diawali dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan BBM satu harga di seluruh Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian instruksi tersebut dipenuhi oleh Pertamina sebagai perusahaan BBM milik negara.

Program BBM Satu Harga ini dilakukan oleh Pertamina dengan sinergi bersama BUMN lainnya. Bagi Pertamina, jika dinilai dari segi keuntungan memang program ini tidak mungkin dilakukan karena biaya distribusi BBM ke pelosok-pelosok Indonesia bisa mencapai Rp 30–40 ribu per liter. Bisa dibayangkan bagaimana Pertamina berani melakukan hal tersebut. Di sinilah perlu ditekankan bahwa BUMN tetap harus untung agar terus *sustainable*, tapi pada saat kondisi tertentu harus melakukan langkah-langkah untuk bisa menyejahterakan rakyat dan pemerataan ekonomi.

MEKAAR PNM: WUJUD NYATA BUMN HADIR DI TENGAH PARA IBU

Salah satu tujuan digalakkannya BUMN Hadir untuk Negeri oleh Menteri Rini Soemarno adalah menciptakan kondisi dan mendorong BUMN dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia. Alhasil, salah satu wujud nyata gerakan ini adalah apa yang dipersembahkan oleh perusahaan Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dengan sasaran memberdayakan masyarakat prasejahtera.

Program MEKAAR menggunakan konsep pembiayaan pada para ibu per kelompok dengan nilai pinjaman sebesar Rp500.000–Rp3.000.000. Program ini baru beroperasi di Serang, Banten pada Maret 2017 dan memiliki 29 kantor cabang. Nantinya, MEKAAR tentu akan diterapkan oleh perusahaan Permodalan Nasional Madani di seluruh daerah Indonesia agar bisa membantu meningkatkan

kesejahteraan keluarga masyarakat prasejahtera di Indonesia. Tak hanya permodalan, program ini juga memberikan pendampingan sehingga tingkat produktivitasnya bisa membaik dan dapat memberikan manfaat bagi keluarga nasabah MEKAAR PNM.

◆ 29

QLUE: SOLUSI PENGADUAN MASYARAKAT DKI JAKARTA

"Sebelumnya pengaduan masyarakat menggunakan layanan SMS, BBM, WA, bahkan saya sampai mempunyai tiga belas BlackBerry untuk itu. Saat ini, apabila masyarakat ingin melaporkan permasalahan dan kondisi-kondisi yang memperlambat pembangunan di Jakarta sudah bisa dilakukan melalui aplikasi Qlue. Yang terpenting respons dan partisipasi masyarakat. Kalau tanpa partisipasi tidak ada guna. Aplikasi ini untuk melapor masalah sekaligus mendekatkan masyarakat dengan pejabat terkait untuk mengatasi masalah di Jakarta. Aplikasi yang inovatif ini sangat membantu. Saya berterima kasih terhadap Qlue."

—Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta
(di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, pada Sabtu
(13/2/2016))

Ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mengekspresikan berbagai permasalahan dan keluhan mengenai masalah pelayanan publik seperti macet, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, parkir liar, lampu penerang jalan mati, dan lainnya. Beberapa dari mereka menyatakan keluhannya dengan curhat di media sosial seperti

Facebook, Twitter, Path, atau Instagram. Tentu masyarakat berharap curhatan kekesalan dan keluhannya itu bisa dibaca agar kemudian di-respons oleh pemerintah setempat.

Akan tetapi, keluhan dan pengaduan masyarakat yang berseliweran di media sosial sering kali tidak sampai kepada pemerintah setempat atau bisa jadi sampai dan dibaca oleh pemerintah setempat tapi tidak dihiraukan dan diabaikan begitu saja. Hal ini tentu sangat menjengkelkan bagi masyarakat sehingga laporan mengenai sarana dan prasarana layanan publik tak kunjung diperbaiki.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, pengaduan dan keluhan pelayanan publik sekarang tidak perlu disampaikan di media sosial seperti potret tersebut. Keluhan bisa disampaikan dengan sangat efektif bahkan bisa cepat direspons karena sudah terintegrasi dengan sistem pemerintah setempat. Hal inilah yang berhasil dilakukan Pemrov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama melalui kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk aplikasi bernama Qlue, sistem media pengaduan dan pelaporan berbagai masalah di Ibu Kota.

Qlue adalah salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan Jakarta Smart City dalam bentuk media sosial yang mengajak masyarakat berpartisipasi melaporkan keluhan dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan aplikasi ini, warga Jakarta dapat melaporkan aduan terhadap kondisi lingkungan seperti sampah, banjir, kemacetan, jalan rusak, kebakaran, dan lain-lain. Selain itu, setiap laporan dapat dipantau progresnya untuk memastikan semua keluhan yang disampaikan ditindaklanjuti. Dengan aplikasi ini, pengaduan dan keluhan bisa langsung dibaca oleh pemerintah dan diselesaikan dengan cepat melalui koordinasi dengan dinas terkait.

Selain melaporkan masalah perkotaan, Qlue juga memungkinkan pengguna untuk menanyakan sebuah informasi atau meminta pertolongan dari tetangga, melakukan jual-beli atau peminjaman barang, sampai dengan mengulas sebuah tempat. Di lini masa Qlue, warga bisa

melihat laporan masalah yang dibagikan oleh pengguna dari berbagai daerah Jakarta ataupun dari pengguna lain yang berada di dekatnya. Pengguna dimungkinkan memberi *like* atau komentar, serta membagikan laporan warga ke situs lain.



Upload Laporan

Mengambil gambar melalui kamera telepon genggam dan melaporkan kejadian di sekeliling.

Melihat Laporan di Peta

Melihat lokasi-lokasi laporan yang muncul di peta.

- ▶ *Tampilan aplikasi Qlue. (Sumber: techno.id)*

Dengan Qlue, warga dapat menceritakan sebuah kejadian yang akan dilaporkan, baik dalam bentuk teks maupun foto. Laporan yang masuk kemudian akan dipetakan secara digital dan diintegrasikan dengan sistem Jakarta Smart City. Laporan warga di aplikasi ini juga terintegrasi ke laman Smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di laman dan aplikasi tersebut langsung terkoneksi ke aplikasi Android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian bernama Cepat Respons Opini Publik (CROP). CROP sendiri merupakan *dashboard mapping* yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. Setelah respons dilakukan, aparat yang bertugas akan langsung menindaklanjuti laporan warga tersebut, lalu memberi-

kan hasil laporan kegiatan ke Smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi dengan aplikasi Qlue.

Semenjak aplikasi Qlue diluncurkan pada Senin 15/12/2014 oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, sebagai media pengaduan dan keluhan masyarakat, aparat bisa memantau langsung dan menindaklanjuti keluhan tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk memantau kinerja camat dan lurah dalam merespons laporan dari masyarakat tersebut. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Qlue merupakan konsep yang mewujudkan pemerintahan model baru yang melibatkan warga dalam pembentukan kebijakan publik.

Aplikasi Qlue terus melakukan penyempurnaan berbagai fitur dan program yang tersedia di dalamnya. Pada 2016, Qlue meluncurkan sebuah program baru yang menyediakan layanan kepada masyarakat. Aplikasi tersebut bisa melaporkan tentang pungutan liar (pungli) di wilayahnya. Dengan demikian, aplikasi Qlue menjadi sarana media informasi pemerintah DKI untuk mengetahui persoalan pungli yang terjadi di DKI Jakarta. *Founder & CEO* dari Qlue Indonesia, Rama Aditya, mengatakan bahwa program baru aplikasi Qlue ini adalah realisasi dukungan pemberantasan pungli yang sedang dilakukan Presiden Joko Widodo. Menurut Rama Aditya, maraknya praktik pungli di Ibu Kota membuat Qlue berinisiatif untuk membuat aplikasi laporan pungli, ketika pungutan liar ini dinyatakan sebagai salah satu isu atau hal yang wajib untuk diberantas.

Keberadaan Qlue di masyarakat DKI menjadi sebuah solusi dan tempat pilihan utama untuk mengadukan berbagai persoalan Jakarta kepada pemerintah DKI. Menurut data periode 2015 terdapat data laporan, pengaduan, dan keluhan yang masuk melalui aplikasi Qlue sebanyak 134.630. Pada 2016, Qlue menerima laporan ke pemerintah sebanyak 479.353 laporan dengan tingkat tindak lanjut sebanyak 80% dari seluruh laporan yang masuk. Terjadinya lonjakan jumlah laporan ini mengindikasikan bahwa partisipasi publik semakin meningkat seiring tingkat

kecepatan respons dari pemerintah DKI Jakarta. Adapun 10 besar kategori laporan di Jakarta pada 2016 masih didominasi oleh isu sampah sebanyak 18%; pelanggaran 15,9%; parkir liar 12,9%; fasilitas umum 10%; kemacetan 7,1%; jalan rusak 6,3%; iklan tidak berizin 6,2%; lampu jalan rusak 5,8%; kaki lima liar 5,6%; serta pohon tumbang 2,7%, dan sisanya adalah kategori lainnya.



► *Ilustrasi jalan rusak. (Sumber: jawapos.com)*

Pada 2017, ada lima informasi pengaduan dengan urutan teratas pada platform Qlue, yakni masalah sampah, parkir liar, pelanggaran hukum, iklan ilegal, dan fasilitas publik masih menjadi permasalahan yang sering dilaporkan. Dengan bantuan aplikasi Qlue ini, Pemprov Jakarta sudah mampu merespons masalah tersebut dengan waktu tercepat tujuh menit setelah laporan masuk.

Berdasarkan data terakhir 2017, sebagaimana dirilis republika.com, saat ini jumlah laporan yang masuk melalui platform Qlue berkisar 800–1.000 dalam sehari. Adapun data pengguna aplikasi Qlue memang masih didominasi para generasi muda berusia 20–35 tahun dengan populasi sekitar 70%. Pengguna fasilitas Smart City memang masih men-

jangkau para generasi *millenial*. Namun, sedikit demi sedikit, saat ini para pengguna gawai yang berusia di atas 40 tahun sudah mulai menggunakan aplikasi Qlue untuk mengetahui informasi terkait transportasi publik dan melaporkan permasalahan di Ibu Kota yang kerap ditemui dalam perjalanan.

Untuk memudahkan mendaftarkan akun Qlue, pengguna dapat melakukan empat cara pilihan, yaitu melalui e-mail, Facebook, Google+, dan Twitter. Masyarakat hanya perlu memilih salah satunya, kemudian mengisi *username*, e-mail, dan nomor telepon untuk akun tersebut. Adapun untuk melaporkan aduan ke pemerintah DKI Jakarta, masyarakat cukup mengeklik ikon bulat dan pilih laporan ke pemerintah. Kemudian tekan tombol biru untuk mengambil gambar. Bila ingin mengambil video, tekan lebih lama. Untuk aduan tersebut, foto yang diambil bersifat *real time* atau saat itu juga sehingga masyarakat tidak bisa mengambil gambar dari galeri ponsel. Setelah gambar diambil, kemudian klik tanda ceklis dan pilih salah satu kategori terkait laporan, misalnya mengambil gambar sampah, maka yang dipilih harus kategori sampah agar laporan tersebut sesuai. Selanjutnya, masukkan judul laporan, penjelasan mengenai laporan, dan tekan tanda panah untuk mengirim laporan tersebut.

Setelah laporan dikirim, masyarakat dapat memantau perkembangan laporan tersebut. Ada tiga indikator sebagai penanda proses laporan. Pertama, merah adalah laporan sudah masuk dan masih menunggu diproses. Kedua, kuning yaitu laporan sedang diproses. Ketiga, hijau yaitu laporan sudah diselesaikan. Masyarakat dapat mengeklik indikator kuning untuk melihat detail laporan yang sedang diproses dan mengeklik indikator hijau untuk melihat detail penyelesaian laporan. Dengan adanya Qlue ini, masyarakat bukan hanya melapor, tetapi juga dapat memantau perkembangan dari laporan yang dikirim melalui Qlue—apakah sudah terselesaikan atau belum.

Alhasil, dengan aplikasi ini, berbagai persoalan di Jakarta bisa dilaporkan dengan sangat mudah dan akan langsung mendapat penanganan cepat dari pemerintah DKI. Beginilah potret inovasi teknologi yang

sangat membantu pemerintah dalam membangun pemerintahannya. Semoga daerah-daerah lain mengikuti jejak Jakarta dalam transformasi pelaporan dan keluhan yang berada di tengah masyarakat sehingga nantinya bisa memberikan pelayanan yang bagus dan prima bagi masyarakat yang dipimpinnya.

◆ 30

40 INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK

Berbicara mengenai revolusi pelayanan publik di Indonesia kini memang tidak terbatas terhadap apa yang telah dijelaskan sebelumnya di bagian isi buku ini. Faktanya ada banyak inovasi dan terobosan dalam urusan pelayanan publik baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN atau BUMD, yang mungkin tidak bisa dijelaskan dan diuraikan secara keseluruhan di buku ini. Namun, setidaknya uraian dan penjelasan mengenai potret revolusi pelayanan publik itu mengingatkan kita bahwa Indonesia semakin menjadi lebih baik dalam urusan pelayanan publik.

Sehubungan dengan revolusi pelayanan publik tersebut, selain inovasi dan terobosan di uraian dan penjelasan sebelumnya, sebenarnya masih ada seabrek dan puluhan karya inovasi pelayanan publik. Setidaknya, ada empat puluh karya inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah yang telah mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental di Solo pada 25

Agustus 2017. Penganugerahan tersebut dihadiri sekitar 15.000 orang utusan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), komunitas warga, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sejumlah tokoh masyarakat.

Adapun beberapa inovasi pelayanan publik yang muncul dalam ekshibisi di area PKN Revolusi Mental pada saat itu, antara lain PELUK MY DARLING (Perawatan Luka Kusta Menyeluruh dengan *Garden Healing*) yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah, Si Jempol (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medis Pasien *Online*) yang digagas Pemkab Tangerang, SELEMPANG MERA (Selamatkan Pasien Pasung Melalui Tim Samurai ODGJ) oleh Pemkab Sampang, Mencerdaskan Si Miskin Menjadi Generasi Emas yang dilakukan Pemprov Bali, PANTASI MART (Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat) yang digulirkan Pemkab Sumedang, PATUH SELAM (Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Selat Dalam) oleh Pemkab Kapuas, TETAP BERKEMAS (Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat) yang diselenggarakan Pemkab Hulu Sungai Selatan, I-JUS MELON (Izin Usaha Mikro melalui *Online*) di Pemkot Semarang, LONGSET (Lorong Sehat) yang ada di Pemkot Makassar, LASITER AMB (Layanan Transportasi Terpadu Angkutan Masyarakat Bintuni) yang diprogramkan Pemkab Bintuni, dan inovasi lainnya.

PELUK MY DARLING yang digerakkan RSUD Kelet Jepara, misalnya, melakukan upaya penyembuhan kepada penderita kusta dengan memberdayakan sumber daya alam di sekitar rumah sakit. Artinya, pasien tidak hanya diobati di kamar rumah sakit, tapi juga dikenalkan dengan lingkungan sekitarnya. Melalui cara itu, ternyata pasien-pasien bisa lebih *enjoy*. Secara psikologis, mereka lebih senang sehingga proses kesembuhan bisa lebih cepat, dari yang biasanya enam sampai tujuh bulan, menjadi tiga bulan saja.

Adapun Pantasi Mart adalah *minimarket* sebagai pusat pengadaan fasilitas sanitasi masyarakat yang diketuai oleh Kepala Badan Peren-

canaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan pelaksana harian Dinas Kesehatan Kab. Sumedang. Manfaat utama dari inovasi tersebut adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai model sarana air minum dan sanitasi, dengan cara pembayaran yang disesuaikan kemampuan. Pemberian penghargaan kepada 40 Inovasi Pelayanan Publik tersebut sudah mewakili kombinasi dari kategori, kluster lembaga, dan kewilayahan yang berfokus pada kualitas dan keterwakilan. Untuk kategori, indikatornya ialah pelayanan langsung, tata kelola pemerintahan, dan perubahan sosial. Adapun kluster lembaga terdiri dari kementerian/lembaga, kabupaten, kota, dan BUMN. Sementara untuk kewilayahan terdiri dari kelompok A (Sumatera, Jawa, dan Bali), kelompok B (Kalimantan dan Sulawesi), serta kelompok C (Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

◆ 31

BUMN REVOLUSI MENTAL AWARD 2018: APRESIASI TERHADAP PRAKTIK NILAI-NILAI STRATEGIS INSTRUMENTAL

BUMN Revolusi Mental Awards 2018 merupakan acara yang diselenggarakan oleh *Majalah BUMN Track*. Kegiatan ini bertema “Revolusi Kinerja, Pelayanan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN”. Acara ini hadir sebagai bentuk apresiasi atas kinerja BUMN dan anak usaha BUMN dalam menghadirkan peran negara melalui kinerja unggul dan pelayanan publik. Pelayanan publik itu mencerminkan praktik atas nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan tiga nilai strategis instrumental Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Revolusi Mental pada BUMN dan anak-anak usahanya lazim dimaknai oleh para pimpinan BUMN dengan istilah transformasi manajemen korporasi dan bisnis. Dalam konteks itu, setidaknya terdapat tiga kualitas utama dari Revolusi Mental dalam konteks BUMN.

Pertama adalah pelaksanaan *corporate governance* yang baik dan diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak penelitian menunjukkan adanya hubungan linear antara praktik tata kelola perusahaan dan kinerja unggul keuangan, pasar, proses bisnis, dan pembelajaran perusahaan.

Kedua adalah kinerja keuangan yang juga menjadi ukuran kualitas perusahaan sebagai cermin baiknya kinerja pelayanan terhadap pasar, proses bisnis, dan pembelajaran. Perusahaan yang sehat secara keuangan memiliki bisnis yang mampu tumbuh berkelanjutan yang ditunjukkan oleh kesehatan keuangan yang baik sebagai buah inovasi proses bisnis di dalam perusahaan. Ukuran ini juga dimonitor secara komprehensif dalam indikator berbasis KPKU yang dipraktikkan sejak 2012 oleh Kemeneg BUMN sebagai kuasi Pemegang Saham BUMN. Dalam melayani negeri, BUMN dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dibandingkan dengan kualitas pelaku layanan publik kalangan swasta, bahkan perusahaan mancanegara.

Pelayanan publik menjadi indikator penting yang ketiga. Hari ini masyarakat terkoneksi dengan berbagai media sehingga mampu membandingkan kemudahan pelayanan antarperusahaan, bahkan antarnegara. Misalnya, pelayanan bandara di Indonesia dan bandara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, BUMN dan anak-anak usaha BUMN diharapkan menjadi entitas terdepan dalam pelayanan publik sebagai wujud nyata praktik kehadiran negara dan representasi kemajuan pembangunan yang diselenggarakan penyedia jasa atas nama negara, seperti bandara, pelabuhan, transportasi, dan semua unit pelayanan yang berdimensi nasional dan global.

TAHAPAN PENJURIAN

Setelah dewan juri dibentuk, mereka langsung menyusun desain penghargaan BUMN Revolusi Mental pada Februari 2018 yang terbagi dalam empat tahapan utama.

Proses pertama adalah berkonsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) yang telah ditugaskan Presiden Joko Widodo

sebagai penanggung jawab dan koordinator Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Konsultasi ini menghasilkan rumusan konsep, pedoman, dan titik fokus pada proses penjurian.

Setelah itu, proses dilanjutkan dengan memilih dewan juri yang relevan dari unsur Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental, pakar BUMN, praktisi bisnis, dan akademisi yang kredibel. Sejumlah nama berkompeten mengisi peran ini. Dari Gugus Tugas Nasional GNRM, misalnya, terpilih Dr. Arif Budimanta dan Prof Paulus Wirutomo. Saya ikut bergabung sebagai dewan juri atas permintaan *BUMN Track*, sekaligus sebagai anggota gugus tugas tersebut. Para anggota GTN GNRM tersebut kemudian bersinergi dengan praktisi korporasi, Dr. Sugiharto, Menteri BUMN periode tahun 2007–2009, praktisi komunikasi dari Universitas Indonesia, Prof. Ibnu Hamad, pakar SDM dari IPB, Dr. Abdul Basith, dan motivator, penulis buku, dan praktisi *corporate culture*, Ridwan Mukri.

Proses ketiga adalah pemilihan kriteria dan pembuatan kuesioner. Kriteria diambil dari butir butir Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang kemudian dikaitkan dengan butir-butir kriteria kinerja unggul, mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dan mengacu pada panduan yang dikeluarkan Kemeng BUMN. Rumusan kuisisioner itulah yang selanjutnya menjadi dasar proses penilaian awal pada BUMN dan Anak-anak Usaha BUMN yang telah melaksanakan praktik Revolusi Mental, sebagai gerakan nyata transformasi korporasi dan bisnis.

Proses keempat adalah penjurian yang terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap dokumen dan presentasi di hadapan dewan juri. Pada tahap dokumen, BUMN dan Anak Usaha BUMN mengisi kuesioner yang dilengkapi bukti bukti relevan. Tahap dokumen dilakukan pada 2–13 April 2018. Tahap presentasi dilakukan secara maraton pada 17–20 April 2018 di Financial Club Jakarta Selatan. 40 peserta yang terdiri atas 19 BUMN dan 21 Anak Usaha BUMN dengan antusias mengikuti proses penjurian tahap akhir tersebut.

“Semua yang mengikuti ajang ini sejatinya adalah pemenang karena semua menjalankan nilai-nilai budaya korporasi yang selaras dengan tiga nilai strategis instrumental Revolusi Mental,” tegas Dr. Sugiharto yang bertindak sebagai Ketua Dewan Juri, yang ditegaskan oleh Prof. Paulus Wirotomo, yang mengikuti secara persis bagaimana gagasan Revolusi Mental ini diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo pada 2014, setelah sebelumnya diserukan oleh Soekarno pada 1957.

Pernyataan semua adalah pemenang itu amat beralasan karena dituturkan setelah menyimak dokumen, presentasi, dan aksi nyata dari semua peserta BUMN dan Anak Usaha BUMN. *Awarding session* dilakukan pada 26 April 2018 di Hotel JS Luwansa Jakarta dengan tiga pemenang setiap kategori dengan peringkat *gold*, *silver*, dan *bronze*.

Kategori BUMN Melayani terbaik diraih PT Telkom Indonesia, BUMN Bersih terbaik diraih PT Angkasa Pura II, BUMN Tertib terbaik diraih PT Pelabuhan Indonesia III, BUMN Mandiri terbaik PT Bank Tabungan Negara, dan BUMN Bersatu terbaik diraih PT Pelabuhan Indonesia II.

Anak usaha BUMN Melayani terbaik diraih PT Kereta Commuter Indonesia, kategori Anak usaha BUMN Bersih terbaik diraih PT Pertamina Geothermal Energy, kategori Anak usaha BUMN Tertib terbaik diraih PT Kereta Commuter Indonesia, kategori Anak usaha BUMN Mandiri terbaik PT Citilink Indonesia, dan kategori Anak usaha BUMN Bersatu terbaik diraih PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Best Leader BUMN Integritas diraih oleh Muhammad Awaluddin, CEO PT Angkasa Pura II (Persero), Best Leader Etos Kerja diraih oleh Budi Antono, CEO PT Dahana (Persero), dan Best Leader Gotong Royong diraih oleh Risyanto Suanda, CEO Perum Perikanan Indonesia. Aplikasi program GNRM terbaik diraih oleh Bambang Eka Cahyana, CEO PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo 1).

Best Leader Anak Usaha BUMN Integritas diraih oleh Juliandra Nurtjahjo (CEO PT Citilink Indonesia), Etos Kerja terbaik diraih oleh Imanuddin, CEO PT Pelabuhan Tanjung Priok, dan Gotong Royong

terbaik Gold Medal diraih oleh Juliandra Nurtjahjo, CEO PT Citilink Indonesia serta aplikasi program GNRM anak perusahaan BUMN Gold Medal diraih oleh Judi Achmadi, CEO PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma).

Untuk kategori khusus, BPJS Kesehatan meraih yang terbaik dan BPJS Ketenagakerjaan meraih praktik Integritas terbaik.

Awarding session ditutup dengan penganugerahan penghargaan untuk Best of the Best BUMN Revolusi Mental Award tahun 2018 yang diraih oleh PT Telkom Indonesia, sedangkan untuk Best of the Best Anak Usaha BUMN terbaik diraih oleh PT Kereta Commuter Indonesia.

BUDAYA APRESIASI MENGUATKAN PRAKTIK PELAYANAN PUBLIK

BUMN Revolusi Mental Awards ini diharapkan memberi efek berlomba-lomba dalam melakukan praktik kebaikan dan aksi nyata pelayanan publik. Dengan demikian, budaya apresiasi terhadap kinerja pelayanan pada berbagai lapisan korporasi dan pengaruhnya pada anak-anak usaha tumbuh subur. Efek berantai pun diharapkan terjadi bila korporasi diapresiasi oleh *stakeholder*-nya karena ini berarti ada apresiasi terhadap manusia-manusia unggul di dalamnya.

Ada satu cerita menarik dari PT Telkom Sigma yang memberikan apresiasi kepada karyawan yang juga aktif berkontribusi di masyarakat. Misalnya, karyawan yang menjadi Ketua RT. Apresiasi yang diberikan pun bukan berarti materiil, namun bisa dalam bentuk nonfinansial yang dilakukan dengan cerdas dan bijak oleh para pimpinan BUMN dan Anak-anak Usaha BUMN.

Dengan demikian, BUMN dan Anak-anak Usahanya diharapkan menjadi garda terdepan atau motor penggerak Revolusi Mental sebagai aksi nyata perusahaan karakter bangsa pada dunia usaha dan masyarakat. Semangat “BUMN Hadir untuk Negeri” yang menjadi moto

Kementerian BUMN kian menemukan momentumnya oleh aksi nyata pelayanan pengelola BUMN, mitra BUMN, dan keluarganya.

Lebih jauh, tidak hanya sebagai entitas organisasi, seluruh SDM di BUMN dan Anak-anak Usaha BUMN menjadi cerminan dari praktik Revolusi Mental sebagai gerakan perubahan pada organisasi BUMN, lingkungan, masyarakat, dan para kepala keluarga karyawan BUMN dan Anak-anak Perusahaan BUMN.

Semua insan BUMN dan Anak-anak Perusahaan BUMN diharapkan menjadi teladan praktik Revolusi Mental sebagai gerakan perubahan sosial untuk kemajuan Indonesia melalui praktik Revolusi Mental sehingga peran negara benar-benar hadir melalui insan BUMN dan Anak-Anak Perusahaan BUMN tersebut.

Sumber Tulisan: Majalah *BUMN Track* No. 123 tahun XI Maret
2018 hal 26–27

◆ EPILOG

Indonesia tidak pernah kekurangan pemimpin yang menjadi teladan, pemimpin yang melahirkan karya nyata dengan integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental adalah kehendak bangsa—siapa pun pemimpinnya. Bangsa ini sedang membutuhkan cara pikir, cara kerja, dan cara berperilaku yang berbeda untuk mengejar ketertinggalan. Gerakan ini menjadi momentum, siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi bila tidak sekarang. Kita sendirilah yang menciptakan sendiri momentum-momentum perubahan itu.

Perbuatan menunjukkan keteladanan bersuara lebih keras daripada kata-kata, *action speaks louder than words*. Tiga aspek penting untuk menunjang perubahan yang berkesinambungan adalah adanya sistem yang baik, adanya sumber daya pendukung, serta kepemimpinan turun tangan. Keteladanan adalah kunci terpenting. Pengalaman menunjukkan, meskipun infrastruktur dan sistem belum sempurna, bila ditunjukkan, keteladanan akan menjadi pemicu kuat perubahan.

Revolusi Mental ingin mencetak *leaders* yang menunjukkan karya karena kebiasaan bekerja di atas rata-rata. Adalah tugas kita bersama untuk menghadirkannya pada berbagai level kepemimpinan seperti gubernur, bupati, wali kota, pelayanan publik di berbagai bidang, pemimpin masyarakat, dunia usaha dan bisnis, bahkan pemimpin dalam keluarga. Apabila dampak tersebut ditunjukkan dalam lingkungannya, dialah sang *leader*.

Tantangan Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah membangkitkan rasa kepemilikan dari berbagai *stakeholder*, bahwa ini bukanlah proyek sesaat, namun juga gerakan bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Dalam Revolusi Mental ada unsur inspirasi, suatu gerakan nyata yang membangkitkan semangat dan gagasan perbaikan. Dalam Revolusi Mental juga terkandung unsur kebinekaan yang saling menghargai sesama anak bangsa.

Asian Games 2018 juga dapat menjadi inspirasi. Pada momen ini, mata dunia tertuju pada Indonesia. Tidak hanya prestasi perolehan medali, namun juga keseluruhan penyelenggaraan, termasuk keramahan dan kejujuran yang ditunjukkan baik di dalam maupun di luar arena. Apresiasi yang diberikan kepada atlet yang berprestasi juga penting dilakukan sebagai pesan kuat bahwa bila ingin berprestasi, berlatihlah di atas rata-rata. Penghargaan dan piala hadir sebagai hasil atas kerja keras itu. Lahirnya pemenang bukan hanya dari peringkat, namun juga kebiasaan-kebiasaan yang terus diasah.

Suksesnya Revolusi Mental tidak berhenti pada pencapaian indikator-indikator teknis yang selama ini sudah ada, namun juga pada dampak nyata yang terasa. Saat Lebaran 2018, misalnya, terasa suasana perubahan di ruang publik baik di terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, maupun sarana lainnya. Saya meyakini bahwa kita semua merasakannya. Perubahan-perubahan ini kita rasakan manfaatnya, meskipun tidak masuk dalam media. Oleh sebab itu, berkaryalah dan sampaikan karya tersebut agar menginspirasi yang lain untuk berbuat kebaikan.

Kita ingin revolusi mental menjadi milik kita semua. Nilai Integritas, etos kerja, dan gotong royong yang telah menjadi gaya hidup akan melahirkan pemimpin di berbagai lapangan karya di atas rata-rata. Perubahan pola sikap pikir, sikap, dan tindakan yang membuat bangsa ini bisa berlari lebih cepat. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah undangan kepada semua pihak untuk memimpin perubahan yang kita perjuangkan dan hasilnya akan kita rayakan bersama.

◆ REFERENSI

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*, Buku I-III. Jakarta

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2016. *Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM 2015-2019)*. Jakarta

<http://surabaya.go.id/berita/37265-taman---taman-di-kota-surabaya>

<http://bagianhumas.tulungagung.go.id/home/program-instagram-tulungagung-masuk-top-99-layanan-publik-terbaik/>

<http://bagianhumas.tulungagung.go.id/home/psc-tulungagung/>

<http://dpmpstp.jabarprov.go.id/web/blog/1030-Semangat-Pembaharuan-Jabar-Kembangkan-Inovasi-Pelayanan-Publik>

<http://inovasi.lan.go.id/index.php?r=post/read&id=776>

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/37683>

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/rumah-kompos-pemkot-surabaya-mampu-hasilkan-listrik>

<http://koran-sindo.com/page/news/2016-07-13/0/26>

http://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/6672/reformasi-birokrasi-3-tahun-bima---usmar#.Wg2fBTdpHIU

<http://kotaku.pu.go.id/wartadetil.asp?mid=7546&catid=1&>

<http://marketeers.com/berinovasi-saat-bujet-minim-belajar-dari-bantaeng/>

<http://mastel.id/bu-risma-berbagi-pengalaman-kelola-smart-city-di-surabaya/>

<http://mix.co.id/marcomm/news-trend/pr-year-2017-festival-anggaran-kabupaten-batang>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/17/08/19/oux7e377-raih-234-penghargaan-selama-memimpin-jabar-ini-kata-aher>

<http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3199007/satria-emas-sebuah-klinik-ekonomi-ala-bupati-pasuruan;>

http://ntb.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=194%3Aprima-taniamendukung-percepatan-pembangunan-pertanian-di-bumi-gora-dan-bumi-sejuta-sapi&Itemid=34

<http://properti.kompas.com/read/2015/02/04/232605821/Menuju.Kota.Bahagia.Bandung.Perbanyak.Taman>

<http://regional.kompas.com/read/2017/03/02/11031501/menengok.cara.kreatif.pengelolaan.sampah.di.jambangan.surabaya>

<http://regional.kompas.com/read/2017/08/26/08353551/ridwan-kamil-siapkan-mobil-layanan-curhat-bernama-kekasih-juara>

<http://surabaya.tribunnews.com/2017/11/07/lahir-procot-pulang-bawa-akta-banyuwangi-raih-emas-di-filipina>

<http://travel.kompas.com/read/2017/02/06/123700327/punya.72.event.di.b-fest.2017.banyuwangi.diusulkan.jadi.kota.festival>

<http://www.antarajateng.com/detail/kemenpan-apresiasi-festival-anggaran-pemkab-batang.html>

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/201501/program-penanggulangan-kemiskinan-trenggalek-raih-wow-service-excellence>

<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/wisata-halal-jangan-sebatas-jargon/>

<http://www.jpip.or.id/artikelview-395.html>

<http://www.kemendagri.go.id/news/2015/04/30/program-lahir-procot-pulang-bawa-akta-banyuwangi-raih-penghargaan-dari-jk>

<http://www.kerjakuliah.com/2016/08/sri-mulyani-adalah-pencetus-beasiswa.html>

<http://www.lpd.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/>

<http://www.mongabay.co.id/2017/03/15/indonesia-bebas-sampah-2020-kemandirian-pengelolaan-sampah-harus-dilakukan/>

<http://www.pasuruankab.go.id/berita-1801-bupati-inovatif-untuk-ekonomi-kreatif.html>

<http://www.pasuruankab.go.id/berita-2791-hadapi-mea-kabupaten-pasuruan-laksanakan-program-satrya-emas-.html>;

<http://www.pasuruankab.go.id/berita-3955-program-satrya-emas-terbukti-sukses-kembangkan-ukm-di-kabupaten-pasuruan.html>

<http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&catid=2&nid=2170>

<http://www.puncakkab.go.id>

<http://www.republika.co.id/berita/koran/tokoh-perubahan-republika-2014/15/04/30/nny463-nurdin-abdullah-bupati-bantaeng-membangun-sistem-dan-keteladanan>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/21/ov0xo7382-ridwan-kamil-luncurkan-kredit-mesra-lewat-koperasi-masjid>

<http://www.smartbisnis.co.id/content/read/berita-bisnis/umum/peduli-koperasi-dan-umkm-bupati-batang-terima-pin-emas>

<http://www.surabaya.go.id/berita/13663-command-center-pelayanan-terpadu-di-siola-dipilot-jadi-percontohan-nasional>

<http://www.surabaya.go.id/berita/8603-hemat-rp-2-m-pertahun-melalui-pengolahan-limbah-pasar>

<http://www.taputkab.go.id>

<http://www.tifafoundation.org/terobosan-terobosan-bupati-kulon-progo/>

<http://www.tribratanewstaput.com>

<http://www.viva.co.id/siapa/read/196-ridwan-kamil>

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12860/inovasi-bupati-banyuwangi-abdullah-azwar-anas-1>

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/20681/Terobosan-Bupati-Tulungagung-Syahri-Mulyo>

<https://bantaeng-industrialpark.com><https://bantaengkab.go.id/prestasi-daerah/>

<https://batangkab.go.id>
<https://commandcenter.bandung.go.id/profil/>
<https://daerah.sindonews.com/read/1136199/191/tapanuli-utara-ditar-get-jadi-lambung-pangan-nasional-1472809391>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3409920/sri-mulyani-siapkan-rp-225-triliun-untuk-beasiswa-lpdp-tahun-ini>
<https://humas.surabaya.go.id/2017/06/17/ngabuburit-bareng-warga-dolly-risma-tekankan-amanah-dan-prestasi/>
https://id.wikipedia.org/wiki/Syahri_Mulyo
<https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/148528/jelang-dua-tahun-pemerintahan-bupati-tulungagung>
<https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/207842/bupati-syahri-jadikan-pujian-presiden-sebagai-motivasi>
<https://kabarislamia.com/2017/09/18/bupati-kulon-progo-hasto-war-doyo-beli-dan-bela-kulon-progo-untuk-mandiri/>
<https://kumparan.com/taufik-rahadian/bupati-banyuwangi-serius-jajaki-kerja-sama-dengan-go-jek>
<https://m.timesindonesia.co.id/read/147777/20170508/200449/surplus-pangan-bupati-tulungagung-raih-satya-lencana/>
<https://makassar.antaranews.com/berita/6683/satu-tahun-hm-nurdin-abdullah-pimpin-bantaeng-sarat-inovasi-raih-investasi>
<https://news.detik.com/berita/3102031/bela-beli-kulonprogo-spirit-dan-sukses-bupati-hasto-angkat-produk-lokal>
<https://news.detik.com/berita/d-3488024/majukan-puncak-papua-bupati-wandik-raih-penghargaan>
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3354524/tiga-inovasi-pelayanan-publik-pemprov-jabar-diadopsi-17-daerah>
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3558173/bupati-irsyad-raih-penghargaan-satyalancana-dari-presiden>
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3563209/atasi-kemiskinan-program-gertak-trenggalek-raih-penghargaan>

<https://news.okezone.com/read/2017/08/27/519/1763997/decak-kagum-menteri-yohana-saat-kunjungi-bekas-lokalisasi-dolly>

<https://papuanews.id/2017/04/30/majukan-kabupaten-puncak-willem-wandik-terima-penghargaan/>

<https://portal.bandung.go.id/>

<https://profil.merdeka.com/indonesia/s/sri-mulyani-indrawati/>

<https://proklamasi.co.id/berita/nasional/bupati-puncak-jaya-berkat-tol-udara-harga-semen-dan-pangan-turun-di-papua>

<https://sumut.antaranews.com/berita/160636/menteri-perdagangan--pasar-lelang-di-taput-bagus>

<https://swa.co.id/business-champions/cities/best-cities/kiat-profesor-menyulap-kabupaten-tertinggal-menjadi-pusat-bisnis>

<https://trenggalek.memo-x.com/1307/khofifah-resmikan-posko-gertak-trenggalek.html>

<https://tulungagungkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/939>

<https://www.antaranews.com/berita/493741/kota-bogor-luncurkan-pelayanan-perizinan-secara-daring>

<https://www.antaranews.com/berita/598152/aher-bangga-e-government-jabar-dijadikan-percontohan-kpk>

<https://www.bandung.go.id/>

<https://www.kompasiana.com/dedizulkarnain/sms-center-gubernur-ntb-inovasi-e-gov-terbaik-di-indonesia55208a91a33311324746cf68>

<https://www.memo-x.com/143850/kiprah-bupati-tulungagung-syahri-mulyo.html/1>

<https://www.menpan.go.id/site/guntingan-berita/3271-bogor-terapkan-perizinan-online>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/risma-smart-city-adalah-kebutuhan-masyarakat.html>

<https://www.ntbprov.go.id>

<https://www.rappler.com/indonesia/125685-revolusi-mental-kabupaten-banteng>

- <https://www.scribd.com/document/356657170/KOMPILASI-INO-VASI-SKPD-NTB-ppt-Fix-pdf>
- <https://www.skhemorandum.com/daerah/trenggalek/item/9540-pemkab-trenggalek-evaluasi-program-kemiskinan>
- <https://www.suara.com/bisnis/2017/04/19/135840/mensos-resmikan-gerakan-tengok-bawah-masalah-kemiskinan>
- <https://www.suara.com/wawancara/2015/12/28/070000/yoyok-riyo-sudibyo-gebrakan-mayor-edan-di-kabupaten-batang>
- <https://www.trenggalekkab.go.id/menu?page=19&cat=16>
- <http://korankota.co.id/index.php/web/berita/NUSANTARA/4099/isu-mundur-nya-walikota-surabaya-muncul-petisi-save-tri-rismaharini>
- <http://kotaku.pu.go.id/wartadetil.asp?mid=7546&catid=1&>
- <https://www.change.org/p/save-risma-warga-surabaya-tidak-ingin-ibu-risma-mundur-dari-jabatannya-saverisma>
- <http://www.neraca.co.id/article/28652/lpdp-target-rp40-triliun-untuk-pendidikan>
- <http://marketears.com/hasto-wardoyo-sukses-bangun-kemandirian-ekonomi-di-kulon-progo/>
- <http://www.beritasatu.com/megapolitan/423980-bima-arya-sebut-ruang-publik-di-bogor-meningkat-200-persen.html>

FOTO PROFIL TOKOH DAN ILUSTRASI:

- [.https://www.merdeka.com/peristiwa/abdullah-azwar-anas-banyuwangi-tak-butuh-superman.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/abdullah-azwar-anas-banyuwangi-tak-butuh-superman.html)
- [.http://regional.kompas.com/read/2016/10/31/11453811/pesawat.milik.pemkab.puncak.hilang.kontak](http://regional.kompas.com/read/2016/10/31/11453811/pesawat.milik.pemkab.puncak.hilang.kontak)
- [.http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/22/pdi-p-considers-grassroots-support-for-risma.html](http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/22/pdi-p-considers-grassroots-support-for-risma.html)

Dokumen penulis

<http://bacaini.com/tag/index/Jakarta>

- <http://bandung.bisnis.com/read/20150308/82444/528516/45-bus-damri-baru-akan-dipantau-bandung-command-center>
- <http://bonapasogittapanuliutara.blogspot.co.id/2016/01/bupati-taput-bersama-tim-balai-jalan.html>
- <http://bumn.go.id/keretaapi/berita/0-Angkutan-Pupuk-Via-Kereta-Api-Kurangi-Kemacetan-Lalin>
- <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/Rb1OW4xK-cara-bayar-pajak-kendaraan-via-e-samsat>
- <http://foto.kompas.com/photo/detail/2017/09/18/1505731124917/ini-penampakan.kereta.api.bandara.soekarnohatta.buatan.pt.inka>
- <http://jogja.tribunnews.com/2014/03/17/airku-sempat-tiga-kali-ganti-nama>
- <http://makassar.tribunnews.com/2016/04/29/foto-drone-kawasan-pantai-marina-bantaeng>
- <http://makassar.tribunnews.com/2017/09/29/nurdin-abdullah-diberi-waktu-14-hari-cari-wakil>
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/13/02/13/mhe1ss-perjalanan-dinas-pns-pemprov-jabar-diperketat>
- <http://news.unair.ac.id/2017/09/14/pesan-positif-emil-dardak-kepada-agen-perubahan/>
- <http://perkumpulanidea.or.id/kemandirian-daerah-mengatasi-ketimpangan/>
- <http://pontianak.tribunnews.com/2017/02/19/disdukcapil-pontianak-gelar-layanan-jemput-bola-akta-lahir-warga>
- <http://poskotanews.com/2015/03/27/lambat-warga-keluhkan-layanan-bpn-kota-bandung/>
- <http://rsudbwi.banyuwangikab.go.id/news/detail/4541/sidak-bupati-banyuwangi-akui-puas-dengan-pelayanan-rsud-blambangan-banyuwangi.html>
- <http://rsudtulangagung.com/inilah-pasukan-penanganan-darurat-public-safety-community-rsud-iskak/>

- <http://surabaya.tribunnews.com/2016/05/16/15-trik-menjadi-mahasiswa-di-atas-rata-rata-siap-kerja>
- <http://tourismnews.co.id/2017/10/20/banyuwangi-ethno-carnival-2017-akan-pertontonkan-keagungan-gunung-ijen/>
- <http://waspada.co.id/warta/polri-resmi-luncurkan-layanan-e-tilang-sim-online-dan-e-samsat/>
- <http://www.balikipapantoday.net/home/page/55/>
- <http://www.banyuwangibagus.com/2013/08/menikmati-keindahan-kawah-ijen.html?m=0>
- <http://www.bayer.co.id/id/media/berita/bayer-dan-pisagro-dukung-upaya-pemerintah-di-bidang-ketahanan-pangan.php>
- <http://www.beritasatu.com/aktualitas/379819-pilgub-dki-risma-saya-tak-bisa-tolak-takdir.html>
- <http://www.bogor-today.com/aneh-biaya-pemeliharaan-taman-sempur-diistimewakan/>
- <http://www.bpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-ri-nomor-1-tahun-2014-telah-diundangkan-4478>
- <http://www.encyty.co/risma-ancam-warga-kotori-taman-bungkul/>
- <http://www.forumdemokrasi.com/maslahat-expo-2016-kabupaten-pasuruan-mantapkan-ekonomi-maslahat/>
- <http://www.jakarta.go.id/v2/news/2013/01/dki-adopsi-sistem-transportasi-kolombia>
- <http://www.jpip.or.id/artikelview-395.html>
- <http://www.lombokonline.co.id/2850/partai-demokrat-gelar-rakernas-di-lombok-tgb-kader-terbaik.html>
- http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/03/16/18274/perubahan_kelas/
- <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/08/21/kredit-mesra-dari-masjid-untuk-kesejahteraan-umat-407842>
- <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/03/02/jabar-butuh-36-juta-belangko-e-ktp-394957>

<http://www.puncakkab.go.id/berita/141/edisi-khusus-4-tahun-bupati-puncak>

<http://www.puncakkab.go.id/berita/141/edisi-khusus-4-tahun-bupati-puncak>

<http://www.qerja.com/journal/view/763-kembalinya-sri-mulyani-ke-perpolitikan-indonesia-sebagai-menteri-ekonomi/>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/01/ofyhk396-dukung-lombok-jadi-juara-wisata-halal-dunia>

<http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/16/03/14/o413eh283-festival-anggaran-kabupaten-batang-2016>

<http://www.republika.co.id/berita/kementan/foto-kementan/16/05/13/o741iu283-kunjungan-kerja-mentan-ke-trenggalek>

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/06/bandara-silangit-kini-dilengkapi-berbagai-fasilitas-berbasis-digital>

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/10/22/kereta-api-jayabaya-jadi-favorit-penumpang-jatim>

<http://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/966310-harga-beras-ini-rp1-5-juta-per-kilogram>

<http://www.wartaplus.com/bupati-puncak-akui-bandara-ilaga-rawan-kecelakaan/>

<http://www.wovgo.com/2015/12/01/macet-itu-ngeselin-ya-tapi-dari-sekian-penyebab-macet-ini-kamu-setuju-sama-yang-nomer-5-nggak/macet-akibat-pedagang-kaki-lima/>

<https://acehsatu.com/hindari-ribet-warga-pilih-jasa-calo-untuk-proses-pembuatan-sim/>

<https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/tanpa-lahan-parkir-taman-taman-di-bandung-jadi-sumber-kemacetan-1602146.html>

<https://bantaeng-industrialpark.com/en/home/>

<https://en.brilio.net/news/will-ridwan-kamil-go-independent-as-the-next-west-java-governor-170717y.html#questionnaire>

https://id.wikipedia.org/wiki/Nikson_Nababan

- <https://indopolitika.com/dukung-prabowo-bima-arya-sugiarto-jilat-ludah-sendiri/>
- <https://metro.tempo.co/read/598641/e-ticket-transjakarta-bisa-buat-belanja>
- <https://nasional.tempo.co/read/737975/warga-batang-dapat-yap-thiam-hien-ini-kata-bupati-yoyok>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3474826/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-pasuruan-menurun>
- <https://news.okezone.com/view/2017/10/29/1/43963/jangkau-masyarakat-luas-dirjen-imigrasi-luncurkan-mobil-paspor-keliling>
- <https://ps5smaga.wordpress.com/2013/05/21/sambutan-yang-paling-dinantikan/>
- <https://swa.co.id/swa/trends/technology/asyik-pesan-tiket-kereta-kini-bisa-lewat-handphone>
- https://twitter.com/kanim_jaktim
- <https://www.depok.go.id/20/07/2016/01-berita-depok/disduk-sasar-siswa-yang-belum-miliki-akta-kelahiran>
- <https://www.dream.co.id/orbit/cerita-sukses-bupati-pertama-bergelar-profesor-1602062.html>
- <https://www.hipwee.com/travel/kereta-api-riwayatmu-dulu-dan-kini-yang-bikin-cinta-setengah-mati/>
- <https://www.jawapos.com/read/2016/05/24/30266/ambil-paspor-lebih-cepat-dengan-barcode>
- <https://www.kemenkeu.go.id/en/node/52616>
- https://www.kompasiana.com/amadsudarsih/commuter-vending-machine-mesin-loket-tiket-kr1_568e4b04c923bdb908127c02
- https://www.kompasiana.com/caderabdul/yuk-inti-gili-trawangan-pulau-eksotis-di-lombok_552f9c496ea834bf7a8b45b5
- https://www.kompasiana.com/tulisan-dari-perencana/pemanfaatan-potensi-sumber-daya-manusia-untuk-mengatasi-permasalahan-permukiman-kumuh_58430ad51eafbd4d0d5ae464

- <https://www.merdeka.com/uang/menteri-kabinet-jokowi-minta-rakyat-terima-harga-bbm-mahal.html>
- <https://www.voaindonesia.com/a/perizinan-tidak-sinergi-penyebab-dwelling-time-lambat/2903937.html>
- <http://bumn.go.id/kodjabahari/berita/0-kunjungan-menteri-bumn-di-pt-dok-perkapalan-kodja-bahari-persero-galangan-ii>
- <https://tirto.id/pengoperasian-plta-poso-dan-penghematan-pln-bATi>
- <https://www.techno.id/apps/qlue-tempat-berkeluh-kesah-warga-ibu-kota-150817j.html>
- <https://www.jawapos.com/read/2017/11/30/171496/hati-hati-banyak-jalan-rusak-saat-musim-hujan>
- https://www.kompasiana.com/udayalbaar/jejak-cengkih-dan-pala-dalam-kuliner-maluku-kie-raha_5807a1c8149373353a81d8a7
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/07/oubgm0415-bangun-maluku-dengan-potensi-lokal-daerah>
- <https://news.detik.com/berita/d-3321335/konflik-panjang-berakhir-2-desa-di-ambon-berdamai-dan-serahkan-senpi>
- <http://infopublik.id/read/151464/sumur-tua-bojonegoro-akan-jadi-tempat-wisata-edukasi-migas.html>
- <http://www.mediaindonesia.com/news/read/84595/mencari-solusi-lewat-dialog-jumat/2016-12-27>
- <http://citiscopes.org/story/2016/what-cities-hope-do-open-government-partnership>
- <http://www.obsessionnews.com/bupati-bojonegoro-suyoto/>
- <http://smartcity.jakarta.go.id/blog/34/laporkan-kinerja-pemerintah-melalui-qlue>
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/13/oxqyp9335-laporan-warga-di-aplikasi-qlue-menurun-mengapa>
- <https://swa.co.id/swa/trends/business-research/sampah-paling-banyak-dilaporkan-di-qlue>
- http://www.beritajakarta.id/read/6932/Ahok_Luncurkan_Aplikasi_Smart_City#.WITHs9KWbDd

<http://ylki.or.id/2011/10/dahlan-iskan-dan-revolusi-listrik-prabayar/>

<https://tirto.id/m/dahlan-iskan-h>

<https://thedahlaniskanway.wordpress.com/2013/03/14/jauhi-politik-kerja-kerja-kerja/>

<http://fspbumn.or.id/berita-artikel/figure/dahlan-iskan-pribadi-yang-fokus-pada-kerja/152>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada 5 (lima) program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi :

1. Program...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Program Gerakan Indonesia Melayani, yang difokuskan kepada :
 - a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
 - b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
 - c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*);
 - d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara;
 - e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
 - f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 - g. penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
 - h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
 - i. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan
 - j. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
2. Program Gerakan Indonesia Bersih, yang difokuskan kepada :
 - a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas;
 - b. peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - d. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 - e. pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
 - f. mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
 - g. peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
3. Program Gerakan Indonesia Tertib, yang difokuskan kepada :
- a. peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
 - b. peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
 - c. peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
 - d. peningkatan perilaku tertib berlalu lintas;
 - e. peningkatan perilaku antri;
 - f. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
 - g. peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. peningkatan penegakan hukum perilaku tertib;
dan
 - h. menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.
4. Program Gerakan Indonesia Mandiri, yang difokuskan kepada :
- a. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
 - b. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional;
 - d. peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya;
 - e. peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
 - f. peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri;
 - g. peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
 - h. peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
 - i. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
 - j. peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
 - k. pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual;
 - l. peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
 - m. peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
 - n. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
 - o. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.
5. Program Gerakan Indonesia Bersatu, yang difokuskan kepada :
- a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
 - b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
 - c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
 - d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus;
 - f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan;
 - g. peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- g. peningkatan perilaku kerja sama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
- h. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan
- j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

KETIGA : Pelaksanaan 5 (lima) program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikoordinasikan oleh :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib;

4. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Mandiri dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri; dan
5. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersatu dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu.

KEEMPAT : Koordinator masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menyampaikan hasil pelaksanaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan :
 - a. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - b. penyusunan dan penetapan Peta Jalan dan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - c. pembentukan dan penetapan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental yang anggotanya berasal dari unsur kementerian/lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - d. pelaporan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

d. pelaporan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...

◆ TENTANG PENULIS



Ahmad Mukhlis Yusuf adalah *Executive coach* dan pendamping perubahan. Ia pernah memimpin transformasi LKBN ANTARA sebagai badan negara menjadi BUMN berbadan hukum Perusahaan Umum (Perum) pada 2007 dan menjabat sebagai Direktur Utama hingga tahun 2012.

Ia sudah lebih dari dua puluh tahun menekuni dunia praktik manajemen strategis bersama berbagai korporasi, seperti Citra Group, Mahaka Group, BINUS Group, dan Tazkia Group.

Kini Mukhlis berprofesi sebagai *executive coach*, anggota dari *International Coach Federation* (ICF), dan mendampingi para pemimpin perubahan BUMN, swasta, dan kepala daerah di Indonesia. Ia juga menjabat Presiden Asosiasi Profesional Coach Loop Indonesia (2018-2020).

Bersama guru sekaligus sahabatnya sejak tahun 2000, Prof. Rhenald Kasali, ia juga aktif sebagai *Faculty Member* Rumah Perubahan sejak 2013.

Ia mengikuti program doktor Ilmu Manajemen UI pada 2000–2016, MBA *Asian Institute of Management* (AIM) di Manila Filipina, dan sarjana di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB pada 1985–1990.

Kini, ia bersama sang istri, Annis Diniati Raksanagara, dan putrinya, Amira Fadhila, tinggal di Kota Bogor.

Penulis bisa dihubungi melalui telepon dengan nomor: 0 8111 12789 atau e-mail amukhlisyusuf@gmail.com